

SEJARAH PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA 1900-1945

**Dalam Perspektif Penguatan Nasion
dan Nasionalisme**

R.N. Bayu Aji
Sumarno
Eko Satriya Hermawan



Penerbit
Unesa University Press

R.N. Bayu Aji
Sumarno
Eko Satriya Hermawan

SEJARAH Pergerakan Nasional INDONESIA 1900- 1945

Dalam Perspektif Penguatan Nasion dan Nasionalisme

Diterbitkan Oleh

UNESA UNIVERSITY PRESS

Anggota IKAPI No. 060/JTI/97

Anggota APPTI No. 133/KTA/APPTI/X/2015

Kampus Unesa Ketintang

Gedung C-15 Surabaya

Telp. 031 – 8288598; 8280009 ext. 109

Fax. 031 – 8288598

Email : unipress@unesa.ac.id

unipressunesa@gmail.com

vi,135 hal., Illus, 15,5 x 23

ISBN : 978-602-449-460-5

copyright © 2020 Unesa University Press

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun baik cetak, fotoprint, microfilm, dan sebagainya, tanpa izin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Indonesai memiliki sejarah panjang dalam proses merebut kemerdekaannya dari kolonialisme Belanda dan juga kolonialisme Jepang. Tidak bisa dimungkiri bahwa Indonesia di awal abad ke-20 merupakan gagasan besar dari para *founding fathers* Indonesia. Sewaktu para *founding fathers* Indonesia berusia muda, di saat mereka sedang mencari jati dirinya, mereka memimpikan secara kuat tentang Indonesia yang yang dibayangkan secara kuat di benak mereka yang terus menerus di rawat sampai pada akhirnya bisa mewujudkannya di tahun 1945. Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia merupakan bagian sejarah perjuangan bangsa yang tidak bisa dipisahkan dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia.

Seperti halnya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tersurat menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan kemerdekaan Indonesia merupakan dorongan keinginan luhur dari segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Sejarah pergerakan nasional Indonesia merupakan peristiwa historis yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan-perkembangan yang sedang melingkupi keadaan dalam negeri (di Hindia Belanda) maupun kondisi di dunia internasional. Perkembangan itu bisa dilihat dari faktor ekonomi, sosial, politik, budaya dan juga religi. Faktor tersebut saling berkelindan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain sehingga membentuk pergerakan di Indonesia. Oleh sebab itu, dapat diartikan bahwa pergerakan nasional Indonesia tidaklah berjalan tanpa adanya keselarasan pergerakan yang digerakkan dan digelorkan oleh para *founding fathers* Indonesia.

Buku ajar “Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1945 dalam perspektif Penguatan Nasion dan Nasionalisme” ini dapat disusun dan diselesaikan berkat banyak bantuan berbagai pihak, terutama dari kolega di Jurusan Pendidikan Sejarah Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH), Universitas Negeri Surabaya.

Surabaya 2019

Penulis,

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Bab I - Munculnya Nasion-Nasionalisme Di Dunia.....	1
A. Nasionalisme Eropa.....	1
B. Nasionalisme Amerika	7
C. Nasionalisme Afrika.....	13
D. Nasionalisme Asia	18
E. Nasionalisme Asia Tenggara.....	24
Bab II - Kondisi Politik Kolonial Di Hindia Belanda	29
A. Perkembangan Hindia Belanda Hingga Awal Abad ke-20.....	29
B. Gagasan Baru Negeri Kolonial	34
C. Kebijakan Politik Etis 1901	35
D. Edukasi (Pendidikan).....	37
E. Tujuan Politik Etis	39
F. Munculnya Elit Modern di Indonesia	40
Bab III - Gagasan Nasionalisme dan Pergerakan Nasional Indonesia...45	
A. Konsep Nasionalisme	45
B. Perjuangan Indonesia Sebelum dan Sesudah 1908.....	49
Bab IV - Gagasan tentang Indonesia	52
A. Nama Indonesia dari Pendekatan Etnografi sampai Politik	52
B. Kongres Pemuda dan Lagu Indonesia Raya	56
Bab V - Pergerakan Nasional Indonesia	58
A. Pelopor Pergerakan (BU, SI dan IP)	58
B. Masa Radikal (Perhimpunan Indonesia, PKI, PNI)	66
C. Akhir Hindia Belanda dalam masa pergerakan nasional (Peran Fraksi Nasional, Petisi Sutardjo, GAPI)	74
Bab VI - Organisasi Masyarakat Dan Perempuan Era Pergerakan Nasional	83
A. Muhammadiyah	83

B. Nahdlatul Ulama	89
C. MIAI	94
D. Organisasi Perempuan	97
Bab VII - Kolonialisme Jepang Di Indonesia	105
A. Jepang Mendarat di Indonesia	105
B. Struktur Pemerintahan Zaman Jepang	116
C. Sikap Tokoh Pergerakan Indonesia Terhadap Jepang	124
D. Pendidikan dan Budaya Zaman Jepang	126
E. Perumusan Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945 dalam BPUPKI	127
Bab VIII - Peristiwa Di Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia	128
A. Kekalahan Jepang dalam PD II	128
B. Pemuda Dan Peristiwa Rengasdengklok	130
C. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia	130
Daftar Pustaka	132
Glosarium	134

Bab I

Munculnya Nasion-Nasionalisme Di Dunia

A. Nasionalisme Eropa

Pada umumnya rasa kebangsaan di dunia Barat dapat ditemukan melalui praktik yang dilakukan oleh warga kerajaa Romawi. Saat kejayaan Romawi, diterapkan suatu kebijakan, bahwa siapa saja yang tercatat sebagai warga kerajaan Romawi harus diberi perlindungan hukum dan penjaminan hidup selama berada di wilayah kerajaan. Kebijakan tersebut dijalankan dengan baik oleh penguasa kerajaan. Dampak baiknya, warga kerajaan semakin memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Romawi. Dari praktik semacam itulah rasa kebangsaan (nasionalisme) mulai menjadi faham.

Tetapi semenjak Romawi jatuh pada tahun 476 M, rasa kebangsaan di Barat mulai pudar. Hal ini disebabkan adanya pergeseran praktik sosial-politik di wilayah Eropa yang sedang diselimuti kegelapan (Abad Pertengahan). Pergeseran tersebut bisa dilihat melalui fenomena berikut:

1. Dominasi gereja yang memiliki pengaruh untuk mengatur dan menentukan aktivitas kehidupan, baik kerohanian maupun keduniawian.
2. Struktur sosial masyarakat abad pertengahan masih menjalankan praktik feodalisme, di mana orang merasa lebih bertanggung jawab pada pengelolaan tanah daripada menjalin ikatan sosial dalam spektrum besar.

Seiring berubahnya iklim politik Eropa, terutama setelah adanya gerakan aufklarung dan reformasi yang menentang dominasi gereja serta turut memperkenalkan sains, rasa nasionalisme Eropa mulai tumbuh dan terlembaga. Mengenai hal tersebut, Edward Hallet Carr (1945) memberikan catatan periodik.

1. Periode Pertama (Abad XVII-XVIII)

Periode ini dimulai dengan kejadian hancurnya ikatan-ikatan politik kerajaan dengan gereja Abad Pertengahan yang juga diiringi dengan kemunculan negara-negara nasional. Pada periode ini, kemunculan rasa kebangsaan dilatarbelakangi oleh aktivitas memproduksi barang yang bergeser dari yang semula berbasis alat-alat kuno menjadi bergantung pada mesin-mesin konvensional. Sistem produksi yang agraris mulai berganti. Sehingga para warga mulai saling berinteraksi untuk dapat mengakses kemajuan pesat sistem yang baru tersebut. Intensitas pertemuan yang terjadi antar warga dalam suatu wilayah administrasi tertentu demikian yang mendorong munculnya kembali solidaritas kewilayahan.

Para warga sudah tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, melainkan terdorong untuk menyelenggarakan perkumpulan-perkumpulan sosial dalam skala besar guna membuat kesepakatan bersama tentang perlindungan hak milik dan barang produksi di bawah penguasa atau negara. Sehingga periode ini juga disebut sebagai periode identifikasi bangsa pada sosok yang berkuasa (*identification of the nation with the person of the sovereign*).

Ciri utama periode ini adalah ekonomi politik perdagangan yang ditempuh oleh negara-negara nasional. Sistem yang dijalankan disebut merkantilisme, yakni suatu kebijakan ekonomi politik yang mensyaratkan negara harus bisa memasukkan logam mulia ke dalam negeri dalam jumlah sangat besar; dan neraca perdagangan harus positif. Kedua kebijakan merkantilisme tersebut pada praktiknya membuat suatu sistem politik internasional baru yang dinamakan kolonialisme dan imperialisme.

Negara-negara nasional Eropa bersaing untuk mendapatkan bahan mentah dan logam mulia supaya dapat memenuhi kebutuhan nasional. Disebabkan ketersediaan barang di dalam negerinya sendiri tidak cukup, maka mereka keluar menjelajah untuk mencari cadangan devisa dengan cara datang ke negeri-negeri lain dan melakukan politik dominasi di sana. Strategi dan taktik yang mereka tempuh tidak lain adalah strategi perang massa. Menurut Edward Hallet Carr menyebut, bahwa perang bagi penganut merkantilisme menjadi suatu alat kebijakan yang penting guna mencapai tujuan kemakmuran bagi negara.

2. Periode Kedua (Abad XIX)

Periode ini ditandai dengan dua revolusi besar yang terjadi di Prancis dan Amerika. Sejak kekacauan perang Napoleon dan pemberontakan bangsa Amerika terhadap penjajahan Inggris, rasa kebangsaan mulai bergeser dari yang semula berupa penyerahan kehendak kepada penguasa (personal) beralih menjadi penyatuan

kehendak bersama oleh rakyat secara keseluruhan (people). Dalam peristiwa revolusi Prancis tahun 1789, kekuasaan personal di tangan penguasa atau raja dilucuti habis oleh aliansi kekuatan rakyat yang menentang praktik feodalisme. Sedangkan perlawanan Amerika juga dimotori oleh lahirnya kesadaran sebagai suatu bangsa yang memiliki persamaan kegendak untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu, yakni merdeka dari ikatan kolonialisme Inggris.

Di wilayah ekonomi politik, perubahan ini berdampak pada bergesernya alat produksi barang di wilayah Eropa. Apabila dalam periode pertama mesin-mesin masih konvensional, maka di periode kedua ini mesin-mesin semakin canggih terutama sejak ditemukannya alat-alat baru di bidang teknik. Dari situ pula muncul suatu kelas sosial baru sebagai konsekuensi praktik produksi, yakni kelas pemilik modal (borjuis) yang didominasi oleh kelas menengah. Dengan demikian praksis dominasi negara pun diambil alih oleh *middle class* ini. Sehingga periode kedua ini disebut sebagai *the middle class nationalism*.

Kelas menengah secara mengejutkan telah menjadi subjek utama aktivitas politik dan ekonomi masyarakat Eropa. Sehingga arah perjuangan bangsa dikendalikan oleh ide dan gagasan yang muncul dari para pemimpin kelas menengah. Hal tersebut berdampak pada dua hal, yakni, *pertama*, perubahan sistem ekonomi dari yang semula merkantilisme menjadi berhaluan *laissez faire*, yang berarti mengecilnya peran negara dan membuncahnya sektor swasta; *kedua*, persinggungan di Eropa merepresentasikan konflik antar kelas

menengah yang berkuasa di masing-masing negara. Pada periode ini, Eropa sudah memasuki era industri penuh dan memunculkan paham baru dari seorang Karl Marx.

3. Periode Ketiga (Abad XX)

Besarnya peran kelas menengah pada periode kedua ternyata dalam perjalanannya menimbulkan persoalan-persoalan yang pelik di seluruh wilayah Eropa. Pada periode ini, kelas menengah yang dalam periode kedua leluasa memainkan urusan politik dan ekonomi mulai mengalami perlawanan dari organisasi buruh. Hasilnya kebijakan negara harus diganti dari yang semula merepresentasikan tuntutan politik kelas menengah berubah menjadi tuntutan ekonomi dari massa secara keseluruhan yang ikut berperan dalam memajukan perekonomian negara.

Tidak semua negara besar mampu untuk menjawab tuntutan-tuntutan tersebut. Sehingga menimbulkan pecahan-pecahan kepentingan yang termanifestasikan dalam bentuk negara-negara baru. Mereka menghendaki untuk turut serta terlibat dalam persaingan industri internasional. Oleh karenanya, dalam periode ketiga ini paham kebangsaan semakin meluas di sejumlah wilayah Eropa. Sebagai gambaran, tahun 1871 tercatat sebanyak 14 negara yang merdeka dari persatuan Jerman dan Italia, tetapi di tahun 1914 jumlah tersebut naik menjadi 20, dan mencapai signifikansi di tahun 1924 dengan jumlah sebanyak 26 negara.

Sejak saat itu pula kekuasaan politik ditujukan tidak hanya memelihara *public buseness*, melainkan mengusahakan terwujudnya kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Dengan terartikulasinya kepentingan ekonomi dalam kekuasaan politik, maka turut mengalihkan negara dari yang semula *laissez-faire* menjadi *social service*. Artinya nasionalisme sosial (*national socialism*) ini memaksa suatu transisi yang seimbang antara fungsi negara dalam lapangan politik dan ekonomi.

Penyatuan aspirasi politik dan kebutuhan ekonomi tersebut pada prinsipnya ditujukan supaya kekuasaan negara memiliki loyalitas dari massa. Semakin besar loyalitas massa, maka industri negara dapat dengan mudah bersaing dengan negara lain. Meski demikian, dampak dari nasionalisme yang didukung oleh kepentingan massa ini kadang melebih-lebihkan kepentingan bangsa sendiri, sehingga kerap melampaui batas teritorial dalam mencari sumber daya yang bisa memuaskan kebutuhan dalam negeri. Oleh karenanya, Suhartoyo Hardjosatoto (1985) memaknai nasionalisme periode ketiga ini sebagai nasionalisme congkak yang mengakibatkan dua edisi perang dunia.

Hans Kohn (1984) menelisik, paska edisi perang dunia, nasionalisme kurang diminati di wilayah Eropa. Nasionalisme mulai digantikan dengan spirit kerja sama antar negara – lebih tepatnya supranegara. Uni Eropa Barat dan Masyarakat Atlantik secara cepat dianggap menjadi harapan perdamaian dan dinilai mampu menjamin kemerdekaan manusia. Berbarengan dengan timbulnya semangat lintas

negara tersebut, di Eropa Timur sebagai akibat dari pertarungan sistem ekonomi dan politik dengan Eropa Barat, justru semangat nasionalisme semakin solid dan kuat diindoktrinasikan oleh para pemimpin partai komunis. Nasionalisme di sana menjalar ke lapisan masyarakat, dan menggiring mereka menuju masyarakat yang tertutup, di mana kebebasan individu harus tunduk di bawah kepentingan nasional.

B. Nasionalisme Amerika

Benedict Anderson dalam artikelnya berjudul *Creole Pioneers of Nationalism* (1994) menjelaskan, bahwa “Liberalism and the Enlightenment clearly had a powerful impact, above all in providing an arsenal of ideological criticisms of imperial and *anciens regimes*.” (Semangat Liberalisme dan Pencerahan jelas memiliki dampak yang kuat, terutama dalam menyediakan gudang kritik ideologis terhadap rezim imperial dan rezim kuno). Dua spirit itulah yang kemudian membentuk semacam *imagined community* untuk menyelenggarakan aktivitas politik sebagai satu kesatuan.

Pernyataan Anderson di atas menjadi pembuka yang tepat dalam konteks perkembangan nasionalisme yang terjadi di wilayah Amerika. Dalam sesi ini, suguhan pembahasan akan dibagi menjadi dua objek kajian, yakni Amerika Latin dan Amerika Serikat. Sebagaimana dalam buku yang dieditori oleh John Hutchinson dan Anthony D. Smith (1994), terdapat fakta historis yang menegaskan, bahwa sejarah kemunculan nasionalisme – baik dalam bentuk ideologi ataupun wacana – berawal di Amerika Utara dan Eropa Barat pada pertengahan abad ke-19, dan setelah itu – dalam waktu yang singkat – menyebar ke Amerika Latin.

C. Amerika Serikat

Pada awal abad ke 18, Amerika merupakan wilayah yang masih berada di bawah jajahan Kerajaan Britania. Keluasan alam dan potensi kewilayahan Amerika menjadi alasan utama bagi Inggris untuk melakukan politik sumber daya alam dan hegemoni di sana. Guna melancarkan aktivitas penjajahannya, Inggris membentuk koloni-koloni yang terdiri dari tiga belas wilayah. Wilayah administratif yang baru ini banyak dipengaruhi oleh cara berpikir, bersikap, dan bertindak khas Inggris, terutama mengenai semangat liberalismenya. Oleh sebab Inggris kala itu telah memulai era industrial, maka ketiga belas koloni itu pun mengalami pembangunan terpadu yang sangat pesat.

Tiga belas koloni tersebut yang sudah banyak mendapat ilham tentang kebebasan dan kedaulatan dari pemikir-pemikir Inggris selanjutnya mulai sadar akan konsep kemerdekaan sebagai manusia. Hal demikian mendapat momentum manakala pihak Inggris menerapkan politik perpajakan yang dinilai merugikan ketiga belas koloni. Kebijakan Inggris ditentang secara tegas, sehingga menimbulkan perang yang berlarut-larut. Peristiwa yang dikenal dengan nama “Revolusi Amerika” (1775-1783) tersebut menghasilkan suatu deklarasi yang menegaskan, bahwa ketiga belas koloni di Amerika mulai 1776 merupakan negara bebas dan merdeka.

Setelah pasukan Inggris berhasil diusir oleh ketiga belas koloni yang mendapat bantuan dari Prancis dan Belanda, selanjutnya mereka membuat konsolidasi sebagai satu kesatuan yang bernama Amerika Serikat.

Kelahiran bangsa yang baru ini oleh Hans Kohn (1984) diceritakan sebagai berikut:

“Ia dilahirkan dalam suatu usaha bersama, dalam suatu perjuangan untuk mendapatkan hak-hak politik, kemerdekaan perseorangan dan toleransi,... Adanya pelbagai aliran agama dan toleransi dalam hidup keagamaan di Amerika abad kedelapan belas yang tiada taranya dalam zaman itu, ditandingi oleh aneka warna dan toleransi mengenai asal-usul kejenisbangsaan dalam periuk acuan.”

Dalam proses revolusi tersebut, Amerika Serikat sukses membuat konstitusi tertua yang menegaskan kesamarataan hak antar manusia, meliputi hak hidup, hak akan kemerdekaan, dan hak untuk menuntut kebahagiaan. Meski sempat terlibat dalam “Perang Saudara” antara wilayah Utara yang berbasis pada kekuatan industrial dan Selatan yang masih diilhami struktur dan aktivitas feodal, namun Amerika Serikat berhasil mempertahankan cita nasional berdasarkan kemerdekaan liberal dan toleransi, serta sukses menyatu-padukan berjuta-juta imigran yang berasal dari bermacam-macam kebangsaan dan keagamaan (Hans Kohn, 1984).

Meski demikian seiring berjalannya waktu yang berlangsung sampai sekarang, Amerika Serikat mengalami problem akut tentang nasionalisme dan imigran. Walker Connor lewat tulisannya berjudul *Homelands in a World of States* (2001) menjelaskan problem tanah air di Amerika Serikat tersebut seperti berikut :

“As we are all aware, the United States – that immigrant state par-excellence – is certainly not free of ethnic problems. But, as in the case of uni-homeland states, it is equal rights and opportunities, not questions of autonomy or separatism, that dominate minority-majority relations there. Questions concerning autonomy arise within the United States only in relation to its relatively few homeland peoples: those

Amerindian peoples who have elected to remain on 'reserved' Indian lands and those Eskimos or Inuit in settled communities within Alaska.” (Seperti kita ketahui bersama, Amerika Serikat - negara yang memiliki keunggulan parsial - tentu saja tidak bebas dari masalah etnis. Tetapi, seperti dalam kasus negara-negara kesatuan, hak dan peluang yang sama, bukan masalah otonomi atau separatisme, yang mendominasi hubungan mayoritas-minoritas di sana. Pertanyaan-pertanyaan mengenai otonomi muncul di Amerika Serikat hanya dalam kaitannya dengan orang-orang kampung halamannya yang relatif sedikit: orang-orang Amerindian yang telah memilih untuk tetap di tanah India yang 'dilindungi undang-undang' dan orang-orang Eskimo atau orang Inuit dalam komunitas yang menetap di Alaska).

Fakta di atas apabila ditarik ke ranah implementatif memiliki dampak problematis pada kebijakan migrasi. Terlebih saat menjelang pesta demokrasi elektoral, isu migrasi sering kali menjadi perdebatan publik antara dua partai besar yang berkompetisi di sana (Partai Demokrat dan Partai Republik), seperti yang terjadi saat Pemilu Amerika tahun 2018 yang lalu. Terlepas dari perdebatan antara apakah imigran yang datang di Amerika menjadi faktor utama kemelaratan ekonomi atau justru mereka menambah defisit negara, perlu dipahami bahwa kajian tentang imigrasi dan nasionalisme harus dibaca secara lebih mendalam sebagai problem tanah air. Oleh sebab itu, pertanyaan yang muncul kemudian bukanlah berkisar pada aktivitas ekonomi negara dan warganya, melainkan bagaimana *nation-building* yang menyangkut para imigran itu dijalankan oleh negara.

Kemudian, apa yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah mengenai representasi bahasa atau linguistik yang berbeda antara aksen Amerika dengan British, meski pada dasarnya Amerika pun berbahasa Inggris sebagai konsekuensi dari bekas imperium British. Elie Kedourie dalam *Nationalism and Self-Determination* (1994) menjelaskan:

A British or an American nationalist would have to define the British or the American nation in terms of language, race, or religion, to require that all those who conform to the definition should belong to the British or American state, that all those who do not, should cease so to belong, and to demand that all British and American citizens should merge their will in the will of the community. (Seorang Inggris atau seorang nasionalis Amerika harus mendefinisikan Inggris atau negara Amerika dalam hal bahasa, ras, atau agama, supaya menetapkan, bahwa siapa saja orang yang merasa sesuai dengan definisi tersebut memilih bergabung ke dalam negara Inggris atau Amerika, sedangkan semua orang yang tidak masuk ke dalam definisi yang telah ditetapkan, berhenti (keluar dari) menjadi milik keduanya, serta menuntut agar semua warga negara Inggris dan Amerika supaya menggabungkan kehendak mereka dalam kehendak komunitas).

D. Amerika Latin

Pada saat Spanyol menguasai wilayah Amerika Tengah dan sebagian Amerika Selatan, terjadi proses administrasi yang rumit. Setiap kegiatan yang berlangsung harus mendapat restu dari penguasa-penguasa yang berjenjang, mulai dari tingkat kota kecil, kota besar, sampai ke Madrid, dan kembali ke Amerika lagi. Hal tersebut menjadi rutinitas wajib, sebab mengikuti peraturan khas monarki absolut khas Spanyol.

Proses demikian oleh Benedict Anderson (1994) membentuk semacam “lintasan perjalanan” (*journey*) yang memungkinkan tumbuhnya suatu *sense of ‘nationally attached’* (rasa ‘terikat secara nasional’) dan *experience of interchangeability* (pengalaman kesalingbertukaran) antara individu dengan individu yang dipertemukan dan saling berinteraksi selama melakukan *journey*.

Perjalanan tersebut juga turut membawa – seperti Benedict Anderson menjelaskan – *enlightenment* (pencerahan) dan *liberalism* (kebebasan) menyebar ke setiap pembicaraan masyarakat setempat. Barangkali dua motivasi tersebut bersumber dari para pejalan yang menyerap perkembangan revolusi dari *print-capitalism* (kapitalisme cetak) lewat selebaran-selebaran ide yang banyak mengkritik monarki absolut.

Praktik birokrasi yang sangat hirarkis dan monopolistik tersebut membuat masyarakat Amerika Latin melancarkan perlawanan-perlawanan untuk menuntut kemerdekaan atas tanah kelahirannya. Apabila dilacak lebih dalam, maka agitator dan pemimpin gerakan perlawanan terhadap penjajah di wilayah Amerika Latin justru berasal dari orang kulit putih (baik Spanyol maupun Portugal di Brasil) yang lahir di tanah Amerika atau yang dalam pelacakan historis berasal dari orang-orang Creole, seperti Simon Bolivar (1783-1830) pahlawan Venezuela yang memiliki darah Spanyol.

Fenomena tersebut memberi pemahaman konseptual tentang corak nasionalisme di Amerika Latin, yakni orang-orang di sana berjuang bukan berdasar pada asal usul nenek moyang, melainkan pada

asal usul tanah kelahiran. Itu berarti, dalam membangun konsolidasi nasional, Amerika Latin mendasarkan dirinya pada transfer kesadaran antar individu maupun kelompok terlepas dari latar belakang karakter yang berasal dari darah nenek moyang, sehingga kecenderungan seperti itu membentuk corak patriotisnya sendiri.

Hal tersebut berkesesuaian dengan definisi tentang nasionalisme dari Liah Greenfeld dalam salah satu artikelnya berjudul *Types of European Nationalism* (1994). Greenfeld mengatakan, bahwa fenomena yang muncul (*emergent phenomenon*) dalam nasionalisme “...is determined not by the character of its elements, but by a certain organizing principle which makes these elements into a unity and imparts to them a special significance.” (...ditentukan bukan oleh karakter elemen-elemennya, tetapi oleh prinsip pengorganisasian tertentu yang membuat elemen-elemen ini menjadi satu kesatuan dan memberikan kepada mereka makna khusus).

E. Nasionalisme Afrika

Perkembangan nasionalisme yang gemerlap di Eropa juga telah sampai di dataran Afrika. Crawford Young (2001) melacak kemunculan nasionalisme di Benua Hitam ini mulai dari abad ke-19. Saat itu, faktor utama yang mendorong kelahiran nasionalisme di saana adalah wacana kebebasan Afrika terutama semangat pembebasan atas perbudakan dan gerakan penghapusan diskriminasi rasial. Selain itu juga terdapat ekses dari penaklukan dan pendudukan kolonial di Afrika.

Selanjutnya, secara periodik, Young menjelaskan, bahwa mula-mula kolonialisme Eropa yang datang di Afrika diikuti dengan pengkaplingan tanah jajahan. Kemudian setelah tanah jajahan berhasil dikuasai, dibentuklah jaringan administrasi kolonial yang bertujuan untuk melancarkan dominasi dan menyalurkan kepentingan ekonomi di sana. Young dalam salah satu artikelnya berjudul *The Colonial Construction of African Nations* (1994) menulis, “*The science of colonial domination required a process of sorting and labelling; early colonial archives are filled with the results of the laborious inquests into local societies earnestly conducted by the first generation of field administrators.*”

Proses pengkaplingan tersebut berakibat pada hilangnya batas-batas teritori kelompok-kelompok etnis yang ada. Secara arogan, pemerintah kolonial mengacu pada daya jangkau penguasaan lahan secara besar-besaran, dan mengabaikan struktur sosial yang sudah mapan. Akibatnya, kelompok etnis yang memiliki karakter serumpun terpecah atau terpisah ke dalam wilayah administratif yang berbeda. Hal tersebut dalam praktiknya saling berkelindan. Misal, dalam satu wilayah yang dikuasai oleh pemerintah kolonial, baik Inggris, Prancis, Belgia atau Portugal, terdapat lebih dari satu etnis berbeda yang mendiami wilayah tersebut.

Dalam pergumulan antar etnis demikian, pemerintah kolonial kerap mempraktikkan ‘politik penganakemasan’. Proses mendistribusikan kewenangan dan kekuasaan itu sering kali melahirkan konflik secara horizontal antara etnis-etnis di dalamnya. Etnis yang dijadikan mesin

propherty yang tersedia. Sedangkan etnis lain yang berada di bawahnya digencet sedemikian rupa. Sehingga terjadilah ketidakmerataan dan dominasi birokrasi kolonial di tataran lokal diberikan kebebasan untuk mengakses satu etnis atas etnis lainnya, seperti yang terjadi di Rwanda antara kelompok Tutsi dan Hutu. Bahkan, dominasi dan subordinasi ini sampai membuat mereka yang dahulu tidak ada perbedaan identitas yang signifikan, baik bahasa maupun budaya, menjadi terbelah dan membuat identitas yang terpisah.

Selain itu, pengklasifikasian ini juga membuat *role model* tentang pembangunan. Geliat pembangunan dan modernisasi yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan membuat etnis yang berdiam di sana lebih dahulu merasakan dampak kemajuan dan pemberdayaan atas politik kolonial. Dengan kata lain, politik “spasialisasi etnis” ini semakin mempertegas jurang pemisah antara etnis yang berkemajuan dan etnis yang terbelakang.

Di samping perubahan administrasi kewilayahan, penguasa kolonial juga melakukan semacam praktik pemecahan wilayah berdasar pada kepentingan misionaris keagamaan. Politik misionaris ini membidik suatu wilayah untuk dijadikan *a territorial partition by congregation* atau semacam basis keagamaan. Para misionaris yang ditempatkan di wilayah-wilayah tersebut, selain menyebarkan agama kristen atau katolik, juga memiliki tugas untuk merubah struktur bahasa atau linguistik masyarakat dan memasukkan unsur serapan bahasa dari bible. Misal di Kongo, *linguistic zone* di sana sangat kentara oleh adanya *mission cogregations* antara wilayah Katolik dan wilayah Protestan.

Keterbelakangan yang dirasakan oleh masyarakat akibat politik kolonial mendapat respon perlawanan dari kelompok yang mengatasnamakan persatuan Afrika atau pan-African. Nasionalisme Afrika (*African nationalism*) menjadi ideologi yang dijadikan sebagai panji perjuangan mereka. Menurut Hodgkin (1956), menjelaskan kelompok beserta orientasi aksi yang mereka lakukan, sebagai berikut :

“...any organization or group that explicitly asserts the rights, claims, and aspirations of a given African society (from the level of the language-group to that of “pan-Africa”) in opposition to European authority, whatever its institutional form and objectives.” (Organisasi atau kelompok mana pun yang secara eksplisit menyatakan hak, klaim, dan aspirasi masyarakat Afrika (dari tingkat kelompok bahasa hingga “pan-Afrika”) yang bertentangan dengan otoritas Eropa, apa pun bentuk dan tujuan kelembagaannya).

Momentum perlawanan tersebut mendapat angin segar setelah berakhirnya Perang Dunia II. Spirit yang mendorong keberanian Afrika untuk melawan penjajah Eropa lebih berdasar pada perlawanan atas kategorisasi yang dibuat oleh penguasa kolonial (*response to the categorization*). Apalagi sejak tahun 1948 saat politik “*apartheid*” mulai menjadi ideologi negara, seperti yang terjadi di Afrika Selatan.

Perlu dipahami, bahwa di setiap wilayah Afrika berdiri banyak kelompok yang berbeda dalam mengindoktrinasi semangat pembebasan atas pendudukan Eropa. Meski demikian kelompok pejuang yang berada di setiap wilayah tersebut memiliki tekad yang sama untuk menentang dominasi penjajah lewat strategi dan taktik masing-masing. Misal, di

sektor keagamaan, orang-orang Libya dan wilayah Sahara lainnya akan menggunakan doktrin keagamaan untuk menentang politik misionaris Eropa. Berbeda lagi dengan yang terjadi di wilayah-wilayah yang didominasi etnis sangat kuat. Dalam proses pembebasan atas kekuasaan kolonial, mereka menggunakan semangat yang bersumber dari tradisi lama, seperti solidaritas dan kolektivitas kekeluargaan.

Pada tahun 1963, perlawanan dan tuntutan pembebasan Afrika secara keseluruhan menemukan momentumnya. Lewat pembentukan *Organization of African Unity* (OAU) dan penandatanganan atas perjanjian kesatuan Afrika, nasionalisme Afrika telah menunjukkan keberhasilannya dalam proses dekoloniasasi dan persatuan hampir semua negara merdeka di Afrika.

Problem selanjutnya adalah apakah nasionalisme di Afrika masih perlu dipertahankan. Apabila kembali ke pembicaraan awal, bahwa motivasi perjuangan Afrika didorong oleh doktrin-doktrin primordial, baik agama maupun etnis, maka nasionalisme di Afrika dimungkinkan masih terbawa isu-isu tribalisme. Crawford Young dalam *Africa: Democratization, Cultural Pluralism, and the Challenge of Political Order* (2000) mencatat, bahwa pada 1950-an, ketika demokratisasi sering membawa persaingan sosial-politik di Afrika, isu pluralisme budaya mengemuka, sebagai akibat tribalisme yang belum selesai.

Oleh karenanya, Benyamin Neuberger dalam artikelnya berjudul *State and Nation in African Thought* (1994) menjelaskan karakter nasionalisme Afrika dengan membuat premis, bahwa nasionalisme di

Afrika banyak dipengaruhi oleh karakter nasionalisme *staatsnation*, yakni ‘negara’ menciptakan (karakter) ‘bangsa’, bukan *kulturnation* di mana ‘bangsa’ yang membentuk ‘negara’. Hal tersebut dapat dipahami sebagai akibat dari warisan politik teritorial yang dipraktikkan oleh penjajah Eropa Barat, di mana negara menggiring etnis-etnis untuk masuk ke dalam wilayah negara dan menaati segala kebijakan pemerintah.

Fakta di atas membawa proyek nasionalisme di Afrika masuk ke dalam dilema. Satu sisi, nasionalisme telah menjadi alat yang terbukti ampuh memunculkan spirit kepahlawanan. Namun di sisi lain, paska dekolonisasi, nasionalisme juga sering terjerembab ke dalam tribalisme akut. Jalan keluar dari itu semua, sebagaimana Neuberger menulis, adalah kampanye *nation-building* oleh negara harus dilakukan secara massif sesuai dengan visi, desain, dan target pemerintah untuk mewujudkan semboyan “Tribe Yes. Tribalism No.”

Untuk sebab itulah, Kenneth Kaunda David, Presiden pertama Zambia yang menjabat mulai dari tahun 1964-1991, menegaskan, "*Our aim has been to create genuine nations from the sprawling artifacts the colonialists carved out.*" (Tujuan kami adalah menciptakan negara-negara asli dari artefak-artefak luas yang diukir oleh penjajah). Suatu perkataan yang mempertegas karakter “from state to nation”.

F. Nasionalisme Asia

Merunut pada periode sejarah Asia, semula kolonialisme yang diusung oleh aktivitas penjelajahan Eropa Barat berfokus pada soal

perdagangan. Mereka mengusung suatu misi penumpukan kapital yang didapat dari barang-barang milik penduduk pribumi untuk mendapat untung yang sebesar-besarnya. Pedagang-pedagang pribumi juga dipaksa untuk menaati sistem perdagangan yang diterapkan oleh mereka. Sehingga terciptalah monopoli pasar yang dijalankan oleh sistem kolonial. Setelah aktivitas ekonomi sudah berhasil dikuasai, maka selanjutnya mereka berupaya untuk menaklukkan lapangan politik. Sebab sesuai dengan doktrin kolonial, ekonomi dan politik merupakan dua hal yang saling *collateral*.

Penguasa-penguasa setempat ditekan sedemikian rupa dengan cara memperketat *supply* barang hasil pribumi. Tanpa pendapatan yang bisa menopang kekuatan kerajaan membuat raja-raja berhasil dijinakkan oleh penguasa kolonial. Setelah eksploitasi ekonomi dan dominasi politik sukses dijalankan, langkah selanjutnya adalah menginfiltrasi masyarakat pribumi dengan nilai-nilai kebudayaan khas Eropa Barat. Penetrasi kebudayaan ini dilakukan secara sistematis dan eufemis, sehingga masyarakat umum tidak menyadari terhadap proses penggantian kebudayaan lama oleh kebudayaan baru.

Akibat dari kolonialisme ini ialah hampir semua negara-negara Asia pada abad ke-18 dan ke-19 kehilangan kedaulatan politik, kebebasan perekonomian, dan karakter kebudayaan asli (*indigenous*). Keadaan yang sangat menyengsarakan ini sejak semula sudah menimbulkan reaksi dari penduduk pribumi, tetapi belum terkonsolidasi dengan baik. Namun seiring dengan kemelaratan yang

semakin terasa, gelombang perlawanan mulai menampakkan resistensi terang-terangan dalam skala besar. Reaksi demikianlah yang dinamakan nasionalisme yang mulai bergelora pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20.

Dalam masa perlawanan, kaum feodal Asia merupakan elemen yang menentang pertama kali praktik-praktik monopolistik Eropa. Kemudian setelah kaum feodal berhasil dijinakkan, muncul para cendekiawan yang mampu menggerakkan massa rakyat agar bangkit menentang dominasi kolonial di bumi Asia. Menurut Arnold Toynbee (1889-1975), dari proses perlawanan Asia terhadap Eropa tersebut dapat ditemukan dua macam tipologi, yakni:

Pertama, *zelotisme*, yaitu suatu cara menentang dengan menolak segala pengaruh strategi dan taktik dari Barat, dan sambil mengisolasi dirinya guna merefleksikan kekuatannya sendiri, seperti gerakan *Swadeshi* dari Mahatma Gandhi. *Kedua*, *herodianisme*, yaitu suatu cara menentang dengan meniru strategi dan taktik Barat, dan menggunakan pengaruh Barat tersebut untuk memperkuat dirinya, seperti gerakan Mohamad Abduh di Mesir. Meski demikian, Roeslan Abdulgani memberi satu lagi tipologi perlawanan yang secara umum justru ditempuh oleh wilayah-wilayah Asia, yakni *synthese* antara dua cara tersebut. Roeslan bahkan menyebut, bahwa cara perlawanan yang mengambil jalan tengah demikian merupakan ciri kuat dari nasionalisme Asia secara umum antara tahun 1939-1945. Lantas, apakah nasionalisme Asia itu?

Dari sekian banyak definisi mengenai nasionalisme, pandangan tentang *wills-nation-theory* yang mengatakan bahwa nasionalisme

merupakan suatu jiwa, suatu pendirian rohani, dan suatu perasaan setia-kawan yang agung (Renan, 1823-1892), menjadi definisi yang cocok untuk menggambarkan nasionalisme Asia. Teori kemauan yang didominasi oleh pandangan psikologis tersebut memandang nasionalisme tidak sebagai suatu hal yang logis dan lumrah, melainkan suatu hal yang perlu ditanam dan dipupuk. Adapun mengenai cara menanam dan memupuk nasionalisme, setiap pemimpin di masing-masing wilayah memiliki strategi dan taktik yang berbeda.

Roeslan Abdulgani mencatat ada tiga aspek nasionalisme Asia yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya sebab merupakan karakter kewilayahan, sebagai berikut:

Pertama, aspek politis yang bersifat menumbangkan dominasi politik bangsa asing yang menjajah; *kedua*, aspek sosial-ekonomis yang bersifat menghentikan eksploitasi ekonomi asing dan membangunkan suatu masyarakat baru bebas dari kemelaratan dan kesengsaraan sesuai dengan cita-cita keadilan sosial; *ketiga*, aspek kultural yang bersifat menghidupkan kembali kepribadiannya yang disesuaikan dengan perubahan zaman.

Dengan ketiga aspek di atas, maka nasionalisme Asia memiliki hakikat perjuangan yang menghimpun kekuatan destruktif dan juga konstruktif. Destruktif di sini dapat dilihat dari motif nasionalisme Asia yang sedianya dimaksudkan untuk menghancurkan kolonialisme asing sekaligus menentang feodalisme yang dijalankan oleh pribumi tingkat atas sebagai kaki tangan kolonialisme.

Sedangkan karakter konstruktifnya senyata-nyatanya dapat disaksikan dari keluhuran tujuan nasionalisme Asia, yakni membangun negara nasional yang demokratis dengan berisikan suatu masyarakat sosialis atau berkeadilan sosial. Tidak hanya itu, nasionalisme Asia juga bertujuan hendak menyelamatkan kebudayaannya sendiri yang bersejarah itu dengan cara mempertahankan nilai kebudayaan lama yang baik dan mengambil nilai kebudayaan baru yang konstruktif – semacam *synthese*.

Sisi lain yang membuat nasionalisme Asia memiliki unsur pembeda dengan nasionalisme di wilayah-wilayah lain, yakni terdapat proses penggalian spirit yang dipengaruhi oleh tiga hal. *Pertama*, akar nostalgis kejayaan masa lalu. Cerita-cerita tentang Kerajaan Majapahit di Asia Tenggara, Kerajaan Akbar di India, dan lain-lain boleh dikatakan sebagai suatu impian ke alam yang sudah silam. Tetapi secara faktual, tidak dapat dimungkiri, bahwa cerita nostalgis tersebut memiliki peran spiritual yang dapat memberi *impuls* ketekadan berjuang sebagai bangsa yang memiliki sejarah besar.

Kedua, akar peradaban dan keagamaan. Dalam hal ini, Roeslan Abdulgani melempar pertanyaan yang mewakili rasionalisasi akar peradaban dan keagamaan sebagai berikut: bukankah Agama Kristen, Islam, Hindu, serta pelajaran-pelajaran Budha, Konfucius, dan lain sebagainya lahir di bumi Asia? Dan bukankah bumi Asia sejak dahulu kala menjadi wilayah yang pertama kalinya mampu melahirkan orang-orang yang berhasil mendapatkan kertas, mesiu, buku, serta

pelajaran-pelajaran tentang astronomi, aljabar, filsafat, dan lain sebagainya di waktu Eropa masih dalam kabut kegelapan?. Dengan demikian, akar daripada yang kedua ini berupaya kuat untuk memberi pemahaman secara kognitif agar bangsa Asia tidak merasa inferior terhadap kebudayaannya sendiri dan silau dengan kebudayaan Eropa, melainkan harus mampu melakukan seleksi ketat terhadap semua kebudayaan sehingga mampu menghasilkan peradaban Asia yang kaya.

Ketiga, akar geografis. Benua Asia merupakan benua besar yang di dalamnya melintas gunung-gunung tinggi dan sungai-sungai besar. Struktur tanahnya sangat membuaikan: subur dan makmur. Luas tanahnya dan jumlah penduduknya merupakan yang terbesar di belahan dunia manapun. Asia mampu menghasilkan 90% bahan-bahan mentah yang bisa diolah menjadi sumber energi kehidupan. Dengan demikian maka tidak heran apabila bangsa Asia bergejolak saat Eropa yang hanya sekadar semenanjung saja – meminjam bahasa Prof. Romein – melakukan aktivitas imperialisme dan kolonialisme di wilayah yang terdiri dari 49 negara tersebut.

Spirit-spirit yang bersumber dari penggalian terhadap nilai-nilai kewilayahan berupa sejarah, ajaran, dan kekayaan alam tersebut berhasil mengumpulkan kekuatan dan tekad perjuangan yang besar, sehingga nasionalisme Asia berhasil mengungguli dominasi kolonial. Lantas, bagaimana nasib nasionalisme Asia setelah berhasil mengusir penjajah dan melahirkan negara-negara nasional baru? Roeslan Abdulgani menjawab pertanyaan tersebut dengan menegaskan, bahwa

nasionalisme Asia dicirikan sebagai nasionalisme yang mengusung cita demokratis dalam arena politik-kenegaraan; dan sosialis dalam urusan sosial-ekonomis. Nasionalisme bukan saja terfokus pada persoalan perlawanan terhadap kolonialisme yang merampas wilayah Asia, melainkan nasionalisme juga bisa digunakan untuk memandu sistem negara berjalan, memupuk solidaritas kebangsaan, dan meningkatkan kewaspadaan kaitannya dengan politik luar negeri.

G. Nasionalisme Asia Tenggara

Nasionalisme bangsa-bangsa Asia Tenggara bukanlah produk yang sama sekali baru. Untuk memahami keberadaan nasionalisme yang telah lama eksis di Asia Tenggara perlu kiranya merunut akar makna nasionalisme terlebih dahulu. Apabila gerak nasionalisme sebagai wujud dari kesadaran bangsa-bangsa terjajah dimulai dari penentangan terhadap kekuasaan feodal, maka gerakan-gerakan gerilya yang dilakukan oleh bangsa Kamboja, Birma, dan Vietnam untuk melawan dominasi Mongol bisa disebut sebagai nasionalisme pramodern. Barulah setelah bangsa Eropa melakukan aktivitas kolonial dengan cara membongkar kebudayaan-kebudayaan lokal; mengganti sistem perdagangan; dan menguasai lapangan pemerintahan di wilayah jajahan; serta memperkenalkan ilmu pengetahuan yang diklaim sebagai 'modern', nasionalisme menjadi bahan yang dikenal formatnya sejak abad XX sampai sekarang.

Meski nasionalisme modern dianggap menjadi tolok ukur tentang apakah suatu gerakan bisa dikatakan berunsur nasionalis atau tidak,

namun spirit nasionalisme modern di Asia Tenggara justru bersumber pada penggalian yang matang terhadap artefak-artefak kejayaan masa lalu. Bisa dikatakan semua bangsa di Asia Tenggara memiliki rasa nasionalisme untuk mengusir bangsa agresor Eropa justru sebab suatu ajaran dan spirit 'lama'. Singkatnya, semua wilayah di Asia Tenggara memiliki persamaan sifat dan karakter nasionalisme, yakni berakar kuat dalam kebudayaan dan sejarah wilayah. Sedangkan perbedaannya hanyalah soal intensitas dan ajaran yang digunakan sebagai pijakan di masing-masing wilayah saja.

Nasionalisme Myanmar sangat kentara sekali dipengaruhi oleh filsafat egalitarian yang bersumber dari ajaran Budha Theravada yang bersifat mempersatukan. Di Malaysia, nasionalisme terejawentahkan dalam bentuk persekutuan antara kaum terpelajar dalam UMNO (*The United Malay National Organization*) dengan kaum elite bangsawan yang berdiri sebagai simbol kebudayaan. Sedangkan nasionalisme Indonesia memiliki identitas kebudayaan campuran yang saling melengkapi antara Jawa, Melayu, India, Belanda, dan Islam (Roeslan Abdulgani, 1995).

Corak yang berbeda hanya ditemukan di Thailand. Di sana sebab tidak adanya suatu bentuk penjajahan, maka nasionalisme Thailand dikategorikan sebatas penyangga (*buffer state*). Penyangga dalam arti ini tidak berarti Thailand sama sekali sepi dari kepribadian nasionalis, hanya saja Thailand menempuh sejarah yang berbeda namun sejatinya sama, yakni melawan kekuasaan feodal yang memeras rakyat. Dengan dipimpin oleh pegawai dan kaum intelektual, Thailand berhasil mengubah sistem

kerajaan menjadi monarki parlementer gaya Barat, sebab meng-imitasi terhadap negara Prancis.

Selain daripada penggalian terhadap khazanah lokal berupa artefak-artefak wilayah, ajaran-ajaran agama juga memainkan peran yang tidak dapat dimungkiri memiliki dampak progresif bagi nasionalisme Asia Tenggara. Fred R. Van Der Mehden (1968) mengatakan, “Asia Tenggara abad ke-20 merupakan sebuah laboratorium yang sangat baik di mana hubungan agama dan politik dapat dikaji melalui perubahan latar belakang politik dan sosial.” Secara implementatif, bangsa-bangsa Asia Tenggara menyadari dan memahami, bahwa ajaran agama yang mereka anut sangat menentang keras suatu bentuk kolonialisme dan imperialisme.

Oleh karena itu, nasionalisme mempunyai pengertian tidak hanya sekadar suatu kebangkitan yang sederhana dari rakyat untuk melawan dominasi penjajah di semua lapangan kehidupan. Nasionalisme lebih daripada sekadar makna loyalitas kebangsaan. Nasionalisme bagi kebanyakan pemimpin dan rakyat Asia Tenggara merupakan ramuan atau *imprint* (cap) spirit yang menggabungkan suatu kepercayaan dan keyakinan dalam satu tarikan nafas.

Nasionalisme Lintas Regional

Semenjak Perang Dunia II, bangsa-bangsa di Asia Tenggara mulai menunjukkan kekuatan yang sebenar-benarnya. Di seluruh kawasan bermunculan gerakan-gerakan nasionalis yang termanifestasikan lewat peperangan melawan bangsa kolonial. Apa yang menarik dalam proses ini adalah tampilnya Jepang sebagai pelantara yang mampu mengantarkan negara-negara di berbagai

wilayah Asia Tenggara menuju keprofesional strategi dan taktik pergerakan nasional. Meski bagaimanapun Jepang juga terlibat dalam praktik penjajahan, tetapi gaya politik dan ekonomi yang diterapkan oleh Jepang telah meninggalkan bekas yang sangat berguna. Tercatat dari tahun 1945-1984 sebanyak sembilan negara di kawasan Asia Tenggara dapat memproklamkan kemerdekaannya dari cengkeraman penjajah, di mana prosesnya melalui fase jeda yang diisi oleh fasisme Jepang pasca memenangkan Perang Pasifik (1942-1945).¹

Namun seiring tumbuh menjamurnya negara-negara nasional baru dan berakhirnya zaman kolonialisme, senyatanya bangsa-bangsa Asia Tenggara belum benar-benar terbebas dari Eropa dan Amerika yang menggunakan gaya kolonialisme gaya baru. Dengan demikian praksis Asia Tenggara membutuhkan keamanan ekstra untuk melindungi kedaulatan politik, kebebasan ekonomi, dan keluhuran budaya mereka lewat kerja sama yang solid. Dalam kacamata historis, negara-negara Asia Tenggara merupakan suatu kelompok geografis yang memiliki pengalaman budaya dan asal-usul etnis yang serupa: Melayu. Baik Asia Tenggara daratan (Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Malaysia) ataupun Asia Tenggara kepulauan (Singapura, Filipina, dan Indonesia) melewati suatu fase kolonialisme dan perjuangan nasional yang berdampak positif pada tumbuhnya rasa solidaritas regional.

¹ Kesembilan negara itu adalah Indonesia (1945), Filipina (1946), Myanmar (1948), Kamboja (1954), Laos (1954), Vietnam (1954), Malaysia (1957), dan Singapura (1965).

Terbentuknya ASEAN pada tahun 1967 menjadi penanda paling nyata terhadap suatu iktikad tersebut. Mengaca dari pengalaman ASEAN sebagai bentuk regionalisme yang memiliki relasi kuat dengan nasionalisme negara-negara Asia Tenggara, maka nasionalisme Asia Tenggara telah menunjukkan kesuksesan dalam menjaga perdamaian serta keamanan negara-negara anggota. Untuk alasan tersebut, Deklarasi ASEAN tahun 1967 menetapkan suatu haluan, bahwa kelima negara anggota (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand) bertekad untuk menjamin stabilitas dan keamanan mereka dari campur tangan luar dalam bentuk dan manifestasi apa saja, serta memiliki tujuan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara melalui usaha bersama yang terilhami dari semangat persamaan, baik hak maupun kemitraan.

Pertautan antara nasionalisme dan regionalisme di Asia Tenggara tersebut disebut oleh Dr. Burhan Magenda (1984) sebagai bentuk dan realitas konsolidasi kerja sama regional yang sudah mapan melampaui realitas di wilayah-wilayah lain. Apabila di Asia Tenggara terdapat penyelesaian yang lebih *soft* lewat musyawarah terpadu, maka berbeda halnya dengan yang terjadi dengan Timur Tengah yang berkecamuk oleh sebab pertikaian antara Irak dan Iran; di Afrika Timur antara Somalia dengan Ethiopia; Asia Selatan melalui konflik sosial antara India dan Pakistan; dan lain-lain.

Bab II

Kondisi Politik Kolonial Di Hindia Belanda

A. Perkembangan Hindia Belanda Hingga Awal Abad ke-20

1. Perubahan Sosial Politik di Hindia Belanda

Perubahan politik besar terjadi di Hindia Belanda memasuki abad ke-19 dengan bubarnya perusahaan dagang hindia timur yaitu *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) pada tanggal 31 Desember 1799. Banyak hal yang menyebabkan bubarnya VOC, di antaranya adalah kualitas mutu pegawai yang merosot, pengeluaran yang sangat besar dan manajemen yang buruk dalam mengelola VOC. Setelah VOC runtuh, pemerintah kerajaan Belanda mengambil alih seluruh wilayah kekuasaannya, terutama wilayah Jawa yang ibukotanya Batavia. Hindia Belanda merupakan wilayah koloni Belanda, baik secara *de jure* maupun *de facto*. Kepala negara Hindia Belanda adalah Ratu atau Raja Belanda dengan seorang Gubernur-Jendral sebagai perwakilannya yang berkuasa penuh. Hindia Belanda juga merupakan wilayah yang tertulis dalam Undang-undang Kerajaan Belanda tahun 1814 sebagai wilayah berdaulat Kerajaan Belanda, diamendemen tahun 1848, 1872, dan 1922 menurut perkembangan wilayah Hindia Belanda. Wilhem Herman Daeldels merupakan tokoh kolonial yang bertugas menyelamatkan Jawa dari masuknya Inggris dan mengendalikan wilayah administrasi di tanah koloni dengan meniru model pemerintah Perancis. Deandels pun mengembangkan dan

membangun infrastruktur di Jawa dengan tangan besinya. Ia membangun jalan penghubung dari Anyer sampai Panarukan yang kemudian dikenal dengan Jalan Raya Pos Daendels.

Pada perkembangan masa selanjutnya, di Jawa terjadi perang Diponegoro (1825-1830) yang mengakibatkan keadaan keuangan jajahan menjadi kosong. Sementara itu, sumber pemasukan negara kolonial tidak memberikan sumbangsih yang dapat mengatasi kemerosotan tersebut. Sistem sewa tanah dan penyerahan hasil tanaman (*leverantie*) tidak memberikan pemasukan yang pasti dan jumlahnya tidak berarti. Peayaran dan perdagangan kapal-kapal Belanda juga tidak menentu karena jaringan VOC yang dibangun sebelumnya tidak kunjung pulih dan perusahaan dagang Inggris seperti EIC sedang kuat-kuatnya. Sementara itu, di antara para elite politik di negeri Belanda terjadi perdebatan bagaimana cara mengisi keuangan negeri jajahan yang kosong. Hal ini pun menjadi perhatian serius bagi raja Belanda saat itu, Willem II.²

Kebijakan kolonial Belanda di Hindia Belanda, lebih khususya di Jawa memang mengalami berbagai peninjauan ulang selama periode 1920-an. Gubernur Jenderal Van der Capellen telah menerapkan suatu kebijakan yang menjamin orang Jawa untuk menggunakan serta memetik hasil dari tanah mereka secara bebas. Sebaliknya, orang Jawa itu justru harus membayar sewa tanah. Kebijakan era Van der Capellen

² Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V, Zaman Kebangkitan nasional dan Masa Hindia Belanda* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 2-3.

berusaha mengurangi pengaruh dan peran orang eropa di Jawa, sehingga orang jawa terdorong untuk menghasilkan produk yang dapat dijual untuk membayar sewa tanah. Kebijakan ini menemui kegagalan setelah tahun 1925 karena sejumlah alasan, dan yang terpenting di antara alasan tersebut adalah pengeluaran besar dari pemerintah kolonial Belanda akibat perang Jawa.³

Pada tahun-tahun selanjutnya, pemerintah kolonial Belanda memiliki pandangan bahwa orang di Jawa dan lahan produktif harus dikelola dengan kegiatan produktif melalui perjanjian kontrak dengan orang Eropa. Van den Bosch pada tanggal 6 Maret 1829 menyodorkan usulan yang kemudian membuatkebijakan sewa tanah ditinggalkan dan diganti dengan sistem penanaman hasil bumi yang cocok bagi pasar Eropa yang dikenal dengan nama sistem tanam paksa. Semenjak pelaksanaan kebijakan tanam paksa di Hindia Belanda, bermunculan berbagai macam perspektif terhadap pelaksanaannya.

Hal ini menandakan bahwa Van den Bosch ingi menjadikan Jawa sebagai aset yang menguntungkan dalam waktu yang sesingkat mungkin dengan menghasilkan komoditas pertanian tropis seperti kopi, gula, nila (indigo) dengan harga murah sehingga dapat bersaing dengan produk serupa dari belahan dunia lainnya. Demi tujuan tersebut, Van den Bosch menyarankan sistem tanam paksa yang menurutnya sesuai dengan kultur orang Jawa, yang didasarkan atas penanaman dan penyerahan hasil bumi secara paksa pada pemerintah. Ia pun mendapatkan mandate dari rajauntuk membangun sistem yang dibangunnya itu.⁴

³ Robert van Niel, *Sistem Tanam Paksa di Jawa* (Jakarta: LP3ES, 3003), hlm. 4-5.

⁴ *Ibid.*, hlm 6.

Selama penerapan sistem tanam paksa, kehidupan pedesaan di pulau Jawa mengalami perubahan, sejumlah kebijakan baru diperkenalkan dan diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tanah milik pemerintah kolonial tidak digarap. Penduduk pedesaan yang para petani diperkenalkan dengan tanaman yang memiliki nilai ekspor yang pola penanamannya ada yang sama dan ada yang beda dalam proses penggarapannya. Pemerintah kolonial Belanda juga memperkenalkan penggunaan uang sebagai alat tukar dan alat untuk membayar. Para bupati dan jajaran di bawahnya menjadi penentu pelaksanaan sistem tanam paksa dengan memberikan jaminan pengerahan tenaga kerja dan hasil dari penanaman komoditi yang telah ditentukan. Sistem ini dijalankan dengan penerapan pemberian insentif dan pengenaan saknsi atau hukuman. Dalam bidang politik dan pemerintahan, daerah di Jawa diterapkan reorganisasi dalam suatu struktur birokrasi. Jajaran tertinggi di tanah jajahan adalah seorang Gubernur Jenderal yang dibantu oleh Dewan Hindia (*Raad van indie*) sebagai penasihatbeserta departemen-departemennya. Selanjutnya, wilaya jajahan dibagi atas pembagian wilayah provinsi dan residen-residen. Para residen pada proses pelaksanaan pemerintahan dibantu oleh wakil residen, membawahi seorang *kontroleuri* (kontrolir) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan sistem tanam paksa.⁵

Bagi para akademis yang beraliran liberal seperti Pierson, maupun van Soest memiliki pandangan bahwa sistem tanam paksa ini

⁵ Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *op. cit.*, hlm. 3-4.

telah menimbulkan banyak kesengsaraan bagi masyarakat Hindia Belanda. Muncul kesimpulan dalam penerapan sistem tanam paksa ini terjadi eksploitasi penjajah Belanda di tanah koloninya. Menurut C. Fasseur dalam buku *Kultuurstelsel en Koloniale Banten*, sistem tanam paksa merupakan eksploitasi Belanda di Jawa selama periode 1840-1860. Hal inilah yang pada akhirnya memunculkan pandangan bahwa Belanda mencoba mengambil laba besar dan tanam paksa adalah sebuah penghisapan yang menciptakan kesengsaraan bagi kaum tani, khususnya petani di Jawa. Clifford Geertz dalam buku *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*, menegaskan bahwa eksploitasi kolonial melalui system tanam paksa di Jawa telah menimbulkan involusi pertanian yang pada akhirnya menciptakan kemiskinan petani Jawa. Budidaya tanaman tebu kolonial memberikan dampak perubahan sosial dan ekonomi sangat mencolok.⁶ Pelaksanaan sistem tanam paksa di Hindia Belanda abah ke-19 dalam kajian ekonomi telah mengeksploitasi habis-habisan system ekonomi subsisten yang menjadi basis utama ekonomi petani di Jawa. Eksploitasi tersebut mengakibatkan kemiskinan dan kelaparan yang berimplikasi pada hancurnya struktur sosial dan ekonomi petani.

⁶ Suyatno Kartodirdjo, "Relevansi Studi Tanam Paksa Bagi Sejarah Ekonomi Indonesia", pengantar dalam: Robert van Niel, *Sistem Tanam Paksa di Jawa* (Jakarta: LP3ES, 3003), hlm. vii-ix.

B. Gagasan Baru Negeri Kolonial

Proses kolonialisasi di negeri jajahan perlu mendapatkan jaminan kondisi yang stabil. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan baru dengan terus menjaga keberlangsungan terkait pekerja, investasi yang terus menghasilkan keuntungan serta pembangunan infrastruktur yang memadai seperti jalur jalan laut dan darat terutama jalur kereta api dan jalan raya, pembuatan sekolah, saluran air serta jaringan telekomunikasi di Hindia Belanda.

Politik kolonial memiliki tujuan untuk menguasai daerah-daerah produksi bahan-bahan mentah bagi kepentingan modal, baik dari Belanda maupun dari negara-negara besar lainnya yang tidak lagi bisa ditolak di Hindia Belanda. Modal perdagangan mempunyai tujuan yang berbeda dengan modal perusahaan yaitu memperkuat daya beli dalam sebuah pasar. Politik “pintu terbuka” memberikan kesempatan negara-negara besar seperti Inggris, Amerika dan negara Eropa lainnya menanamkan modalnya di Indonesia serta mendapatkan sekutu yang kuat. Gagasan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat di negeri jajahan menimbulkan berbagai macam tanggapan antara bagaimana emansipasi masyarakat pribumi yang sementara waktu tidak membahayakan kedudukan kaum penjajah dan pemodal. Politik etis merupakan jalan tengah untuk mendamaikan gerakan emansipasi dengan kepentingan kaum pemodal.⁷

⁷ Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *op. cit.*, hlm. 20-21.

C. Kebijakan Politik Etis 1901

Politik etis merupakan politik yang diperjuangkan untuk mengadakan desentralisasi, kesejahteraan rakyat serta efisiensi (di daerah jajahan). Politik etis (politik balas budi) muncul pada tahun 1890 atas desakan golongan liberal dalam parlemen Belanda. Para golongan liberal tersebut memiliki haluan yang berbeda disbanding dengan sebelumnya, golongan liberal lebih progressif untuk melancarkan tujuan politiknya yaitu agar pemerintah Belanda memberikan perhatian kepada masyarakat Indonesia yang telah bersusah payah mengisi keuangan negara

Garis politik kolonial pertama diucapkan oleh van Dedem sebagai anggota parlemen. Ia mengemukakan gagasan dalam pidatonya tahun 1891 yang intinya adalah memisahkan keuangan Indonesia dari negeri induk kolonial Belanda. Ia juga mengajukan gagasan bahwa kemajuan rakyat yang di antaranya adalah membuat bangunan umum untuk masyarakat, desentralisasi kesejahteraan masyarakat dan ekspansi yang pada umumnya menuju ke suatu politik yang konstruktif untuk negeri jajahan Hindia Belanda.⁸ Di awal abad ke-20, golongan sosialis melancarkan kritik terhadap keadaan yang serba merosot di Hindia Belanda. Melalui juru bicaranya, van Kol, kelompok sosialis menyatakan bahwa selama satu abad lebih pemerintah kolonial mengambil keuntungan dari penghasilan rakyat. Akan tetapi, tidak ada imbal balik yang layak bagi rakyat yang telah ikut menyumbangkan penghasilannya.

⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

Perjuangan untuk melancarkan politik kolonial tidak berhenti dan semakin mengalir, pengalaman van Kol selama di Hindia Belanda semakin melancarkan kritiknya terhadap kemerosotan di Hindia Belanda. Dukungan juga diberikan oleh Brooschooft. Ia mengungkapkan bahwa selama satu abad lebih pemerintah kolonial mengambil keuntungan atau bagian dari rakyat dan justru mementingkan prinsip kebebasan terutama untuk memberi kesempatan pengusaha memakai tanah rakyat dan segala peraturan yang dibuat untuk melindungi para pengusaha Belanda sendiri. Hal itu bisa dilihat dalam hak menyewa tanah, undang-undang perburuhan dan pertambangan.⁹ Sementara itu, di sisi lainnya, Van Deventer pada tahun 1899 menulis sebuah artikel dalam majalah *De Gids* tentang hal tersebut dengan judul “Hutang Kehormatan” yang menjelaskan bahwa pemerintah Belanda mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil tanam paksa hingga berjuta-juta gulden. Keuntungan antara tahun 1867 sampai dengan 1878 telah mencapai 187 juta gulden. Hal itu menunjukkan betapa besarnya hutang pemerintah kolonial terhadap rakyat di Hindia Belanda dan itu harus dikembalikan.¹⁰

Keuntungan itulah yang menjadi salah satu faktor kewajiban Belanda untuk bertanggung jawab atas nasib koloninya. Politik etis mulai dilaksanakan pada tahun 1901. Anjuran Politik etis Van Deventer terkenal dengan sebutan trilogi Van Deventer atau trias etika

⁹ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁰ Direktorat Sejarah dan nilai Budaya Kemdikbud, *Sejarah Pemikiran Modern Indonesia* (Jakarta: Kemdikbud, 2013), hlm. 33.

yang terdiri dari tiga hal penting yang harus dibangun di Hindia Belanda yakni, edukasi (pendidikan), irigasi (pengairan), dan emigrasi (perpindahan penduduk). Politik etis telah mengubah pandangan dalam politik kolonial yang menganggap Hindia Belanda bukanlah suatu daerah ataupun jajahan menguntungkan saja untuk diambil keuntungannya, namun juga sebagai daerah yang perlu dikembangkan baik kesejahteraan maupun kebudayaannya. Adapaun trilogi Van Deventer untuk memperbaiki nasib rakyat di Hindia Belanda memiliki isi sebagai berikut:

D. Edukasi (Pendidikan)

Pendidikan diberikan di sekolah kelas satu kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berkedudukan atau berharta. Pada 1903 terdapat 14 sekolah kelas satu di ibukota karesidenan dan ada 29 di ibukota Afdeling. Mata pelajarannya, yaitu membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, ilmu alam, sejarah, dan menggambar. Pendidikan kelas dua dikhususkan untuk anak-anak pribumi golongan bawah. Pada 1903, di Jawa dan Madura sudah terdapat 245 sekolah kelas dua negeri dan 326 sekolah Fartikelir, di antaranya 63 dari Zending. Adapun jumlah muridnya pada 1892 ada 50.000, pada 1902 ada 1.623 anak pribumi yang belajar pada sekolah Eropa.¹¹

Pendidikan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 setelah politik etis seluruhnya berjumlah 601, berbanding dengan penduduk di

¹¹ Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *op. cit.*, hlm. 28-29.

Hindia Belanda sebanyak 37 juta jiwa. Selain sekolah yang didirikan oleh pemerintah, terdapat pula sekolah swasta yang pada umumnya diperuntukkan untuk kalangan peranakan. Jumlah sekolah swasta saat itu kurang lebih 359 sekolah. Apada tahun 1900, tercatat sebanyak 169 *Europese lagere School* (ELS) di seluruh Hindia Belanda dengan jumlah murid anak pribumi mencapai 1.545 siswa, sementara untuk murid Eropa sebanyak 13.592 siswa. Mereka juga bisa meneruskan ke *Hoogere Burgelijk School* (HBS) serta meneruskan pelajaran di STOVIA. Namun dalam kenyataannya, tidak semua siswa mampu melanjutkan ke HBS karena masalah persyaratan dan rangkaian tes yang susah untuk bisa masuk.¹² akhirnya banyak dari mereka yang melanjutkan ke OSVIA untuk menempati posisi kepegawaian. Untuk menjadi calon pegawai pamong praja ada tiga sekolah OSVIA, masing-masing di Bandung, Magelang, dan Probolinggo. Sedangkan, nama-nama sekolah untuk anak-anak Eropa dan anak kaum pribumi adalah sebagai berikut:

- a. HIS (Hollandsch Indlandsche School) setingkat SD
 - b. MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs) setingkat SMP
 - c. AMS (Algemeene Middlebare School) setingkat SMU
 - d. Kweek School (Sekolah Guru) untuk kaum bumi putra
 - e. Technical Hoges School (Sekolah Tinggi Teknik) di Bandung.
- Pada 1902, didirikan sekolah pertanian di Bogor (sekarang IPB).

¹² Direktorat Sejarah dan nilai Budaya Kemdikbud, *op. cit.*, hlm 34.

2. Irigasi (Pengairan)

Sarana vital bagi pertanian adalah pengairan dan oleh pihak pemerintah telah dibangun sejak 1885. Bangunan-bangunan irigasi Berantas dan Demak seluas 96.000 bau, pada 1902 menjadi 173.000 bau. Dengan irigasi tanah pertanian akan menjadi subur dan produksinya bertambah.

3. Emigrasi (Perpindahan Penduduk)

Untuk mengurangi kepadatan penduduk Jawa, tanah-tanah di seberang jawa dijadikan salah satu tujuan untuk pemerataan jumlah penduduk dengan memanfaatkan tanah-tanah tersebut. Pada 1865 jumlah penduduk Jawa dan Madura 14 juta. Pada 1900 telah berubah menjadi dua kali lipat. Pada awal abad ke-19 terjadi migrasi penduduk dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sehubungan dengan adanya perluasan perkebunan tebu dan tembakau, migrasi penduduk dari Jawa ke Sumatra Utara karena adanya permintaan besar akan tenaga kerja perkebunan di Sumatra Utara, terutama ke Deli, sedangkan ke Lampung mempunyai tujuan untuk menetap.¹³

E. Tujuan Politik Etis

Apabila kita perhatikan lebih dalam dan cermat, tujuan politik etis adalah untuk memajukan problem pendidikan dengan menyelenggarakan pendidikan, Irigasi dengan membangun sarana dan jaringan pengairan supaya lahan-lahan yang mati bisa produktif

¹³ Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *op. cit.*, hlm. 28.

kembali, sedangkan emigrasi dilakukan dengan cara yaitu mengorganisir perpindahan penduduk. Politik etis yang dilaksanakan Belanda dengan melakukan perbaikan bidang irigasi, pertanian, transmigrasi, dan pendidikan, nampaknya memiliki tujuan yang mulia. Namun di balik semua itu, terdapat program-program tersembunyi yakni tetap untuk kepentingan kolonialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda sebagai induk kolonial terhadap jajahannya.

F. Munculnya Elit Modern di Indonesia

Pada tahun 1900an politik penjajahan berubah menjadi politik etis, karena dianggap lebih bisa diterima dari pada sebelumnya karena dianggap lebih mengusahakan kemakmuran dan otonomi. Pada Kehidupan Indo Eropa di Hindia Belanda boleh dikatakan lebih baik dari pada pribumi pada masa itu atau bisa disebut golongan menengah namun demikian mereka terombang-ambing dalam keeping-keeping kehidupan masyarakat Hindia-Belanda. Mereka bisa ditolak di kalangan mereka sendiri baik dari Eropa maupun pribumi. Sementara itu, dalam struktur masyarakat Hindia-Belanda di tahun 1900an, terdapat orang Tonghoa dan Arab yang keduanya lebih kepada berjiwa dagang. Dalam pengelompokan kelasnya, orang Tonghoa dan Arab masuk kelas kedua yakni *Vreemde Oosterlingen* atau Timur Jauh dan termasuk juga orang-orang India. Sedangkan orang Indonesia sendiri terbagi ke dalam dua golongan yaitu petani dan priyai. Pada 1900an Pemerintah Belanda menunjukkan perhatian lebih kepada orang-orang pribumi dalam bidang

pendidikan. Namun demikian saat itu hanya kalangan atas atau elit pribumi yang bisa mengakses pendidikan dari kebijakan politik etis.

Sementara itu, orang Indonesia semenjak 1900 mengakui ada dua tingkatan di dalam masyarakatnya. Kelompok besar terdiri dari petani, orang desa dan kampung yang dinamakan sebagai rakyat jelata. Sedangkan orang-orang Indonesia yang berpendidikan dan berada di tempat yang lebih baik seperti administratur atau pegawai pemerintah, baik di kota maupun di pedesaan dikenal sebagai elit atau priyayi. Secara terpisah, kaum ningrat juga merupakan kelompok terpisah, namun orang Indonesia memasukkannya dalam tingkatan priyayi. Jadi, priyayi adalah kelompok yang disebut elit dan ini merupakan siapa saja yang berdiri di atas rakyat jelata yang dalam beberapa hal memimpin, memberi pengaruh, mengatur, menuntun masyarakat Indonesia.¹⁴

Pemilihan umum tahun 1901 di Belanda mengubah peta politik di negeri tersebut. Partai Liberal yang menguasai politik selama lima puluh tahun telah keluar dari kekuatan politik, sibuk dengan kitab tuntunan (proyek sosial) dan agama (pendirian netral dalam agama), telah membuat kelompok “kanan” dan kelompok agama berkoalisi untuk kembali kepada prinsip-prinsip kristen dalam pemerintahan. Van deventer yang merupakan tokoh liberal meneruskan usahanya dari luar ketika tidak terpilih duduk di parlemen, akan tetapi dia dapat menyebabkan orang merasakan pengaruhnya dengan gagasan politik etisnya.

¹⁴ Robert van Niel, *op. cit.*, hlm 31-32.

Sejalan dengan hal tersebut, tuntutan untuk memperoleh pendidikan barat semakin meluas karena dimulainya pelebaran kelas pegawai pemerintah kolonial. Hal ini mengancam kedudukan pegawai lama yang hanya bertopang pada kebanggaan keturunan. Untuk mempertahankan harkat dan status kepegawaiannya yang dulu didapatkan atas dasar hubungan dengan raja dan anak bangsawan, kini harus diperoleh melalui ketrampilan teknis menurut corak pendidikan barat.¹⁵ Proses mengembangkan pemimpin-pemimpin orang Jawa yang berpendidikan barat pada mulanya tidak mendapat kerjasama dan kadang-kadang mendapatkan tentangan dari pihak orang tua. Mereka takut akan mendapatkan pengaruh sebaliknya pada kedudukan sosial anak-anak mereka dan takut pula kalau hal itu akan membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan.

Namun pada tahun 1906, pemerintah berkesempatan banyak untuk menunjukkan niat baiknya, sehingga tantangan tentang keburukan itupun hilang. Sesudah tahun tersebut keinginan pun semakin bertambah dan meningkat di kalangan atasan orang Indonesia untuk mendapatkan pendidikan secara barat.¹⁶ Di luar kepomongprajaan, lembaga pendidikan ala barat menghasilkan tenaga-tenaga yang terlatih dan dapat dipekerjakan pemerintah. Para pejabat baru banyak mendapatkan kedudukan pemerintah berasal dari kalangan bawah.

¹⁵ Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Kemdikbud, *op. cit.*, hlm 37.

¹⁶ Robert van Niel, *op. cit.*, hlm 78.

Dalam hal ini, saluran mobilitas sosial menjadi titik tolak ke arah transformasi sosial. Anak-anak pegawai rendah karena pendidikan yang mereka peroleh menawarkan kesempatan untuk melampaui tingkat yang pernah di capai oleh orang tua mereka.¹⁷

Hal ini pada gilirannya membuahkannya beragamnya elit Indonesia. Bila pada tahun 1900, kelompok priyayi yang menjadi kaum bangsawan dan administratur, menjelang tahun 1914 kelompok ini bertambah dengan sejumlah pegawai pemerintah, teknisi-teknisi pemerintah dan cendekiawan yang sama-sama memerankan elit dan yang di mata rakyat biasa Indonesia di desa-desa tercakup ke dalam yang umumnya disebut priyayi. Tentu saja termasuk juga kompetisi antara priyayi lama dan priyayi baru ini, terutama dalam hal kepemimpinan dan pengendalian keinginan-keinginan rakyat biasa. Dalam batas-batas jangkauan studi dari Robert van Niel ini dapat pula dikatakan, bahwa garis besar perkembangan elit Indonesia adalah dari yang bersifat tradisional yang berorientasi koemologis, dan berlandaskan pada keturunan kepada elit modern yang berorientasi kepada negara kemakmuran, berdasarkan pendidikan. Elit modern ini jauh lebih beraneka ragam daripada elit tradisional. Akan tetapi, di sini sedikit saja usaha yang dilakukan untuk menguraikan elit modern ini secara structural. Ada disebutkan tentang administrator-administratur, pegawai-pegawai pemerintah, teknisi-teknisi, orang-orang professional dan para intelektual, tetapi pada akhirnya perbedaan utama yang dibuat di sini ialah antara elit fungsional dan elit politik.

¹⁷ Direktorat Sejarah dan nilai Budaya Kemdikbud, *op. cit.*, hlm 38.

Apa yang dimaksud dengan elit fungsional adalah pemimpin-pemimpin yang baik pada masa lalu maupun saat ini, mengabdikan diri untuk keberlangsungan fungsi suatu negara dan masyarakat modern. Sedangkan elit politik adalah orang-orang Indonesia yang terlibat di dalam aktivitas politik untuk berbagai tujuan tapi biasanya bertalian dengan perubahan politik. Kelompok pertama menjalankan fungsi sosial yang lebih besar dengan bertindak sebagai pembawa perubahan, sementara golongan kedua lebih mempunyai arti simbolis daripada secara praktis.¹⁸

¹⁸ Robert van Niel, *op. cit.*, hlm. 12.

Bab III

Tumbuhnya Nasionalisme dan Pergerakan Nasional Indonesia

A. Nasionalisme di Indonesia

Hans Kohn menyatakan nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara dan bangsa. Pada akhir abad ke-18 nasionalisme dalam arti kata modern menjadi suatu perasaan yang diakui secara umum. Nasionalisme semakin lama semakin kuat perannya dalam membentuk semua segi kehidupan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat pribadi. Pada akhirnya berlaku pula syarat yang menegaskan setiap bangsa harus membantu suatu negara, sedangkan negara itu sendiri harus meliputi seluruh bangsa.¹⁹

Menurut Slamet Muljana, nasionalisme merupakan manifestasi kesadaran berbangsa dan bernegara atau semangat bernegara.²⁰ Nasionalisme juga bisa diartikan sebagai paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri (bersifat kenasionalan). Kesadaran nasionalisme suatu bangsa terbangun secara bersama-sama untuk mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas,

¹⁹Hans Kohn, *Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya* (Jakarta: Erlangga, 1998), hlm., 11.

²⁰Slamet Muljana, *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa* (Jakarta: tp, 1968), hlm., 7.

kemakmuran bangsa. Kecintaan terhadap bangsa ini memiliki potensi besar dalam membangun kesadaran terhadap sifat kenasionalan.²¹

Anthony D. Smith menyatakan bahwa paling tidak terdapat lima macam nasionalisme. *Pertama*, nasionalisme merupakan sebagai suatu proses pembentukan bangsa-bangsa. *Kedua*, nasionalisme sebagai rasa sentimen atau suatu kesadaran memiliki bangsa. *Ketiga*, nasionalisme sebagai suatu bahasa atau simbolisme bangsa. *Keempat*, nasionalisme sebagai gerakan sosial dan politik demi suatu bangsa. *Kelima*, nasionalisme sebagai doktrin atau suatu ideologi bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Smith bahkan lebih jauh mendefinisikan nasionalisme sebagai suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan identitas bagi suatu populasi yang sejumlah anggotanya bertekad membentuk suatu bangsa yang aktual atau bangsa potensial.²²

Latar belakang nasionalisme yang terbentuk di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari adanya kolonialisasi yang dilakukan oleh Belanda. Pada era kolonial, perlawanan terhadap dominasi dalam bidang politik, kebudayaan dan juga ekonomi dilakukan oleh para *founding father* dan para elit pergerakan nasional. Apabila dikaitkan dengan kolonialisme, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kelanjutan nasionalisme di saat sebuah negara telah memperoleh kemerdekaan dan tidak terjajah

²¹*Ibid.*, hlm., 775-776.

²²Anthony Smith, *Nasionalisme, Teori, Ideologi, Sejarah*, terj. Frans Kowo (Jakarta: Erlangga, 2003) hlm., 6-11.

lagi. Apakah kesadaran nasional dan nasionalisme juga akan selesai dengan sendirinya.

Sartono Kartodirdjo mengutarakan nasionalisme memiliki lima prinsip. *Pertama*, kesatuan (*unity*) yang mentransformasikan hal-hal yang polimorfik menjadi monomorfik sebagai proses integrasi. *Kedua*, kebebasan (*liberty*) bagi negara-negara terjajah yang memperjuangkan pembebasan dari kolonialisme. *Ketiga*, kesamaan (*equality*) sebagai bagian implisit dari masyarakat demokratis yang merupakan *antithese* dari masyarakat kolonial yang diskriminatif dan otoriter. *Keempat*, kepribadian serta identitas yang lenyap karena negasi kaum kolonial. *Kelima*, prestasi yang sangat diperlukan untuk menjadi sumber inspirasi dan kebanggaan bagi warga negara bangsa.²³ Dalam komunikasi politik, konsep tentang nasionalisme perlu diterjemahkan dengan metafor dan simbol sehingga imaji yang lebih kongkrit akan lebih mudah dapat dipopulerkan ke masyarakat.

Slamet Muljana lebih lanjut menyatakan bahwa manifestasi nasionalisme tidak hanya dalam tataran perlawanan terhadap kolonialisme. Apabila kesadaran itu bergantung pada kolonialisme, maka nasionalisme akan berhenti setelah kolonialisme telah berakhir. Realitas historis menunjukkan rasa nasionalisme tetap ada meski kolonialisme telah berakhir. Bahkan rasa nasionalisme bisa tumbuh tanpa adanya kolonialisme. Dalam konteks Indonesia, kesadaran ini merupakan bentuk

²³Sartono Kartodirdjo, *Nasionalisme, Lampau dan Kini*, hlm., 4-5. Sebuah makalah yang disampaikan pada seminar tentang “Nasionalisme Indonesia Menjelang dan Pada Abad XXI” yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Darma di kampus Universitas Kristen Satya Wacana tanggal 2-5 Juni 1993.

dari nasionalisme bebas yang artinya tanpa ada tekanan dari kolonialisme. Pada hakikatnya, nasionalisme ini termanifestasikan dalam pengabdian terhadap bangsa dan negara tanpa adanya pembatasan waktu.²⁴

Setelah negara-negara merdeka dan terbebas dari kolonialisme, nasionalisme masih tetap berfungsi dalam rangka *nation-building* serta menjadi proses kebudayaan nasional, pembentuk kepribadian identitas nasional, dan pembentuk kesadaran nasional yang perlu dibudayakan.²⁵ Nasionalisme seperti ini dapat dihayati dan diwujudkan melalui hal yang lebih nyata dan kongrit seperti mengisi kemerdekaan.

Gerakan nasionalisme setelah kemerdekaan juga menekankan pentingnya pengorganisasian diri untuk mendefinisikan diri dan menstabilkan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain maupun dengan masyarakatnya sendiri.²⁶ Indonesia telah memiliki pengalaman panjang tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan setelah memproklamakan kemerdekaannya. Indonesia tidak serta merta dengan mudah mendapatkan pengakuan di dunia Internasional sebagai sebuah negara yang berdaulat. Mulai dari Persetujuan Linggarjati yang hanya mengakui Indonesia atas wilayah Jawa, Madura dan Sumatera, sampai Agresi Militer Belanda I dan II, menunjukkan Indonesia belum “merdeka secara penuh” tanpa ada gangguan dari luar dan dalam negeri. Indonesia akhirnya mendapatkan pengakuan kedaulatan secara

²⁴Slamet Mulyana, *Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan Jilid II* (Yogyakarta: LkiS, 2008), hlm., vii-viii.

²⁵Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm., 7.

²⁶Clifford Geertz, *Politik Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm., 56.

penuh dari pemerintah Kerajaan Belanda setelah putusan KMB di tahun 1949 dan menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Barulah saat peringatan proklamasi kemerdekaan di tahun 1950, Indonesia kembali menjadi NKRI dengan konstitusi UUDS.

Keberhasilan Indonesia mencapai kemerdekaan merupakan prestasi yang disertai pengorbanan luar biasa. Kemerdekaan itu pada akhirnya harus dipertahankan secara bersama-sama agar eksistensi negara terjamin. Hasil perjuangan kemerdekaan yang telah diraih tersebut memerlukan dukungan tidak hanya dari dalam negeri saja, namun perlu didukung eksistensinya oleh negara lainnya dan dunia internasional, terutama juga dari PBB. Apabila tidak mendapatkan pengakuan, maka hal itu bisa menjadi tidak memiliki arti apa-apa. Diplomasi internasional merupakan jalan yang harus ditempuh sebagai salah satu jalan revolusi fisik Indonesia. sebagaimana pada awal kemerdekaan setelah proklamasi dikumandangkan, diperlukan *follow up* untuk meneguhkan eksistensi sebuah negara.²⁷

B. Perjuangan Indonesia Sebelum dan Sesudah 1908

Perbedaan Perjuangan Bangsa Indonesia Sebelum dan Sesudah Tahun 1908 - Perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 telah dilakukan selama berabad-abad untuk menentang penjajah. Meskipun demikian belum menampakkan hasilnya. Perbedaan antara perjuangan Bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908 sangat mencolok,

²⁷Suhartono W. Pranoto, *Revolusi Agustus: Nasionalisme Terpasung dalam Diplomasi Internasional* (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2001), hlm., 183-188.

salah satunya terlihat dalam beberapa faktor penyebab kegagalan perjuangan sebelum tahun 1908 berikut ini.

Beberapa faktor yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 mengalami kegagalan antara lain:



1. Kurang adanya persatuan
2. Faktor persenjataan
3. Senjata yang dimiliki para pejuang Indonesia masih sangat sederhana
4. Politik devide et impera
5. Siasat Belanda mengadu domba antar sesama bangsa Indonesia berhasil
6. Tidak terorganisir, lemah kerjasama dan koordinasi (tidak kompak, inginnya masing-masing menjadi paling menonjol)
7. tergantung pada satu pemimpin
8. pendidikan rakyat masih rendah

Perjuangan bangsa Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar setelah tahun 1908. Perubahan itu antara lain:

1. Perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia mulai menonjolkan persatuan,
2. Perjuangan yang dilakukan tidak lagi menggunakan senjata tradisional, melainkan menggunakan organisasi modern, dan
3. Pemimpin perjuangan ialah golongan cerdik pandai, bukan lagi golongan bangsawan atau para pembimpin daerah yang lainnya.

Bab IV

Gagasan tentang Indonesia

A. Nama Indonesia dari Pendekatan Etnografi sampai Politik

Pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, *Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia* (JIAEA, BI: "Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur"), yang dikelola oleh James Richardson Logan (1819-1869), seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian pada tahun 1849 seorang ahli etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windsor Earl (1813-1865, menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA.

Dalam *JIAEA* volume IV tahun 1850, halaman 66-74, Earl menulis artikel *On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations* ("Pada Karakteristik Terkemuka dari Bangsa-bangsa Papua, Australia dan Melayu-Polinesia"). Dalam artikelnya itu Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas (*a distinctive name*), sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama *Indunesia* atau *Malayunesia* ("*nesos*" dalam bahasa Yunani berarti "pulau"). Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis (diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dari Bahasa Inggris):

"... Penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu masing-masing akan menjadi "Orang Indunesia" atau "Orang Malayunesia"."

Earl sendiri menyatakan memilih nama Malayunesia (Kepulauan Melayu) daripada Indunesia (Kepulauan Hindia), sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indunesia bisa juga digunakan untuk Ceylon (sebutan Srilanka saat itu) dan Maldives (sebutan asing untuk Kepulauan Maladewa). Earl berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu Earl memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indunesia. Dalam JIAEA Volume IV itu juga, halaman 252-347, James Richardson Logan menulis artikel *The Ethnology of the Indian Archipelago* ("Etnologi dari Kepulauan Hindia"). Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, sebab istilah Indian Archipelago ("Kepulauan Hindia") terlalu panjang dan membingungkan. Logan kemudian memungut nama Indunesia yang dibuang Earl, dan huruf "u" digantinya dengan huruf o agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia.²⁸ Dan itu membuktikan bahwa sebagian kalangan Eropa tetap meyakini bahwa penduduk di kepulauan ini adalah Indian, sebuah julukan yang dipertahankan karena sudah terlanjur akrab di Eropa.

Untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan (diterjemahkan ke Bahasa Indonesia):

²⁸David Chandler, et al. 2005. *The Emergence of Modern Southeast Asia: A New History*, disuntingoleh Norman G. Owen (U. Hawai'i Press, 2005).

"Mr Earl menyarankan istilah etnografi "Indunesian", tetapi menolaknya dan mendukung "Malayunesian". Saya lebih suka istilah geografis murni "Indonesia", yang hanya sinonim yang lebih pendek untuk Pulau-pulau Hindia atau Kepulauan Hindia"

Ketika mengusulkan nama "Indonesia" agaknya Logan tidak menyadari bahwa di kemudian hari nama itu akan menjadi nama resmi. Sejak saat itu Logan secara konsisten menggunakan nama "Indonesia" dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologidan geografi.²⁹

Pada tahun 1884 guru besar etnologidi Universitas Berlin yang bernama *Adolf Bastian* (1826-1905) menerbitkan buku *Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel* ("Indonesia atau Pulau-pulau di Kepulauan Melayu") sebanyak lima volume, yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara di kepulauan itu pada tahun 1864 sampai 1880. Buku Bastian inilah yang memopulerkan istilah "Indonesia" di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah "Indonesia" itu ciptaan Bastian. Pendapat yang tidak benar itu, antara lain tercantum dalam *Encyclopedie van Nederlandsch-Indië* tahun 1918.

Pada kenyataannya, Bastian mengambil istilah "Indonesia" itu dari tulisan-tulisan Logan.

Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah "Indonesia" adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Ketika dibuang ke negeri

²⁹ *Ibid.*,

Belanda tahun 1913 ia mendirikan sebuah biro pers dengan menggunakan nama *Indonesische Persbureau*. Nama Indonesisch (pelafalan Belanda untuk "Indonesia") juga diperkenalkan sebagai pengganti *Indisch* ("Hindia") oleh Prof Cornelis van Vollenhoven (1917). Sejalan dengan itu, *inlander* ("pribumi") diganti dengan *Indonesiër* ("orang Indonesia").

1. Identitas gerakan politik

Nama Indonesia menjadi identitas politik ketika trio Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara (Soewardi Soerjaningrat), dan dokter Tjipto Mangunkusumo mengusung gagasan modern berpolitik dalam Indische Partij (Partai Hindia), yang menjadikan orang-orang kelahiran Indonesia membangun kesadaran politik dan kebangsaan Indonesia tanpa membedakan sekat perbedaan suku-rasial dan keyakinan. Sebagai kilas balik yang menarik, sejarawan Remco Raben dan Ulbe Bosma dalam buku *Being Dutch In The Indies: A History of Creolisation and Empire, 1500-1920*, mengungkapkan, kesadaran sebagai "Putera Hindia" juga muncul di kalangan Indo-Eropa. Bahkan, pernah terjadi unjuk rasa menuntut hak sebagai Putera Hindia pada 1840-an yang sangat tidak lazim di Hindia-Belanda yang sangat konservatif. orang Eropa mengacu Benua Eropa adalah tanah airnya. Mereka hanya menjadi pemukim-trekker-yang suatu hari akan kembali ke Eropa dan tidak peduli masa depan Hindia. Adapun kelahiran Indische Partij dan kemunculan gerakan Sarikat Islam (SI) oleh HOS Tjokroaminoto dan kawan-kawan pada zaman Gubernur Jenderal Idenburg memicu pergerakan kebangsaan lebih lanjut oleh para pemuda yang mengalami banyak tekanan. Pada saat yang sama, krisis

ekonomi global-malaise-melanda dunia dan memukul Hindia-Belanda yang ekonominya mengandalkan ekspor komoditas, seperti gula dan berbagai bahan mentah.³⁰

B. Kongres Pemuda dan Lagu Indonesia Raya

Nasionalisme bukan hanya menjadi milik organisasi-organisasi politik tapi kemudian menjadi milik para pelajar dan pemuda yang kemudian terhimpun kedalam PPPI (perhimpunan-perhimpunan pelajar Indonesia), organisasi tersebut didirikan tahun 1926 dan merupakan perkumpulan mahasiswa *Recht Schoolgeschar* dan *STOVIA* untuk merealisasikan persatuannya dan menghilangkan sifat-sifat kedaerahan dan mencapai Indonesia satu maka diadakanlah suatu kongres yang bertujuan membentuk badan sentral, mengajukan paham kesatuan, dan semakin mempererat hubungan diantara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Selanjutnya PPPI pun mengadakan kongres lagi dan diselenggarakan 27-28 oktober 1928, dan dikenal dengan kongres sumpah pemuda. Isi daripada kongres pun yakni:

“Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia

Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia

Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia”

³⁰ “Asal Usul Nama Indonesia” dalam: *Kompas*, 29 Oktober 2015.

Hasil kongres pun nantinya dijadikan landasan perjuangan Indonesia merdeka, dan pada kongres inilah untuk pertama kalinya diperdengarkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R Supratman. Pemanasan menjelang Sumpah Pemuda dimulai ketika tahun 1927, WR Supratman dan Yo Kim Tjan, pemilik Toko Musik Populair di Pasar Baru, berkolaborasi merekam lagu Indonesia Raya yang kemudian digandakan di Inggris. Selanjutnya, pada 1928, para pemuda membuka Kongres Pemuda II di lahan Jong Katolieek Bond di Kompleks Katedral dan ditutup di rumah Sie Kong Liong di Jalan Kramat Raya 106, yang kini menjadi Museum Sumpah Pemuda. Pemuda, seperti Mohammad Yamin, Amir Sjarifoeddin, dan Asaat, yang kelak menjadi pejabat presiden RI, pernah indeksos di rumah Sie Kong Liong yang menyokong gerakan para pemuda hingga lahir Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober.³¹

³¹ “Asal Usul Nama Indonesia” dalam: *Kompas*, 29 Oktober 2015.

Bab V

Pergerakan Nasional Indonesia

A. Pelopor Pergerakan (BU, SI dan IP)

1. Budi Utomo

Pada tahun 1907 Dr. Wahidin seorang tokoh cendekiawan yang merasa bertanggung jawab atas kebodohan dan keterbelakangan bangsanya melakukan kunjungan ke sekolah STOVIA (salah satu lembaga pendidikan yang menghasilkan priyayi rendah Jawa). Siswa di sana sangat bersemangat dan memberikan tanggapan yang baik atas kedatangan Dr. Wahidin. Bersama beberapa siswa STOVIA seperti Soetomo dan Goenawan Mangunkusumo, Dr. Wahidin mengadakan perjalanan keliling Pulau Jawa untuk menghimpun dana pendidikan. Usaha yang dilakukan oleh Dr. Wahidin itu mendapat simpati yang besar dari semua kalangan. Mereka yang kebetulan memiliki uang dengan sukarela memberikan sumbangannya. Setelah diadakan rapat-rapat untuk membicarakan lebih jauh rencana mereka, pada tanggal 20 Mei 1908 bertempat di jalan Abdulrahman Saleh 26 Jakarta terbentuklah suatu perkumpulan yang dinamakan Budi Utomo, yang diketuai oleh Soetomo. Corak baru yang diperkenalkan Budi Utomo adalah kesadaran lokal yang diformulasikan dalam wadah organisasi modern, dalam arti bahwa organisasi itu mempunyai pimpinan, ideologi yang jelas dan anggota. Lahirnya Budi Utomo, telah merangsang berdirinya organisasi-organisasi pergerakan lainnya yang menyebabkan terjadinya perubahan sosio-politik Indonesia.³²

³² Ayo Budi SantosadanEncepSupriatna, *Buku Ajar SejarahPergerakanNasional, Dari Budi Utomo 1908 HinggaProklamasiKemerdekaan 1945* (Bandung: UPI, 2008), hlm. 15.

Budi utomo adalah suatu organisasi yang didirikan oleh kalangan terpelajar di sekolah kedokteran yang berasal dari priyayi Jawa yang "baru" atau priyayi rendahan. Mereka memiliki pandangan bahwa pendidikan adalah kunci untuk kemajuan. Kelompok inilah yang merupakan kelompok pertama pembentuk suatu organisasi yang benar-benar modern. Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah tokoh yang membidani lahirnya Budi Utomo melalui kegiatannya menghimpun dana beasiswa untuk memberikan pendidikan Barat kepada golongan priyayi Jawa. Kegiatan yang dilakukan oleh Dr. Wahidin tersebut disambut oleh Soetomo, seorang mahasiswa School Tot Opleiding van Indische Arsten (STOVIA) atau Sekolah Dokter Jawa. Bersama rekan-rekannya dia mendirikan Budi Utomo (BU) di Jakarta pada 20 Mei 1908. Budi utomo sejak awal berdiri sudah menetapkan bahwa bidang perhatian organisasi ini pada upaya peningkatan pendidikan dan memajukan pendidikan masyarakat dengan memberi kesempatan dan beasiswa bagi rakyat Indonesia untuk menempuh pendidikan. Hanya saja ruang lingkup yang menjadi obyek pengembangan pendidikan ini pada awalnya hanya meliputi penduduk Jawa dan Madura.

Diperhatikan dari segi keanggotaannya, organisasi budi utomo mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) bersifat lokal, sebab anggotanya hanya terbatas pada orang jawa dan madura, kemudian berkembang ke Bali, tidak meliputi seluruh wilayah Indonesia;

2) bersifat moderat dan aristokratis, tidak bertindak radikal dalam memperjuangkan tujuannya. Hal ini dimaklumi karena sebagian besar anggotanya adalah pegawai negeri dan juga dari lapisan ningrat.

Pada kongres Budi Utomo yang diselenggarakan pada 3-5 Oktober 1908, Tirta Kusumo diangkat menjadi Ketua Pengurus Besar. Dalam kongres ini, etnonasionalisasi semakin bertambah besar. Selain itu, dalam kongres tersebut juga timbul dua kelompok, yaitu kelompok pertama diwakili oleh golongan pemuda yang merupakan minoritas yang cenderung menempuh jalan politik dalam menghadapi pemerintah kolonial.

Adapun kelompok kedua merupakan golongan mayoritas diwakili oleh golongan tua yang menempuh perjuangan dengan cara lama, yaitu sosiokultural (pendidikan, pengajaran dan kebudayaan). Golongan minoritas yang berpandangan maju dalam organisasi ini dipelopori oleh Dr. Tjipto Mangunkusumo. Dr. Tjipto Mangunkusumo ingin menjadikan Budi Utomo bukan hanya sebagai partai politik yang mementingkan rakyat, melainkan juga sebuah organisasi yang kegiatannya tersebar di Indonesia, bukan hanya di Jawa dan Madura. Sementara golongan tua menginginkan pembentukan dewan pimpinan yang didominasi oleh para pejabat generasi tua. Golongan ini juga mendukung pendidikan yang luas bagi kaum priyayi dan mendorong kegiatan pengusaha Jawa. Tjipto terpilih sebagai seorang anggota dewan. Namun, pada 1909 dia mengundurkan diri dan akhirnya bergabung dengan Indische Partij yang perjuangannya bersifat radikal.

Karakteristik Budi Utomo yang seperti demikian menyulitkan untuk bertindak revolusioner, walaupun lambat laun juga mempunyai program politik dan memperluas keanggotanya hingga sampai ke Bali. Hal ini terjadi karena banyak dari anggota Budi Utomo adalah pegawai pemerintahan Belanda dan banyak yang berasal dari kalangan ningrat. Kondisi inilah yang mengakibatkan keluarnya beberapa orang tokoh utama dari Budi Utomo, seperti Cipto Mangunkusumo, Soetomo, dan Soepomo.

2. Sarekat Islam

Sarekat Islam (SI) pada awalnya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI), yaitu perkumpulan bagi pedagang Islam yang didirikan tahun 1911 di Solo, oleh H. Samanhudi. Organisasi ini mempunyai tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji Islam, serta agar para pedagang Islam dapat bersaing dengan pedagang Barat maupun Timur Asing. Sarekat Dagang Islam mengalami perkembangan cukup pesat, hal ini terjadi karena:

1. Pedagang keturunan Tionghoa melakukan monopoli bahan-bahan batik, ditambah pula dengan tingkah laku mereka yang tidak mengenakan pada pedagang pribumi;
2. Penyebaran agama Kristen yang merupakan tantangan bagi para penganut Islam;
3. Adat lama yang bertentangan dengan ajaran Islam yang terus dipertahankan di daerah Jawa, makin lama makin dirasakan sebagai penghinaan terhadap umat Islam.

Faktor lain yang mempengaruhi pesatnya pertumbuhan perkumpulan pedagang Islam tumbuh pesat terutama setelah Tjokroaminoto masuk dan kemudian menjadi pemimpin Sarekat Dagang Islam. SDI berganti namanya menjadi Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912. SI mempunyai tujuan mengembangkan perekonomian guna mencapai kemajuan rakyat yang nyata dengan jalan persaudaraan, persatuan, dan tolong menolong di antara kaum muslimin. Keanggotaannya terbuka untuk setiap lapisan masyarakat yang beragama Islam. Pada Juni 1916, mengembangkan sebuah cita-cita terbentuknya satu bangsa bagi penduduk Indonesia. Pada kongres 1917, SI mulai dimanfaatkan oleh kekuatan lain untuk kepentingan politik tertentu dan disusupi aliran revolusioner sosialis dengan tokohnya Semaun yang menduduki ketua SI cabang Semarang. Dengan masuknya Semaun, tujuan SI kemudian berubah menjadi membentuk pemerintah sendiri dan perjuangan melawan penjajah dari kapitalisme yang jahat.

Dalam kongres diputuskan tentang keikutsertaan SI dalam Volksraad. Masuknya kaum sosialis-komunis di dalam tubuh SI, hingga memberikan pengaruh terhadap tujuan SI dan ditambah dengan pernyataan bahwa menjadi penjajahan dalam lapangan kebangsaan dan perekonomian itu adalah buah dari kapitalisme dan kapitalisme hanya bisa dikalahkan oleh per satuan kaum buruh dan petani. Pada tahun 1921, SI menetapkan bahwa seseorang harus memilih antara SI atau organisasi lain.

Pilihan ini sebenarnya bertujuan untuk membersihkan barisan SI dari unsur-unsur komunis. Dengan keputusan tersebut, seseorang tidak mungkin menjadi anggota SI sekaligus menjadi anggota PKI. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya perpecahan di tubuh SI, dan berganti nama SI Merah dan SI Putih. SI Merah yang dipimpin oleh Semaun berpusat di Semarang dan berazaskan komunis. Adapun SI Putih dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto yang berlandaskan Islam. Perkembangan selanjutnya SI berubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI), sedangkan SI Merah menjadi Sarekat Rakyat yang kemudian menjadi organisasi yang berada di bawah naungan PKI.

PSI mempunyai tujuan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan nasional. Karena tujuannya yang jelas itulah maka PSI menggabungkan diri dengan Permusyawaratan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Kongres PSI 1927 menyatakan bahwa Karena keragaman cara pandang di antara elite partai, PSII pecah menjadi beberapa partai politik, seperti Partai Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sukiman, PSII Kartosuwiryo, PSII Abikusno, dan PSII sendiri. Perpecahan itu melemahkan PSII dalam perjuangannya.

3. Indische Partij

Keistimewaan IP adalah usianya yang sangat pendek, tetapi anggaran dsarnya dijadikan program politik pertama di Indonesia. Organisasi ni didirikan oleh E.F.E Douwes Dekker di Bandung pada 25 Desember 1912. IP adalah organisasi campuran yang menginginkan kerjasama orang Indo dan Bumiputera. Gerakan IP sangatlah

mengkhawatirkan pemerintah Kolonial Belanda, karena IP bersifat radikal dalam menuntut kemerdekaan Indonesia. Keadaan itu yang menyebabkan pemerintah bersikap keras terhadap IP permohonan IP untuk mendapatkan badan hukum sia-sia belaka dan organisasi ini dinyatakan sebagai partai terlarang sejak 4 Maret 1913. Para pemimpin IP pun ditangkap dan dibuang ke tempat-tempat yang jauh. Usia IP sangat pendek, namun —bagaikan sebuah tornado yang melanda Jawa. Oleh penerusnya setelah IP dibubarkan dan pimpinannya di buang kemudian organisasi itu bernama Insulinde. Pada decade 1920-an kondisi pergerakan nasional telah mengalami berbagai perkembangan. Perkembangan tersebut, bukan saja karena usia pergerakan nasional telah belasan tahun, akan tetapi bidang-bidang yang dimasuki oleh kaum pergerakan sudah menekuni bidang-bidang politik yang pada periode sebelum Perang Dunia I tidak banyak dibicarakan, atau lebih tepat dikatakan belum menjadi perhatian utama, kecuali bagi Indische Partij yang sejak awal berdirinya telah cenderung ke arah politik. Sedangkan bagi Boedi Oetomo (BO) dan Sarekat Islam (SI) pada masa pembentukannya belum menyentuh program politik. Sebab-sebab khusus dari pembentukan kedua organisasi tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat yang belum memungkinkan melakukan pembicaraan-pembicaraan politik. Baik BO maupun SI memang orientasinya masih di luar lapangan politik.³³

³³*Ibid.*, hlm. 31.

Indische Partij menyatakan bahwa nasionalisme merupakan hal paling penting dan oleh karena itu harus diperjuangkan. Partai ini juga dengan tegas menyatakan harus dicapainya kemerdekaan Indonesia dari pemerintah kolonial Belanda. Dalam perjuangannya, partai ini bersikap radikal terutama dalam menghadapi sistem kolonial Belanda. Indische Partij menuntut dihapusnya eksploitasi rakyat dan oleh karena itu mereka beranggapan bahwa penghapusan eksploitasi dapat dicapai apabila Hindia Belanda memperoleh kemerdekaan sistem politik dan pemerintahan yang demokratis. Anggaran dasar Indische Partij menetapkan tujuan membangun lapangan hidup, menganjurkan kerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan, memajukan tanah air Hindia Belanda, dan mempersiapkan kehidupan rakyat merdeka. Indische Partij berdiri atas dasar nasionalisme yang menampung semua suku bangsa di Hindia Belanda dengan tujuan akhir mencapai kemerdekaan. Paham kebangsaan ini kemudian diolah dan dikembangkan oleh partai-partai lain, seperti Perhimpunan Indonesia (PI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI).

Karena keradikalan partai ini, pemerintah kolonial bersikap keras dan oleh karena itu tidak memberi badan hukum. Sikap pemerintah kolonial semakin keras terutama setelah setelah munculnya artikel Suwardi Suryaningrat pada peringatan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari jajahan Prancis. Artikel ini berjudul "Als ik een Nederlander was" (Andaikata aku seorang Belanda). Artikel ini membuat pemerintah kolonial Belanda marah dan disusul dengan ditangkapnya ketiga tokoh Indische Partij yang kemudian diasingkan ke Belanda.

Pada 4 Mei 1913, Indische Partij dinyatakan sebagai partai terlarang. Walaupun sudah dibubarkan, ketiga tokoh ini tetap berjuang. Douwes Dekker tetap di jalur politik. Suwardi Suryaningrat yang kemudian lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara terjun dalam bidang pendidikan. Adapun Tjipto Mangunkusumo meneruskan perjuangannya yang radikal walaupun dalam beberapa waktu harus berjuang di dalam penjara. Meskipun organisasi ini berumur pendek, Indische Partij telah memberikan perlawanan gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Partai ini merupakan partai pertama yang menanamkan paham kebangsaan.

B. Masa Radikal (Perhimpunan Indonesia, PKI, PNI)

Organisasi pergerakan nasional Indonesia yang menempuh sikap radikal, diwujudkan dalam gerakan nonkooperatif. Selain itu, tidak bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Faktor-faktor penyebab pergerakan nasional bersifat radikal, antara lain:

- 1) Timbulnya krisis ekonomi pada tahun 1921 dan krisis perusahaan gula sejak tahun 1918 setelah perang dunia I.
- 2) Pergantian kepala pemerintahan Hindia Belanda kepada Gubernur Jenderal Fock yang bersifat reaksioner.

Organisasi pergerakan nasional Indonesia pada masa radikal, antara lain dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Indonesia (Partindo), PNI Baru, dan Gerindo

1. Perhimpunan Indonesia

Dampak politik etis ternyata sangat besar keberadaan IV (indische vereeniging) pada tahun 1922 kemudian berganti nama menjadi PI (perhimpunan indonesia) pada tahun 1925 adapun tokoh-tokoh PI yang muncul pada saat itu adalah Iwa Kusumasumantri, Moh Hatta, JB Sitanala, Sastramulyana, D.Mangunkusomo dan mereka pun kemudian menerbitkan majalah Indonesia Merdeka penerbitan majalah itu adalah suatu usaha menciptakan identitas baru bagi kekuatan nasionalis diluar tanah air. Propaganda yang dilancarkan PI mampu para pengikutnya sehingga dari waktu ke waktu semakin bertambah kekuatannya dan perjuangannya PI pun ialah perjuangan kesetaraan, persamaan hak, dan himbauan agar seluruh organisasi politik di tanah air agar mau bersatu padu. PI merupakan organisasi radikal sebagai akibat pemikiran Moh Hatta, dialah yang menyebabkan PI berkembang dan dialah yang merangsang intelektual rekan-rekannya. Oleh karena itu PI mempunyai beberapa tujuan pokok dalam perjuangannya: Membentuk suatu negara Indonesia merdeka Partisipasi seluruh lapisan rakyat Indonesia dalam suatu perjuangan terpadu untuk mencapai kemerdekaan Konflik kepentingan antara penjajah dan yang dijajah harus dilawan dengan mempertajam dan mempertegas konflik. Konflik ditujukan untuk melawan penjajah Pengaruh buruk penjajahan Belanda terhadap kesehatan fisik dan psikis bangsa Indonesia harus segera

dipulihkan dan dinormalkan dengan cara terus berjuang mencapai kemerdekaan.³⁴

Dalam rapat umum 1923 organisasi ini menyepakati tiga asas pokok organisasi yaitu:

- a) Indonesia menentukan nasib sendiri;
- b) untuk itu Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemauan sendiri;
- c) untuk melawan pemerintah kolonial Belanda, bangsa Indonesia harus bersatu.

Untuk menunjukkan sikap nasionalismenya, para pengurus organisasi ini kemudian mengubah nama majalah Hindia Putera dengan Indonesia Merdeka. Pada edisi pertama majalah Indonesia Merdeka diungkapkan bahwa penjajahan Indonesia oleh Belanda dan penjajahan Belanda oleh Spanyol memiliki banyak persamaan. Selain itu diungkapkan pula alasan tidak disebutnya negara Hindia Belanda karena hampir sama dengan orang Belanda yang tidak mau menyebut negaranya dengan Nederland-Spanyol. Para mahasiswa mengetahui hal ini setelah mempelajari mengenai perjuangan Belanda melawan Spanyol.

Organisasi ini juga berpendapat bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa yang ada di dunia, termasuk hak bangsa Indonesia yang masih terjajah. Semangat perjuangan politiknya yang jelas menuju Indonesia merdeka menjadikan organisasi ini disegani oleh organisasi-organisasi sejenis di kalangan negara-negara terjajah di Asia. Propaganda

³⁴*Ibid.*, hlm. 43-44

tentang tujuan dan ideologi baru bangsa Indonesia disosialisasikan secara lebih gencar oleh organisasi ini dengan menerbitkan buklet dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-15 pada 1924.

Aktivitas PI senantiasa gencar dilakukan baik oleh mahasiswa ditanah air maupun yang ada dinegeri Belanda. Para mahasiswa ini secara teratur melakukan diskusi dan mengkritik pemerintah Belanda serta menuntut kemerdekaan Indonesia dengan cepat. Propaganda dan seruan PI terhadap organisasi-organisasi yang ada ditanah air mendapat sambutan yang cukup baik dan salah satu diantaranya adalah PKI. Hal revolusioner yang dilakukan PKI adalah pemberontakan di Jawa Barat 1927, PKI juga mengulangi aksinya di Sumatra Barat. Namun aksi ini gagal sehingga mempengaruhi gerakan nasionalis lainnya, selain itu juga mengakibatkan penangkapan para tokoh PI yang ada di Belanda.

2. Partai Komunis Indonesia

Sosialisme dipandang sebagai lambang kemodernan yang akan membawa keadilan sosial, kemakmuran, dan kemerdekaan bangsa terjajah. Tanggung jawab memperkenalkan pikiran dilimpahkan pada sekelompok kecil marxis Belanda yang pada waktu itu organisasi itu adalah Sneevliet, Brandsteder, dan Dekker, sedangkan dari pihak Indonesia yang terkenal adalah Semaun. ISDV berusaha mencari kontak dengan IP dan SI untuk mendekati rakyat tetapi tidak berhasil. Cepatnya peningkatan pengaruh komunis mencerminkan buruknya keadaan ekonomi dan buruknya hubungan antara gerakan politik dan pemerintah Belanda. Revolusi Rusia 1917 mendorong pergerakan Indonesia waktu itu menjadi radikal dan sebagai bukti

bahwa pemogokan yang terjadi setelah tahun 1922 dikendalikan oleh kaum komunis. Radikalisme kaum komunis menyebabkan pemerintah mengusir orang-orang Belanda pendiri ISDV dari Indonesia yang kemudian terjadi peralihan kepemimpinan yang diserahkan kepada orang Indonesia. Pada bulan Mei 1920 organisasi ini diganti namanya menjadi Perserikatan komunis Hindia dan pada tahun 1924 diubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1920 PKI bergabung dengan Comintern (*Communist International*) yang merupakan forum dan pusat eksekutif bagi partai-partai komunis seluruh dunia. Sementara itu juga PKI mendapat kekuatan di kalangan buruh, sebagai akibat dari depresi ekonomi. Namun pada akhirnya, PKI hancur dalam proses perebutan kekuasaan dan pemerintah melakukan penindasan secara besar-besaran.³⁵

3. Partai Nasional Indonesia

Latar belakang didirikannya Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah akibat dari situasi sosio-politik serta pasca dilarangnya kegiatan yang berbau komunis, pada tahun 1927 berdirilah PNI yang dipelopori oleh Soekarno dan mayoritasnya anggotanya berasal dari Algemene Studie Club Bandung yang merasa aspirasinya tidak tersalurkan pada organisasi lain. Tujuan PNI pada waktu adalah mencapai Indonesia merdeka, dengan asas self help atau berdikari, nonkoperasi, serta marhaenisme. Dalam perjuangannya seringkali PNI melalui Soekarno sebagai penarik massa karena kelihaiannya akan berorasi mampu membuat PNI menjadi organisasi yang banyak pengikutnya, selain itu Soekarno pun selalu membuat propaganda yang mampu membakar semangat rakyat seperti perlunya menghilangkan ketergantungan pada

³⁵*Ibid.*, hlm. 41.

pemerintah kolonial, serta perlawanan antara front kulit putih dengan sawo matang. Propaganda yang sering dilancarkan Soekarno membuat pemerintah kolonial khawatir sehingga gubernur jenderal pada sidang Volkraad memberi PNI peringatan agar jangan terlalu radikal, namun pada sekitar tahun 1929 tersebar fitnah bahwa PNI akan memberontak sehingga mengakibatkan penangkapan tokoh-tokohnya. Soekarno sebagai salah satu yang ditangkap menuliskan pembelaannya sehingga dikenal sebagai Indonesia Menggugat. PNI pun akhirnya dibubarkan namun setelah terjadi perpecahan sehingga terbentuklah partai baru Partindo dan PNI baru.³⁶

Tahun 1926 Soekarno menamatkan studinya dari THS. Meski tidak bekerja secara teknis dalam bidangnya, bukan berarti dia vakum dalam mengembangkan ilmu yang dengan susah payah dia dapatkan dari THS. Sukarno tetap memunculkan keberhasilan-keberhasilan dalam pengembangan ilmu arsitektur dan bangunan. Untuk menutupi kebutuhan keluarga, Sukarno bersama-sama Anwari pada 1926 mendirikan biro teknik. Tetapi, biro yang mereka dirikan tidak berhasil dengan baik karena perhatian dan pikiran mereka tertuju dalam bidang politik dalam upaya mencapai kemerdekaan Indonesia. Study club-study club tersebut menguat pada 1926, dan pada saat itu Sukarno menjadi ketuanya. Study club ini menguat dan memunculkan sebuah perkumpulan politik yang kemudian dinamakan partai. Lahirnya PNI dinilai sebagai peningkatan semangat perjuangan kemerdekaan, mengingat beberapa faktor yang mendorongnya. PNI didirikan dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka dengan asas yang dinamakan Marhaneisme, menolong diri sendiri dan non kooperasi. Adapun cara untuk mencapai tujuan tersebut

³⁶*Ibid.*, hlm. 73.

adalah massa aksi nasional yang sadar dan percaya pada kekuatan sendiri. Perjalanan sejarah politik Indonesia di era 1920-an ini tidak lepas dari kekuatan ideologi mahasiswa seperti Hatta, Syahrir, dan generasi seangkatannya yang belajar di Belanda. Sejak tahun 1919 Hatta bersama pelajar lainnya aktif dalam sebuah perkumpulan pelajar yang kemudian berubah menjadi organisasi berhaluan politik PI. Sukarno sendiri begitu aktif mengikuti perkembangan para pemuda yang ada di Belanda. Tidak jarang dia berkorespondensi dengan Hatta untuk saling bertukar pendapat mengenai kegiatan politik mereka. Hal inilah yang kemudian memunculkan ide jauh Sukarno untuk mendirikan PNI.

Pada 24 Mei 1929, PNI mempunyai pimpinan yang terdiri dari Sukarno (ketua), Isqah (Sekertaris), Sartono (Bendahara). Bulan November 1929 yang menjadi pimpinan pusat adalah Sukarno, Gatot Mangkoepraja, Manadi, dan Maskoen. Untuk merealisasikan tujuannya, PNI melakukan berbagai macam upaya. Upaya tersebut dikumandangkan dalam Kongres Pertama di Bandung dan memuat beberapa agenda antara lain³⁷ :

I. Politik

1. Memperkuat perasaan kebangsaan dan perasaan persatuan Indonesia.
2. Menyebarkan pengetahuan dan ilmu tentang sejarah nasional dan memperbaiki hukum nasional.
3. Mempererat perhubungan antar bangsa-bangsa di Asia.
4. Menuntut kemerdekaan diri, kemerdekaan pers, dan kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

³⁷*Ibid.*, hlm 74.

II. Ekonomi

1. Berusaha mencapai perekonomian nasional yang dapat berdiri sendiri.
2. Menyokong perdagangan dan perindustrian nasional.
3. Mendirikan bank nasional dan koperasi-koperasi untuk mencegah riba.

III. Sosial

1. Memajukan pengajaran nasional.
2. Memperbaiki kedudukan perempuan.
3. Memajukan sarakat-sarakat buruh dan tani.
4. Memperbaiki kesehatan rakyat.
5. Menganjurkan monogami (mempunyai hanya seorang istri).

Dalam perkembangannya, terdapat pro dan kontra tentang pertumbuhan PNI, satu pihak memandang PNI cepat berkembang, tetapi banyak pula yang mengatakan bahwa PNI bukanlah partai yang sukses jika dilihat dari kualitas massa. Kalau dicermati secara seksama, tampak bahwa perkembangan PNI jauh lebih lambat dari SI. Bagi Sukarno yang saat itu menjadi ketua partai, persoalan jumlah anggota baginya tidak terlalu penting. Berkat upaya dan perjuangan keras dari Sukarno, PNI mampu tercatat sebagai partai garis depan di era 1920-an. Perjuangan PNI yang semakin subur ternyata mengundang petaka bagi Sukarno. Organisasi yang semakin keras mulai dicium oleh polisi Belanda. Sukarno dan partainya dituduh akan melakuakn revolusi. Dari berita itulah, pada 29 desember 1929 dia dan teman-temannya ditangkap dan dimajukan ke pengadilan. Tuntutan itu didasarkan atas pada pasal 153 bis dan pasal 169 kitab undang-

undang hukum pidana yang oleh masyarakat dikenal dengan sebutan pasal karet. Sukarno dijatuhi hukuman penjara 4 tahun. Secara psikologis, pengakapam Sukarno dan kawan-kawannya menyebabkan matinya perjuangan PNI. Sebagai partai massa, PNI ibarat kehilangan induk dan tersebar tanpa kendali. Meskipun Sukarno telah ditahan, bibit ideologi partainya masih subur dan berkembang. Untuk menghindari intimidasi Belanda, pada 1930 PNI mengadakan rapat (konferensi) luar biasa untuk membahas keberlanjutan. Berdasarkan ketetapan hasil konferensi, PNI dibubarkan, kemudian dibentuk Partindo (Partai Indonesia).

C. Akhir Hindia Belanda dalam masa pergerakan nasional (Peran Fraksi Nasional, Petisi Sutardjo, GAPI)

1. Fraksi Nasional di Volksraad

Volksraad dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916. Untuk melanjutkan perjuangan setelah pimpinan PNI ditangkap dibentuklah fraksi baru dalam volksraad yang bernama Fraksi Nasional yang diketuai oleh Muhammad Husni Tramrin yang beranggotakan 10 orang dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tujuan dari organisasi itu adalah menjamin kemerdekaan Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pengisian jabatan organisasi ini dimulai dari pembentukan Dewan Kabupaten. Susunan dan komposisi yang pertama (1918) beranggotakan 39 orang (termasuk ketua). 15 anggota orang Indonesia, 23 anggota volksraad mewakili golongan Eropa dan golongan Timur Asing. Dan ketua volksraad diangkat oleh putra mahkota negeri Belanda.

Pertama kali ide pembentukan Fraksi Nasional berasal dari Muhammad Husni Thamrin, seorang ketua perkumpulan kaum Betawi. Fraksi Nasional dibentuk di dalam Volksraad pada tanggal 27 Januari 1930 yang letaknya di Jakarta. Anggota Fraksi Nasional terdiri atas sepuluh anggota. Yang mana anggota tersebut merupakan wakil-wakil dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Tujuan pembentukan Fraksi Nasional adalah Kemerdekaan Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan tujuan jalan :

- i. Mengusahakan perubahan-perubahan ketatanegaraan
- ii. Berusaha menghapuskan perbedaan-perbedaan politik, ekonomi dan intelektual sebagai antithese kolonial.
- iii. Mengusahakan kedua hal tersebut atas dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.³⁸

Yang merupakan pendorong dari Fraksi Nasional adalah sebagai berikut :

- a. Sikap pemerintah Belanda terhadap gerakan politik diluar Volksraad khususnya terhadap partai Nasional Indonesia. Tindakan keras Pemerintah Kolonial Belanda lebih menonjol setelah terjadi pemberontakan PKI pada tahun 1926. Para Pergerakan Nasional Indonesia hampir tidak mampu untuk bernapas. Pemberontakan yang sia-sia itu ternyata dijadikan dalih oleh Pemerintah Belanda dalam rangka menciptakan ketertiban umum yang merupakan alasan

38 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia V* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 217.

klise dari penerapan pasal-pasal karet dari KUHP pada saat itu. Di samping itu juga terdapat tindakan-tindakan lain yang dilakukan oleh Pemerintah kolonial khususnya Gubernur Jendral dengan dalih memegang hak istimewa yang tercermin dalam Exarbitante Rechten.

- b. Anggapan dan perlakuan yang sama oleh Pemerintah Belanda terhadap semua gerakan baik yang non maupun kooperasi. Kejadian ini sangat menghalangi penggalangan kekuatan pada organisasi yang moderat. Pada saat terjadi penangkapan terhadap tokoh PNI, ternyata anggota-anggota perkumpulan yang moderatpun juga ikut diinterogasi. Dengan demikian tindakan pengawasan politik tidak pandang bulu. Ini tidak lain suatu pencerminan ketakutan yang amat sangat dari Pemerintah Kolonial Belanda terhadap gerakan-gerakan yang terjadi di Indonesia.
- c. Berdirinya Vaderlandsche Club (VC) pada tahun 1929 sebagai protes terhadap pelaksanaan "etsch belied", Gubernur Jendral de Graef. Tindakan Zentgraaff dengan VC merupakan usaha kearah pengingkaran terhadap Etthishe Koers dari desakan Fraksi Sosial Demokrat (Troelstra dan kawan-kawan) dalam Tweede Kamer Parlemen Belanda. Kelompok VC menjadi pressure groep dalam upaya menekankan tuntutan kaum Pergerakan Nasional, dan itu berarti semakin jauhnya pelaksanaan perubahan Ketatanegaraan yang dikehendaki oleh kaum humanis di negeri Belanda. Tujuan yang ingin dicapai oleh Fraksi Nasional itu adalah menjamin adanya

kemerdekaan Nasional dalam waktu singkat dengan jalan mengusahakan perubahan ketatanegaraan yang merupakan salah satu pelaksanaan Trilogi Van Deventer, berusaha menghilangkan jurang perbedaan warna kulit (Stelsel Kolonial). Tujuan tersebut diusahakan dengan semangat kebangsaan tanpa harus melanggar Hukum Nasional. Perjuangan yang dilaksanakan oleh Fraksi Nasional seperti pembelaan terhadap para pemimpin Partai Nasional Indonesia yang ditangkap kemudian diadili pada tahun 1930. Di samping itu usaha pemborosan dana yang dilakukan oleh Pemerintah kolonial Belanda juga ditentang terutama dalam rangka meningkatkan anggaran pertahanan. Hal ini karena peningkatan anggaran pertahanan merupakan lonceng kematian dari usaha-usaha radikal kaum pergerakan dalam upaya mencapai Indonesia Merdeka.

Adapun susunan pengurus Fraksi Nasional di dewan rakyat adalah sebagai berikut :

1. .Ketua : Muhammad Husni Thamrin
2. Wakil ketua : Kusumo Utoyo
3. Anggota : dwidjosewojo
4. Anggota : datuk Kajo
5. Anggota : Muchtar Prabu Negara
6. Anggota : Cut Nya' Arief
7. Anggota : Pangeran Ali
8. Anggota : Suradi
9. Anggota : Suroso

Kegiatan pertama yang dilakukan oleh fraksi ini adalah pembelaan terhadap pemimpin-pemimpin PNI yang di tangkap di dalam sidang-sidang Volkstraad, Moh. Husni berpendapat bahwa tindakan pengeledahan dan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin PNI oleh pemerintah tidak dapat dipertanggungjawabkan bahkan banyak di antaranya bukan anggota PNI juga di geledah dan dicurigai. Dengan peristiwa ini terbukti bahwa pemerintah dalam tindakannya telah berlaku tidak bijaksana dan tidak adil terhadap pergerakan rakyat Indonesia.³⁹

2. Petisi Sutarjo

Usul yang dicetuskan oleh Soetardjo Kartohadikoesoemo (Soetarjo Kartaningprang) dan beberapa rekannya pada sidang Volksraad bulan Juli 1936. Soetardjo pada saat itu menjabat Ketua Persatuan Pegawai Bestuur/pamongpraja Bumiputra (PPBB). Petisi atau usul tersebut berisi permohonan agar diadakan suatu musyawarah (konferensi) antara wakil-wakil Indonesia dan negara Belanda (Nederland) yang anggota-anggotanya mempunyai hak sama dan sederajat. Tujuan diadakannya konferensi tersebut adalah membicarakan kemungkinan Hindia Belanda (Indonesia) diberi suatu pemerintahan otonom dalam kerangka konstitusi Belanda dalam jangka waktu 10 tahun mendatang. Dalam surat kabar Tjahaja Timoer (3 Agustus 1936) disinggung adanya orang-orang Belanda dari kalangan pemerintah Belanda yang menyetujui Petisi Soetardjo. Tetapi dari

³⁹*Ibid.*,

kalangan masyarakat Belanda banyak yang tidak menyetujui petisi tersebut, seperti golongan Vaderlandse Club yang berpendapat bahwa Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri atau mendapat hak otonomi. Di pihak Indonesia juga timbul sikap pro dan kontra terhadap Petisi Soetardjo.

Saat diperdebatkan kembali dalam Volksraad pada 29 September 1936, petisi ini mendapat 26 suara setuju dan 20 suara menolak. Dengan demikian tanggal 1 Oktober 1936 petisi itu menjadi Petisi Volksraad dan dikirim kepada ratu, staten generaal, dan menteri jajahan di negeri Belanda. Pada Februari 1938, Petisi Sutardjo dibicarakan pula dalam Tweede Kamer Nederland. Menteri jajahan, Welter, sebagai wakil pemerintah Belanda berpendapat bahwa jalan terbaik untuk perubahan pemerintah Hindia Belanda adalah dengan menjalankan asas desentralisasi, yakni dengan meletakkan dasar otonomi pada tingkat bawah (pemerintahan daerah). Setelah mengutarakan pendapatnya itu, Welter mengharapkan agar petisi Sutardjo tidak lagi dipersoalkan atau dibicarakan dalam Tweede Kamer.

Sementara itu Gubernur Jenderal Tjarda yang mengetahui situasi politik di Hindia Belanda, memberi saran kepada Welter agar menolak Petisi Soetardjo. Penolakan petisi tersebut dilakukan dengan alasan petisi tersebut kurang jelas. Di samping itu, mengingat ketidakpastian kejadian-kejadian di masa yang akan datang, konferensi (musyawarah)

sebagaimana diusulkan dalam Petisi Soetardjo tidak perlu diadakan agar tidak ada perubahan mendasar bagi kedudukan Indonesia.

Petisi Sutarjo telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota volksraad. Karena sebagian besar anggota menghendaki kemerdekaan penuh. Petisi Sutarjo diterima volksraad tahun 1936 itu juga, tetapi tuntutananya ditolak

3. Pembentukan GAPI

Penolakan Petisi Sutarjo mendorong partai-partai politik yang ada di Indonesia meningkatkan persatuan dan kesatuan pada bulan Maret 1939. Dengan mendirikan Gabungan Politik Indonesia (GAPI). GAPI juga mempunyai tuntutan, agar di Indonesia dibentuk parlemen sejati. Oleh sebab itu diperlukan wadah baru untuk merapatkan barisan dalam menentang penjajah Belanda. Hal ini ditempuh karena beberapa sebab. *Pertama*, tidak adanya keputusan yang bersifat politik baik dari MIAI sebagai organisasi religius maupun Parindra dari non religius (Kartodirdjo, 1990: 185).⁴⁰ *Kedua*, tersumbatnya Volksraad dalam mengeluarkan aspirasi Bangsa Indonesia melalui kaum pergerakan. Mandegnya fraksi nasional dan ditolaknya Petisi Soetardjo merupakan contoh dari kegagalan ini. *Ketiga*, kegagalan Badan Perantaraan Partai-partai Politik Indonesia (BAPEPPI) dalam melaksanakan programnya. Selain faktor-faktor di atas, hal yang tidak kalah pentingnya adalah

⁴⁰Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme* (Yogyakarta: Ombak: 2014)

situasi internasional pada saat itu. Alasan ini pula yang melatarbelakangi inisiatif Husni Thamrin (Parindra) mengadakan rapat tanggal 19 Maret 1939 untuk mendirikan badan konsentrasi yang baru.⁴¹ Sebagai realisasi dari rapat di atas, maka pada tanggal 21 Mei 1939 diadakan rapat umum yang menghasilkan pembentukan konsentrasi nasional, Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Sesuai dengan anggaran dasarnya tujuan GAPI adalah:

1. Menghimpun organisasi-organisasi politik bangsa Indonesia untuk bekerja bersama-sama.
2. Menyelenggarakan kongres Indonesia.

Pada bagian lain anggaran dasarnya disebutkan, bahwa Gabungan Politik Indonesia berdasarkan kepada beberapa hal berikut.

1. Hak untuk menentukan dan mengurus nasib bangsa sendiri.
2. Persatuan Nasional dari seluruh bangsa Indonesia, dengan berdasar kerakyatan dalam paham politik.
3. Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia.

Sementara itu perpecahan kaum pergerakan tidak menjadi penghalang utama bagi GAPI untuk melakukan aksi-aksinya. Pada rapatnya tanggal 4 Juli 1939 GAPI memutuskan pendirian Kongres Rakyat Indonesia (KRI). Pembentukan kongres ini merupakan pelaksanaan program GAPI. Disamping itu GAPI melakukan aksi Indonesia Berparlemen. Dengan aksi ini diharapkan pemerintah

⁴¹Ayo Budi Santosa dan Encep Supriatna, *op. cit.*, hlm. 94.

Nederland memberi peluang untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat melalui Kongres Rakyat Indonesia. Tujuan ini dikemukakan berhubung dengan timbulnya Perang Dunia II. Bertalian dengan hal di atas, GAPI juga menawarkan hubungan kerja sama Indonesia dengan Belanda, dengan harapan adanya perhatian Belanda terhadap aspirasi rakyat Indonesia. Hal ini untuk merealisasikan keputusan-keputusan konferensi GAPI yang dilangsungkan pada tanggal 19 dan 20 September 1939, antara lain sebagai berikut.

1. Perlunya dibentuk parlemen yang anggota-anggotanya dipilih dari dan oleh rakyat, pemerintah harus bertanggung jawab kepada parlemen itu.
2. Jika keputusan no. 1) dipenuhi, maka GAPI akan memaklumkan kepada rakyat untuk mendukung Belanda.
3. Anggota-anggota GAPI akan bertindak semata-mata dalam ikatan GAPI.⁴²

⁴²A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 1980), hlm. 145.

Bab VI

Organisasi Masyarakat Dan Perempuan Era Pergerakan Nasional

A. Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan di tahun 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan yang mempunyai nama kecil Muhammad Darwis di Yogyakarta. Nama Muhammadiyah dipilih dengan harapan dapat mencontoh segala jejak perjuangan dan pengabdian Nabi Muhammad saw. Sifat gerakan Muhammadiyah adalah ; (1) *tadjudidijah* atau pembaharuan, (2) *islachijah* atau pembangunan, (3) *tabshirijah* atau bimbingan.⁴³ Sifat gerakan pembaharuan yang dijalankan oleh K.H. Ahmad Dahlan disebabkan karena mendapat pengaruh dari pemikiran Muhammad ‘Abduh.

Muhammad ‘Abduh dalam kajian tentang islam melakukan pembaharuan keagamaan dengan lebih menekankan pemikiran kembali aqidah Islam. Pengaruh pemikirannya tersebut disebarluaskan melalui tafsir *al-Manar*⁴⁴, dimana pembaharu menghadapi kepentingan yang

⁴³ Rosihan Anwar, *Pergerakan Islam dan Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: Kartika Tama, 1971), hlm. 53-54

⁴⁴ *Al-Manar* merupakan majalah berhaluan reformis yang ditulis oleh Syaikh Rasyid Ridla. Syaikh Rasyid Ridla adalah murid dari Muhammad ‘Abduh yang mengembangkan pemikirannya dengan menerbitkan tafsir al Qur’an dan majalah *al-Manar* yang kemudian tersebar luas dari Maroko sampai ke pulau Jawa. Sjamsudduha, *Menembus Benteng Tradisi Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004*, (Surabaya : Himah Press, 2005), hlm. 43 dalam H.A.R. Gibb,

telah mengakar dari kalangan pemuja kuburan para wali dan berbagai *thariqat*.⁴⁵ Kehidupan keagamaan yang dijalankan di Indonesia pada masa abad 19 ini juga menjadi latar belakang munculnya ajaran K.H Ahmad Dahlan.

Pada abad 19, sifat keagamaan yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia masih mendapat banyak pengaruh dari ajaran agama Hindu. Ajaran agama Hindu tersebut tetap bertahan hingga agama islam masuk. Salah satu yang masih dilakukan oleh masyarakat yakni pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang, animisme serta dinamisme. Melihat kondisi keagamaan yang seperti itu, K.H. Ahmad Dahlan ingin memurnikan ajaran agama islam berdasarkan Al Qur'an dan Hadits yang ditafsirkan secara mutahir serta mempunyai tujuan untuk dapat mengajarkan agama Islam di antara para anggotanya. Oleh karena itu, Muhammadiyah dianggap sebagai perkumpulan Islam yang modernis.

Pada awal pembentukan, terdapat beberapa pengurus yang terdiri dari : K.H. Ahmad Dahlan, Abdullah Sirad, H. Ahmad, H. Abdurachman, R.H. Sorkawi, H. Muhammad, R.H. Jallani, H. Anis, dan H.M. Fakih. Pada masa ini belum terdapat pembagian pekerjaan dalam tubuh pegurusan Muhammadiyah, sehingga segala pekerjaan seperti *tablig*, pengajian dan kegiatan sosial masih dalam bentuk sukarela. Untuk memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda, K.H. Ahmad Dahlan mengajukan surat permohonan badan hukum pada

Mohammadanism an Historical Survey, (New York: A Mentor Book/ The New American Library, 1953), hlm. 136.

⁴⁵*Ibid.*

tanggal 20 Desember 1912. Permintaan tersebut dikabulkan dengan keluarnya Surat Ketetapan (*Gouverment Besluit*) No. 81 tanggal 22 Agustus 1914.

Sejak dikeluarkannya Surat Ketetapan tersebut, perkembangan Muhammadiyah semakin pesat. Untuk melebarkan kegiatan-kegiatan di luar wilayah Yogyakarta Muhammadiyah merevisi Anggaran Dasar setelah memperoleh konsesi dari pemerintah Hindia Belanda. Keputusan pemerintah Hindia Belanda diumumkan dalam *The Gouvernment Besluiten* No. 40, 16 Agustus 1920 yang memperbolehkan Muhammadiyah melebarkan sayapnya ke seluruh Jawa, dan no. 38 tanggal 2 September 1921 diperbolehkannya mengembangkan Muhammaadiyah ke seluruh Indonesia.⁴⁶ Segera setelah surat keputusan tersebut diumumkan, Muhammadiyah mendirikan beberapa cabang di Surabaya, Madiun, Garut, Kepajen, Kediri, dan Pekalongan.⁴⁷

Pembentukan cabang di berbagai daerah di Indonesia membuat Muhammadiyah semakin berkembang dengan pesat. Hal tersebut terbukti dengan jumlah anggota yang semakin meningkat, seperti pada tabel berikut :

⁴⁶ *Statuten dan Qaidah Muhammadiyah* (Djokdjakarta : Hoofdcomite Congres Moehammadijah, 1935), hlm. 10, 18-19.

⁴⁷ Ahmad Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis Melacak Pndangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*, (Surabaya: LPAM (Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat), hlm. 145.

Jumlah Anggota Muhammadiyah Tahun 1924 – 1935

No.	Tahun	Jumlah Anggota
1.	1924	4.000 anggota
2.	1927	10.308 anggota
3.	1928	17.556 anggota
4.	1935	43.000 anggota

Sumber : Rosihan Anwar, *Pergerakan Islam dan Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: Kartika Tama, 1971), hlm. 55

Walaupun di dalam tabel tidak disajikan jumlah anggota secara runtut namun dapat diketahui bahwa jumlah anggota Muhammadiyah dari tahun 1924 hingga 1935 mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu tujuh tahun antara tahun 1928 hingga 1935 terjadi peningkatan sejumlah 25.444 anggota. Namun peningkatan ini masih sedikit jika dibandingkan pada tahun 1927-1928 yang hanya dalam kurun waktu satu tahun dapat meningkat sejumlah 7.248 anggota. Banyaknya anggota Muhammadiyah membuat rapat-rapat yang diadakan selalu dikunjungi oleh masa yang banyak.

Selain masalah yang berkaitan dengan keagamaan, Muhammadiyah juga memandang penting aspek duniawi. Muhammadiyah meyakini bahwa urusan keagamaan dan dunia merupakan dua aspek yang dibicarakan dalam islam, seperti ayat al Qur'an yang berbunyi "Maka carilah dengan cara yang telah diberikan oleh Tuhanmu, untuk mencapai rumah akhirat, dan janganlah lupa

nasibmu di dunia ini”⁴⁸ Penggunaan ayat ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah selain berkomitmen untuk memperbaiki keagamaan juga meningkatkan derajat anggotanya dalam urusan duniawi. Para anggota diharuskan mengejar duniawi asalkan tidak melupakan hubungan dengan sang pencipta. Pandangan ini yang telah mempengaruhi arah gerakan yang dilakukan Muhammadiyah dalam kehidupan bermasyarakat.

Permasalahan dalam masyarakat yang timbul menurut Muhammadiyah tidak hanya disebabkan oleh penindasan ekonomi terhadap orang miskin tetapi juga kurangnya pendidikan yang berpengaruh besar terhadap posisi subordinat dalam masyarakat. Situasi ini dipandang sebagai faktor yang memunculkan berbagai bentuk aktifitas yang terorganisasi seperti gerakan sosial dan pembaharuan, revolusi dan seruan untuk menegakkan tatanan moral yang baru. Jika organisasi lain memilih strategi revolusioner, Muhammadiyah lebih memilih menggunakan strategi reformis.⁴⁹

Pemilihan strategi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Muhammadiyah tidak ingin terjebak dalam pertengkaran internal dalam hal politik. Muhammadiyah menghargai gerakan-gerakan yang menyukai non-kooperasi politik, karena beranggapan bahwa program pengembangan sosial yang aktif tidak kalah penting untuk perbaikan

⁴⁸Ahmad Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*, (Surabaya : LPAM (Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat), hlm. 112.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 139.

sosial dan ekonomi, meskipun dipandang kurang politis.⁵⁰ Dalam proses pensejahteraan masyarakat, Muhammadiyah memilih pada pengembangan bidang-bidang sosial dan pendidikan. Dalam bidang sosial Muhammadiyah mendirikan rumah yatim piatu, poliklinik, serta rumah sakit dengan dibentuknya Majelis Pimpinan Pengajaran Muhammadiyah pada tanggal 14 Juli 1923 dengan ketuanya M.Ng.Joyosugito yang bertujuan untuk menolong anak-anak terlantar, orang-orang miskin. Balai kesehatan juga banyak didirikan, persatuan juru rawat, pertolongan korban bencana alam, badan pembantu urusan perkawinan dan usaha memperbaiki perjalanan haji, sedangkan dalam bidang pendidikan Muhammadiyah banyak mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah.

Menurut Muhammadiyah, pendidikan merupakan keharusan mutlak bagi orang islam. Pendidikan merupakan alat paling penting untuk membuat masyarakat menyadari bahwa islam adalah agama yang dinamis.⁵¹ Oleh karena itu, Muhammadiyah giat membangun sekolah-sekolah islam bagi murid-murid. Pada mulanya K.H. Ahmad Dahlan mendirikan sekolah rakyat di Kampung Kauman yang terdiri dari murid laki-laki dan perempuan. Pada perkembangan selanjutnya terjadi pemisahan antara murid laki-laki dan perempuan. Murid laki-

⁵⁰Ahmad Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis Melacak Pndangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*, (Surabaya : LPAM (Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat)), hlm 147, dalam *Boeah Congres Moehammadijah Seperempat Abad*, 42.

⁵¹*Ibid.*, hlm 142-143, dalam *Islam Bergerak*, 10 Mei 1928 ditlis oleh Anies H. Fachrodin, hlm, 19.

laki ditempatkan di Standard School Suronatan sedangkan murid perempuan ditempatkan di Sekolah Rakyat Kauman. selain pembangunan sekolah Muhammadiyah juga menerbitkan buku-buku agama, serta tulisan harian dengan nama “Pewartanya Delli”.⁵²

B. Nahdlatul Ulama

N.U (Nahdlatul Ulama) adalah organisasi keagamaan atau jami'iyah diniyah Islamiyah yang didirikan oleh para ulama, pemegang teguh salah satu dari empat madzab berhaluan Ahlusunnah wal jama'ah, yang bertujuan tidak saja mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam tetapi juga memperhatikan masalah sosial ekonomi, dan sebagainya, dalam rangka pengabdian kepada umat.

Lahirnya N.U diawali dengan adanya pertemuan di Taswirul Afkar, Lawang Agung-Ampel-Surabaya, pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1345. Pemberian nama Nahdlatul Ulama mempunyai arti Kebangkitan Ulama, yang merupakan hasil pemikiran Mas H. Alwi Abd. Aziz. Lahirnya Nahdlatul Ulama merupakan kelanjutan dan peningkatan *Comite Hejaz yang* pekerjaannya masih belum selesai namun telah dibubarkan. Oleh karena *Comite Hejaz* dibubarkan sehingga semua beban/tanggungjawab *Comite Hejaz* dilimpahkan pada NU.

Adapun untuk pertama kalinya susunan *Hoofbestuur* (P.B.) adalah sebagai berikut:

⁵² Rosihan Anwar, *Pergerakan Islam dan Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: Kartika Tama, 1971), hlm. 53-54.

ROIS AKBAR : K.H. Hasyim Asy'ari
 WAKILURROIS : K.H. Said bin Saleh
 KATIB AWWAL : K.H. Abd. Wahab Khasbullah
 KATIB TSANI : Mas H. Alwi Abd. Aziz
 A'WAN : 1. K.H. Abd Halim Leuwimunding'
 2. K.H. Ridwan (Pencipta Lambang NU)
 3. K.H. Bisri Sansoeri, Denanyar Jombang
 4. K.H. Said
 5. K.H. Abdullag Ubaid, Surabaya
 6. K.H. Nahrowi Thohir, Malang
 7. K.H. Amin, Surabaya
 8. K.H. Kholil Masyuhi, Seditan-Lasem
 MUTASAYAR : 1.K.H. Asnawi dari Kudus
 2. K.H. Ridwan dari Semarang
 3. K.H. Nawawi dari Sidogiri
 4. K.H. Doro Muntoho dari Bangkalan
 5. K.H. Ahmad Ghonaim Al Misri
 6. K.H. Hambali dari Kudus
 PRESIDEN : H. Hasan Gipo
 PENULIS : M. Sadik alias Sugeng Yudhodhiwiryo
 BENDAHARA : H. Burhan
 KOMISARIS-KOMISARIS : 1. H. Saleh Syamil
 2. H. Ihsan
 3. H. Nawawi

4. H. Dahlan Abd. Qomar

5. Mas Mangun.⁵³

Pemilihan K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rois Akbar dikarenakan, K.H. Hasyim Asyari merupakan pendiri dan pengasuh pondok pesantren Tebuireng di Kabupaten Jombang yang termasuk dalam jajaran pondok pesantren yang mendapat perhatian dari pesantren lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain seorang pendiri dan pengasuh pondok, ia juga seorang ulama besar yang luas pandangan dalam ilmunya sehingga ia termasuk ulama yang disegani oleh ulama-ulama yang lain.⁵⁴

Setelah N.U terbentuk, langkah pertama yang dilakukan oleh P.B adalah menyelesaikan tugas yang dilimpahkan kepada N.U. dari Komite Hejaz. Tugas pertama yang dilakukan adalah dengan menghubungi pimpinan sentral Komite Chilafat di Surabaya yang bertugas menyelenggarakan Kongres Al Islam di Bandung pada bulan pebruari 1926. N.U berkepentingan untuk menghubungi Raja Ibnu Sa'ud dengan mengusulkan agar kaum muslimin yang tidak berfaham wahabi tetap diberi kesempatan untuk beribadah dengan bebas menjalankan agamanya. Program N.U selanjutnya adalah memberi reaksi atas rencana pemerintah Hindia Belanda yang akan menciptakan Undang-undang Perkawinan. Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Belanda berisi mengkombinasikan hukum agama islam dengan hukum-hukum yang

⁵³Maksoem Machfoedz, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama* (Surabaya: Yayasan Kesatuan Ummat, 1982), hlm. 33-34.

⁵⁴Maksoem Machfoedz, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama* (Surabaya: Yayasan Kesatuan Ummat, 1982), hlm. 25.

dibawa Belanda dari Eropa, serta pelimpahan pelaksanaan pembagian waris ke dalam Pengadilan Negeri.⁵⁵ Dalam melakukan perkawinan, tidak hanya melakukan pernikahan berdasarkan agama islam tetapi juga harus dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah. Begitupun dengan peraturan tentang hak waris, harus menyesuaikan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda.

Tidak berapa lama N.U berkembang dengan pesat. Perkembangan N.U dipengaruhi oleh para kyai-kyai yang namanya merupakan jaminan dan dianggap sebagai guru agama yang berbobot, maka dalam waktu yang relatif singkat, perkumpulan N.U telah mendapat sambutan dari para kyai di berbagai daerah tingkat kabupaten. Dalam waktu 4 sampai 5 bulan saja sudah telah terbentuk 35 cabang lebih. Tercatat sebagai cabang pertama adalah Blora, kedua Surabaya, sedang ketiga adalah Jombang, karena cabang tersebut sudah dianggap cukup maka gerakan selanjutnya adalah mengadakan kongres yang pertama di Kota Surabaya pada bulan rabiulawwal 1345 H.⁵⁶

Banyaknya antusiasme dan para pengikut N.U membuat P.B berusaha meningkatkan status N.U agar perkumpulan para ulama ini tidak hanya berupa musyawarah ulama melainkan menjadi sebuah jam'iyah atau organisasi. Maka untuk merealisasikan hal tersebut, dibentuklah *statuten* dan *Huishoudelyk Reglement* (AD dan ART), yang kemudian diajukan kepada pemerintah Hindia Belanda pada

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 34- 36.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 44.

tanggal 5 September 1929.⁵⁷ Setelah AD dan ART dalam tubuh N.U terbentuk, N.U mulai giat menyelenggarakan pendidikan agama, memelihara masjid, rumah yatim piatu serta selalu mengadakan pembahasan hukum agama yang dilakukan oleh para ulama N.U. Kegiatan pembahasan hukum agama islam, berdampak positif dengan selalu dinanti-nantinya hukum agama yang dikeluarkan oleh para ulama. Kegiatan ini menambah minat dan perhatian terhadap N.U menjadi besar dan mendorong perkumpulan N.U. menjadi lebih maju, tertib dan terarah.⁵⁸

Dalam bidang pendidikan, pada tanggal 12 pebruari 1938 atas prakarsa K.H. Abd. Wahid Hasyim selaku Konsulat Jawa Timur diselenggarakan satu Konperensi Daerah Jawa Timur. Dalam Konperensi tersebut menghansilkan keputusan berupan terciptanya rancangan ART (Anggaran rumah Tangga) N.U bagian perguruan yang terdiri dari 11 pasal yang kemudian disahkan oleh Komisi perguruan. Sejak saat itu terjadi perombakan sistem pendidikan di dalam kalangan NU, dengan menjalankan pendidikan formal namun tidak melupakan pengajian sorogan.⁵⁹ Pada tahun yang sama N.U juga terbentuk Muslimat N.U sebagai wadah bagi perempuan N.U. Pada perkembangan selanjutnya organisasi Muslimat ini melahirkan organisasi perempuan lain yakni berdirinya Fatayat N.U pada tahun

⁵⁷Maksoem Machfoedz, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama* (Surabaya: Yayasan Kesatuan Ummat, 1982), hlm. 37

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 46

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 50-51

1950, yang tidak hanya memperkuat ajaran N.U tetapi turut serta berperan dalam perjuangan bangsa dalam menjalankan aktivitas dalam dapur umum, palang merah, kurir penghubung, bergabung dengan pasukan Hizbullah, Sabilillah, serta Markas Ulama.⁶⁰

Dalam tubuh N.U, ulama merupakan tokoh penting yang dapat menggerakkan organisasi ini. Oleh karena itu, N.U selalu mengupayakan terbentuknya ikatan kuat antara ulama yang berpegang kepada empat madzab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi. Berdasarkan keempat madzab tersebut tadi, NU selaku Ahlul Sunnah Wal Jama'ah menyebarkan islam dengan cara yang sah. N.U bukanlah organisasi politik pada awal mula didirikan, namun pada tahun 1966 N.U telah menjelma sebagai suatu partai politik islam terbesar yang jumlah anggotanya lebih dari 15 juta orang.⁶¹

C. MIAI

Adanya beberapa organisasi islam yang terbentuk membuat pihak Hindia Belanda sering melakukan berbagai tekanan. Tekanan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda bertujuan untuk menghancurkan agama islam, karena dianggap musuh Belanda yang dapat menghancurkan posisi Belanda dalam masyarakat. Untuk memecah belah agama islam, segala macam strategi dilancarkan oleh pemerintah Hindia Belanda, salah satunya adalah

⁶⁰Jamhari & Ismatu Ropi, *Citra perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 20-21

⁶¹Rosihan, *op. cit.*, hlm. 57-58.

propaganda dengan membagi islam menjadi dua yakni, islam kolot dan islam modernis. Untuk menghalau timbulnya perpecahan dalam tubuh masyarakat islam, muncul inisiatif dari para ulama untuk membentuk suatu badan yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi islam.

Maka diadakan suatu pertemuan yang diprakarsai oleh Abd. Wahab Khasbullah dengan beberapa tokoh perkumpulan islam. Pertemuan diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 18-21 September 1937 dengan dihadiri oleh tokoh-tokoh modernis yakni K.H. Ahmad Dahlan dan K.H.Mas Mansyur dari Muhammadiyah serta W. Wondoamiseno dari Syarikat Islam. Pertemuan tersebut kemudian membuat satu keputusan untuk mendirikan badan permusyawaratan yang kemudian disebut dengan Al-Majlisatul Islamiyah A'laa Indonesia yang disingkat M.I.A.I dengan anggota pertama, PSII, Muhammadiyah, Al Islam, P.O.I, Al-Irsyad cabang Surabaya, Hidayatullah Islamiyah Banyuwangi, Khairiyah Surabaya, dan N.U. Dalam kongres yang dilakukan, adanya M.I.A.I yang bersifat federasi agar mampu menjadi wadah dari perhimpunan-perhimpunan dan komite-komite islam yang tersebar di seluruh Indonesia.⁶²

Adapun maksud dan tujuan pembentukan MIAI antara lain: 1) menggabungkan segala perhimpunan umat islam Indonesia untuk bekerja bersama-sama, 2) berusaha mengadakan perdamaian apabila ada timbul pertikaian di antara golongan umat islam Indonesia, baik yang telah tergabung di dalam MIAI, maupun yang belum, 3) merapatkan hubungan di antara ummat islam Indonesia dengan umat islam di luar Indonesia, 4) berdaya-upaya untuk keselamatan agama

⁶²Maksoem, *op. cit.*, hlm. 54-46.

islam dan ummatnya, 5) membangunkan Konggres Muslimin Indonesia (K.M.I) sesuai dengan pasal 1 Anggaran Dasar MIAI. Gabungan ahli politik dan tenaga mobil yang tertampung dalam M.I.A.I itu merupakan satuan kekuatan yang sangat mengejutkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda.⁶³

Perkembangan M.I.A.I membuat perkumpulan ini mengadakan konferensi yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1940. Pada pertemuan ini terjadi perombakan Anggaran Dasar M.I.A.I serta pembentukan pimpinan tertinggi dari Dewan yang beranggotakan 5 orang terdiri dari wakil-wakil perhimpunan yang menjadi anggota MIAI. Anggotanya sebagai berikut:

Ketua Dewan : K.H. Abd. Wahid Hasyim, HB N.U
Wakil Ketua Dewan : W. Wondoamiseno, LT PSII
Sekretariat (ketua) : H. Faqih usman, HB. Muhammadiyah
Penulis : S.A. Bahresy, HB. P.A.I
Bendahara : Sastradiwirya dari PERSIS
Anggota : 1. S. Umar Hubeis dari HB. Al Irsyad
2. K.H. mas Mansur dari HB. Muhammadiyah
3. Dr. Sukiman dari HB. P.I.I.⁶⁴

Setelah pemerintah Hindia Belanda digantikan oleh Jepang, M.I.A.I dibubarkan dan diganti dengan Masyumi yang merupakan

⁶³*Ibid.*, hlm. 54-46.

⁶⁴ Maksoem Machfoedz, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*, (Surabaya: Yayasan Kesatuan Ummat, 1982), hlm. 56-57.

prakarsa dari pihak Jepang. Masyumi aktif menggantikan M.I.A.I pada tanggal 1 Desember 1943.⁶⁵

D. Organisasi Perempuan

1. Cikal Bakal Munculnya Organisasi Perempuan

Sejarah pergerakan Indonesia tidak terlepas dari peran serta organisasi perempuan yang ada di Hindia Belanda. Mereka adalah satu kelompok pejuang Indonesia yang memberi kontribusi penting dalam hal pembentukan mental bangsa. Sebelum terbentuk organisasi, perempuan Indonesia melakukan perjuangan secara individual seperti peran-peran yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti Cut Mutia, Cut Nyak Dien, dan Pocut Baren. Mereka para perempuan namun dengan gagah berani melawan pasukan Belanda. Selain di Aceh, di kepulauan Indonesia juga dikenal tokoh-tokoh perempuan seperti peran Matha Chistina Tiahahu yang dalam perjuangannya telah berhasil merebut benteng Belanda Berverwijk di pulau Nusa Laut.⁶⁶

Pada akhir abad ke 19 di Jawa dikenal dua perempuan yang menentang pemerintahan Hindia Belanda yaitu Nyai Ageng Serang atau Raden Ayu Ageng Serang dan Ratnaningsih. Kontribusi Nyai Ageng Serang dapat terlihat ketika perang Diponegoro tahun 1825 menggabungkan diri dengan pasukan tersebut. Peran Ratnaningsih yakni

⁶⁵ B. J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia, 1945-1970*, (Jakarta: Grafiti Press, 1985), hlm 12-14.

⁶⁶ Kowani, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, (Jakarta: -, 1978), hlm. 3- 4.

sebagai pemimpin Laskar Srikandi dalam perang Diponegoro.⁶⁷ Jika pada abad 19 perjuangan perempuan dalam bentuk perjuangan fisik, pada awal abad 20 perjuangan perempuan lebih dititik beratkan pada bentuk perjuangan kaum perempuan agar memperoleh hak-haknya.

Semangat kebangsaan yang tumbuh dan berkembang pada awal abad 20 telah mendorong para elite modern seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, serta Maria Walinda Maramis. Perjuangan R.A. Kartini merupakan pelopor gerakan emansipasi yang menyerukan agar perempuan Indonesia dalam bidang pendidikan. Buah pikiran R.A. Kartini untuk memajukan perempuan Indonesia tertuang dalam kumpulan surat-suratnya “Habis gelap terbitlah terang”. Surat itu ditulis sekitar tahun 1899 yang berisikan kehidupan keluarga adat-istiadat, keterbelakangan perempuan, cita-cita terhadap kebahagiaan bangsanya, dan lain-lain. Bagi R.A. Kartini pendidikan merupakan masalah pokok bagi masyarakat Indonesia.

Pemikiran R.A. Kartini dilatar belakangi dengan kondisi para perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan secara formal. Sekolah-sekolah hanya ditujukan untuk laki-laki. Para perempuan umumnya menikah pada usia muda sehingga para wanita hanya dididik untuk menjadi ibu dan istri yang baik. Dibukanya pendidikan untuk perempuan dengan membuka sekolah Kartini pada tahun 1913, akhirnya berkembang di Jakarta (1913), Madiun (1914), Malang dan

⁶⁷ Hidayat Mukmin, *Beberapa Aspek Perjuangan Wanita Indonesia. Suatu Pendekatan Deskriptif Komparatif*, (Jakarta: Binacipta, 1980), hlm.74-75

Cirebon (1916), pekalongan (1917), Indramayu, Surabaya, Rembang (1918). Selain itu, dibentuk pula sekolah yang dibuka oleh Dewi Sartika di Jawa Barat, Rohana Kudus dan Rahmah El Yunusiyah di Sumatera barat, dan Maria Walanda Maramis di Sulawesi Utara.⁶⁸

Memasuki tahun 1920-an organisasi perempuan semakin dipengaruhi oleh kesadaran dan semangat nasionalisme. Terbukti dengan diadakannya Kongres Perempuan di Yogyakarta pada Desember 1928. Hasil dari pertemuan tersebut menghasilkan Resolusi pertama yang berkaitan dengan pendidikan untuk anak-anak gadis. Dorongan pendidikan untuk perempuan bertujuan untuk mencegah gadis-gadis dipaksa menikah pada usia dini. Jika gadis-gadis mendapat pendidikan yang cukup, mereka akan menyadari tentang keadaan dan lingkungannya. Mereka mempunyai kemampuan untuk mandiri sehingga akan memungkinkan mereka menentukan jalan hidupnya.⁶⁹ Perkawinan menjadi topik pembahasan dalam Konggres perempuan pertama karena perkawinan muda menimbulkan berbagai dampak seperti banyaknya perceraian, poligami serta buruknya kesehatan bagi si ibu dan anak.⁷⁰ Konggres Perempuan Indonesia juga mengusulkan

⁶⁸ Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia V Zaman kebangkitan Nasional dan Masa Republik Indonesia (+1900-1942) edisi Pemutakhiran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 404.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 405- 406.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 407.

mosi kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengeluarkan peraturan atau undang-undang perkawinan.⁷¹

2. Keutamaan Istri

Keutamaan Istri didirikan di Bandung pada tahun 1904 oleh R. Dewi Sartika, yang merupakan Pelopor pendidikan untuk golongan perempuan. Tujuan dari pendirian Keutamaan Istri adalah untuk mengajar anak-anak gadis agar mampu membaca, menulis, berhitung, dan upaya keterampilan kerumah tanggaan agar kelak dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik. Nama sekolah anak-anak remaja putri yang didirikan oleh organisasi perempuan ini adalah sekolah perempuan di Cianjur (1916), Ciamis (1916) serta di Sumedang.

3. Putri Mahardika

Putri Mahardika adalah organisasi keputrian yang merupakan bagian dari Budi Utomo. Putri Mahardika dibentuk pada tahun 1912 di Jakarta. Putri Mahardika di ketuai R.A. Theresia Sabarudin dibantu Sadikun Tondokusumo, R.A. Sutinah Joyopranoto, dan Rr. Rukmini. Tujuan dibentuknya organisasi ini adalah memberi bantuan, bimbingan, dan penerangan kepada para gadis pribumi dalam menuntut pelajaran agar dapat menyatakan pendapat di muka umum. Aktivitas yang dilakukan yakni dalam bentuk memberikan penerangan melalui majalah.

Majalah tersebut bernama Poetri Mahardika, sesuai dengan nama organisasi. Melalui majalah tersebut banyak dikemukakan tulisan-tulisan yang membangkitkan semangat kaum perempuan agar tidak merasa

rendah diri. Di samping itu, dibangkitkan pula kesadaran para perempuan untuk berani bertindak di ranah publik. Organisasi ini juga memberi beasiswa kepada gadis-gadis yang ingin melanjutkan pendidikannya. Organisasi ini kemudian menjadi pelopor muncul organisasi perempuan di berbagai tempat misalnya Pawiyatan Wanito di Magelang (1915), Wanito Hadi di Jepara (1915), dan Purborini di Tegal (1917), dll.⁷²

4. 'Aisyiyah

'Aisyiyah merupakan salah satu organisasi Otonom Muhammadiyah yang merujuk pada nama salah satu istri Nabi Muhammad Saw, yakni Aisyah. Aisyah dikenal sebagai istri Nabi yang paling lama mendampingi Rasulullah, cerdas dan memiliki daya ingat kuat, lincah, sangat dalam pengetahuan agamanya, serta tekun dalam beribadah. Aisyah juga dikenal sebagai perempuan yang telah banyak meriwayatkan Hadits. Nama Aisyah yang disambungkan dengan 'ya' nisbah yang berarti pengikut Aisyah. Penamaan 'Aisyiyah diharapkan organisasi ini dapat terinspirasi dari sifat 'Aisyah melaksanakan dakwah islam dan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat.⁷³

Cikal bakal terbentuknya organisasi ini diawali dengan gagasan K.H. Ahmad Dahlan yang menginginkan agar perempuan muslim selain menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga juga harus faham tugas mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk membentuk pribadi perempuan yang seperti itu, langkah Ahmad Dahlan yang pertama yakni

⁷² Marwati, *op. cit.*, hlm. 412

⁷³ Sjamsudduha, *Menembus Benteng Tradisi Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004*, (Surabaya : Himah Press, 2005), hlm. 283

dengan mengadakan pengajian bagi kaum perempuan dari segala usia di Kampung kauman. Kelompok pengajian perempuan Muhammadiyah ini kemudian dibina untuk membantu tugas-tugas bagian penolong Kesengsaraan Oemat (PKO) Pengurus Besar Muhammadiyah dan diberi nama Sopo Tresno pada tahun 1914.⁷⁴

Pada 22 April 1917, nama Sopo Tresno diganti dengan 'Aisyiyah. Susunan pengurusan pertama organisasi 'Aisyah dipimpin oleh Walidah Ahmad Dahlan, dibantu Siti Badilah (Sekertaris) dan Siti Aminah (bendahara). Perkembangan Aisyiyah diawali dengan keputusan Konggres Muhammadiyah 17 pada 1928 di Yogyakarta yang menetapkan 'Aisyiyah sebagai bagian dari Pengurus Besar Muhammadiyah. Dalam Kongres tersebut diputuskan agar semua cabang Muhammadiyah mendirikan Aisyiyah. Pada tahun 1933 kedudukan Aisyiyah ditingkatkan menjadi Majelis Aisyiyah, dengan proram utama mengadakan kegiatan pengajian, pendirian madrasah dan pengadaan kursus-kursus untuk kaum ibu dan remaja putri. Perkembangan Aisyah yang semakin pesat membuat dikeluarkannya peratutan bahwa Aisyiyah tidak lagi menjadi bagian dari organisasi Muhammadiyah, melainkan menjadi lembaga yang diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangga organisasinya sendiri. Maka Aisyiyah sebagai organisasi otonom memiliki Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dengan berhak menentukan dan menyelenggarakan kegiatan sendiri, sesuai dengan gerak yang digariskan Persyarikatan.⁷⁵

⁷⁴Marwati, *op. cit.*, hlm. 414.

⁷⁵Sjamsudduha, *op. cit.*, hlm. 284-285

Ideologi ‘Aisyiyah dirumuskan setelah Kongres ke-26 “Cabang Muhammadiyah” berupa dua belas aturan untuk perempuan agar taat melaksanakan perintah-perintah Allah. 1) mengurus rumah tangga suami, 2) membahagiakan suami, 3) mematuhi perintah suami, 4) menjaga kesucian dirinya dan menyimpan rahasia rumah tangga, 5) mengasuh anak-anak, 6) membantu suami dalam memimpin anak-anak, 7) menutupi tubuh baik-baik, 8) jangan mengganggu yang tidak patut, 9) jangan bergaul dengan laki-laki yang bukan muhrim, 10) jika perlu pergi, ikutilah petunjuk Dewak tarjih, 11) tinggal di rumah, dan tidak mengenal ajaran islam (jahiliyah), 12) berbuat baik untuk keluarga, orang tua, tetangga dan pembantu.⁷⁶ Para anggota ‘Aisyiyah diperbolehkan mengembangkan diri dengan batasan tidak melanggar ideologi yang telah di rumuskan serta tidak menyimpang dari ideologi Muhammadiyah, sebagai organisasi induknya.

Peningkatan status ‘Aisyiyah membuat organisasi ini semakin berkembang dalam bidang agama, pendidikan dan sosial. Bukti nyata dari perkembangan ‘Aisyiyah dapat dilihat dari berkembangnya anggota ‘Aisyiyah di berbagai wilayah Indonesia, seperti Yogyakarta, Solo, Semarang, Malang, Surabaya, Bandung, Mingkabau, Aceh, Bengkulu, Banjarmasin, dan Makassar.⁷⁷ Realisasi dari bidang pendidikan dan sosial dengan dilakukannya pengajaran di sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah, pertolongan pada anak yatim piatu, fakir miskin, janda yang

⁷⁶Adaby Darban (ed), *‘Aisyiyah dan Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia sebagai Tinjauan Awal*, (Yogyarakt: Eja Publisher, 2010), hlm.46.

⁷⁷Marwati, *op. cit.*, hlm. 81

terlantar, korban bencana alam, dan sebagainya. Melalui pengajian dan pengajaran tentang berbagai keterampilan perempuan, diharapkan kaum perempuan dapat ikut bersama-sama kaum laki-laki membangun masyarakat. Para istri dapat menambah penghasilan keluarga dengan kegiatan perdagangan dan usaha di rumah.

Aisyiyah juga menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi perempuan lain di Hindia Belanda terbukti pada waktu diadakan Konggres Perempuan Indonesia I 1928, 'Aisyiyah ikut aktif di dalamnya,⁷⁸. Selain aktif dalam perkumpulan perempuan 'Aisyiyah juga menerbitkan pers yang terbit pertama kali pada Rabi'ulawal 1345 H atau Oktober 1926 yang berisi tentang laporan kegiatan 'Aisyiyah di setiap cabang.⁷⁹ Adanya pers 'Aisyiyah ini diharapkan dapat mengangkat kemajuan kaum perempuan dalam menyebarkan agama islam, menambah persaudaraan membangkitkan semangat kaum perempuan.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 415

⁷⁹ Adaby darban (ed), 'Aisyiyah dan Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia sebagai Tinjauan Awal, Yogyakarta: Eja Publisher, 2010, Hlm. 59-60

Bab VII

Kolonialisme Jepang Di Indonesia

A. Jepang Mendarat di Indonesia

Indonesia memasuki babak baru penjajahan oleh bangsa lain. Kali ini peran kolonial itu diambil alih oleh Jepang dari Belanda. Terdapat dua tujuan besar Jepang untuk merebut Indonesia dari Belanda. Pertama, mengumpulkan minyak dan karet sebagai bahan baku dalam industri. Kedua, menghimpun kekuatan pasukan dari bangsa Indonesia melalui pembentukan berbagai kelompok militer bagi warga sipil. Kedua usaha itu digunakan untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Rencana kolonisasi disusun pada 4 Oktober 1940, satu tahun sebelum penyerangan Pearl Harbour. Kawat diplomatik disusun dengan judul “Rencana Tentatif bagi Suatu Kebijakan mengenai Daerah-Daerah Selatan” dan dikirimkan secara rahasia kepada mata-mata Jepang yang sudah berada di Indonesia.

Sejak perang Pasifik bergolak, yang ditandai dengan pengeboman Pearl Harbour atas rencana Laksamana Isoroku Yamamoto pada September 1941 dan dieksekusi oleh Laksamana Noichi Nagumo pada 7 Desember 1941, Jepang mulai gencar melakukan propaganda ke negeri-negeri Selatan sebagai penyelamat Asia (dikenal sebagai Gerakan 3A) dari imperialisme Amerika dan Sekutu. Setelah serangan mendadak tersebut, Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt menyatakan perang terhadap Jepang dan diikuti oleh sekutunya, Belanda. Pernyataan perang tersebut diumumkan secara luas oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda,

Tjarda van Starckenborgh, melalui radio NIROM (*Nederland Indische Radio Omroep Maatschappij*) pada 8 Desember 1941 pukul 06.30.⁸⁰

Jepang merespon Hindia Belanda dengan melancarkan serangan udara melalui Davao Filipina dengan menerjunkan 4000 penerbang, 1.500 pesawat dan kapal-kapal induk di Laut Cina Selatan. Pada 10 Januari 1942, serangan pertama difokuskan untuk merebut instalasi minyak. Jepang menyerang Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942 dan berhasil menguasainya pada 12 Januari 1942. Beberapa hari setelah itu, Jepang melancarkan ultimatum kepada KNIL (*Koninklijke Nederlandsch Indische Leger*) agar tidak membumi hanguskan fasilitas pengeboran dan pengolahan Minyak di Balikpapan. Namun, ultimatum tersebut tidak dihiraukan dan berdampak pada pembunuhan 80 anggota KNIL dihadapan rakyat Balikpapan. Setelah Balikpapan berhasil ditaklukan, pasukan Jepang berhasil menaklukan Pontianak pada 29 Januari 1942, Samarinda 3 Pebruari 1942, dan Banjarmasin 10 Pebruari 1942 ditandai dengan direbutnya Lapangan Terbang Samarinda II.⁸¹

Lapangan terbang menjadi target kedua setelah berhasil menguasai instalasi minyak Kalimantan. Berturut-turut kemudian Ambon, Morotai, serta Kendari yang terdapat lapangan terbang utama Belanda berhasil dikuasai. Dengan demikian jalur komunikasi penerbangan antara Belanda dan sekutunya Australia berhasil dipotong sehingga Makassar menjadi mudah untuk ditaklukan.

⁸⁰ Soejono & Leirissa (ed). *Sejarah Nasional Indonesia VI : Edisi Pemutakhiran*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2009), hlm. 2

⁸¹ J.C. Bijkerk, *Selamat Berpisah, Sampai Berjumpa di Saat yang Lebih Baik* (Dokumenter Runtuhnya Pemerintah Hindia Belanda), 1988, hlm. 109 dalam Soejono & Leirissa (ed). *Sejarah Nasional Indonesia VI : Edisi Pemutakhiran*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2009), hlm.

Pasukan Jepang mengirimkan serangan ke Palembang untuk menguasai pusat minyak setelah menaklukkan Singapura pada 16 Pebruari 1942. Sekitar 100 pesawat terbang dikerahkan termasuk pesawat “Lockhead Hudson” milik Inggris yang berhasil dirampas di Malaka. Dikuasainya Palembang menjadi jalan masuk bagi penguasaan Jawa.⁸²

Guna membendung kekuata Jepang, Sekutu kemudian membentuk pasukan gabungan *American British Dutch Australian Command* (ABDACOM) pada 15 Januari 1942. Mereka membangun markas di Lembang, Bandung dibawah komando Marsekal Sir Archibal Wavell dari Inggris.

Pada 27 Pebruari 1942 pasukan ABDACOM berhadapan dengan armada Jepang di Selatan Bawean. Sekutu dibawah komando Laksamana Muda Karel Doorman menggunakan kapal De Ruyter. Kemengan berpihak pada Jepang yang menembak dua kapal perusak Sekutu, *Kortenaer* dan *Electra*. Sisanya kembali ke Surabaya termasuk kapal *Exeter* yang mengalami kerusakan berat dikawal oleh *Witte de With*. Keadaan semakin tidak terkendali. Banyak ranjau laut sekutu terpasang di perairan Tuban. Kapal perusak sekutu *Jupiter* melanggar batas tersebut dan membuatnya tenggelam. Kapal *Houston* dan Perth menyelamatkan diri ke Tanjung Priok atas perintah Doorman karena situasi sudah semakin kacau. Karel Doorman mengubah haluan ke utara dalam jarak 7 km menjauhi perairan Tuban dan berakhir dengan serangan torpedo pimpinan Laksamana Tagaki.

⁸² J.C. Bijkerk, *Selamat Berpisah, Sampai Berjumpa di Saat yang Lebih Baik* (Dokumenter Runtuhnya Pemerintah Hindia Belanda), 1988, hlm. 134-135 dalam Soejono & Leirissa (ed). *Sejarah Nasional Indonesia VI : Edisi Pemutakhiran*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2009), hlm. 4

Kekalahan sekutu di laut Jawa mempermudah pendaratan Jepang ke Jawa. Dibawah Komando Tentara ke-16 (*Osamu Butai*) pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, Jepang menerjunkan divisi ke-2 di Jawa Barat dan Divisi ke-48 di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Serangkaian penerjunan pasukan segera menyusul ke beberapa daerah kantong pertahanan. Satu detasemen dari Divisi ke-38 yang terdiri dari dua batalion infranti dan satu resimen kaveleri, zeni, dan angkatan diterjunkan di Jawa Barat dipimpin Kolonel Shoji. Tiga pasukan infantri, satu batalion perintis, beberapa zeni, kaveleri dan disusul satu brigade pimpinan Sakaguchi menambah daftar penerjunan pasukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur setelah Tarakan, Balikpapan dan Banjarmasin dapat dikuasai.

Menjelang tanggal 1 Maret 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di tiga tempat yakni Teluk Banten, Eretan di Jawa Barat, dan Kragan di Jawa Tengah. Dari Kragan inilah pasukan meyebar ke Semarang, Surabaya dan Cilacap. Pendaratan di Eretan, sebelah barat Cirebon, dipimpin langsung oleh Histoshi Imamura setelah dia berhasil menyelamatkan diri dari serangan kapal *Houston* dan *Perth* yang hendak pergi ke Australia. Eretan menjadi pintu masuk penyerangan Batavia. Akhirnya Belanda tidak dapat memepertahankannya dan Batavia diumumkan sebagai “Kota Terbuka”.⁸³

Dari Batavia mereka bergerak ke Buitenzorg (Bogor). Setelah Bogor berhasil dikuasai, disusunlah strategi penyerangan terhadap kota

⁸³ Soejono & Leirissa (ed). *Sejarah Nasional Indonesia VI : Edisi Pemutakhiran*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2009), hlm. 8

Bandung, basis akhir KNIL. Pada 1 Maret 1942 Kolonel Toshinori Shoji mendaratkan 5000 personil untuk menyerang Subang, 40 km dari Bandung. Target yang direbut adalah lapangan terbang Kalijati. Kalijati berhasil direbut dalam waktu tiga hari dengan kekalahan dua kali dari pihak Belanda yang berakibat jatuhnya ratusan korban jiwa.⁸⁴

Serangan berlanjut menuju Bandung. Pertahanan Ciater dapat dipatahkan pada 6 Maret 1942 dan membuat Belanda mundur ke Lembang. Pada 7 Maret 1942, Jepang berhasil menguasai tempat terakhir pertahanan Belanda. Dengan demikian Jepang semakin mudah menguasai Bandung. Sehari sebelum Lembang takluk, Letnan Jenderal Ter Poorten memerintahkan Panglima KNIL di Jawa Barat, Mayor Jenderal J.J. Pesman yang melarang mengadakan pertempuran di Bandung karena padatnya penduduk sipil, wanita dan anak-anak.

Imamura mengajukan persyaratan untuk menjamin Bandung aman dari perang. Ia mengultimatum penyerahan total pasukan Sekutu di Jawa. Permintaan ini berbeda dengan usulan Kolonel Shoji yang hanya meminta penyerahan lokal di Bandung. Akhirnya Imamura memutuskan untuk mengajukan tuntutan lain yakni Gubernur Jenderal Belanda harus turut dalam sebuah perundingan yang dilaksanakan selambat-lambatnya sehari setelah dikeluarkan pernyataan ini di Kalijati. Belanda memenuhi permintaan Imamura demi menjaga keselamatan Bandung dari pengeboman udara. Dari pihak Belanda

⁸⁴ Djatuhnya Soebang : “Tentara Belanda Menyerang Dua Kali Tapi Tidak Berhasil”. *Asia Raja*, 28 Mei 1942 dalam Soejono & Leirissa (ed). *Sejarah Nasional Indonesia VI : Edisi Pemutakhiran*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2009), hlm. 8

terdapat Gubernur Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh, Panglima KNIL Ter Poorten serta seorang penerjemah.

Pelaksanaan perundingan dimulai pada pukul 17.00 tanggal 8 Maret 1942. Belanda berada di posisi yang kalah dan tidak mempunyai nilai tawar kuat. Tjarda bersikukuh bahwa Bandung sudah menjadi “kota terbuka” sehingga Jepang tidak perlu menyerang penduduk sipil dalam memasukinya. Berbeda dengan pendapat Ter Poorten untuk menerima semua syarat yang diajukan Imamura. Tjarda bersikukuh dengan pendapatnya agar dapat mempertahankan *status quo* nya sebagai pemegang sah kekuasaan Belanda di Hindia. Tjarda kemudian *walk out* dari perjanjian tersebut. Selang sepuluh menit kemudian, tanpa kehadiran Tjarda, Ter Poorten menyetujui peyerahan tanpa syarat Tentara Hindia Belanda kepada Jepang. Keesokan harinya pada pukul 06.30 tanggal 9 Maret 1942 melalui NIROM, Ter Poorten memerintahkan pasukannya tunduk pada Jepang dan menghentikan perang dengan menghubungi komandan Jepang di masing-masing daerah. Penandatanganan pernyataan menyerah berlangsung pada pukul 13.20 oleh Ter Poorten dan Imamura. Satu syarat yang diajukan Ter Poorten adalah agar Jepang merawat korban yang luka dan menguburkan yang gugur. Imamura menyetujuinya dan menyerahkan tugas itu kepada Letnan Jenderal Maruyama.⁸⁵

Di Kutacane, Aceh Selatan pasukan Belanda di bawah Mayor Jenderal Overaker masih bersikeras tidak tunduk pada Jepang. Meskipun demikian, mereka dapat dipukul mundur sampai Sumatra Barat setelah

⁸⁵ Soejono & Leirissa (ed). *Sejarah Nasional Indonesia VI : Edisi Pemutakhiran*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2009), hlm. 12

Jepang mendaratkan pasukan tambahan di Medan. Pasukan Belanda yang masih tersisa di Medan membunuh fasilitas industri agar tidak dapat dimanfaatkan Jepang. Pada 13 Mei 1942 Medan jatuh ke tangan Jepang. Berangsur-angsur kemudian Jepang menguasai Padang, Bukit Tinggi dan terakhir Kutacane pada akhir Maret 1942. Penguasaan Kalimantan, Jawa dan Sumatra memasuki babak baru dalam sejarah kolonialisme dari Imperialisme Belanda ke Jepang.

Upaya sapu bersih pasukan Belanda dan Sekutu menjadi tugas utama Jepang untuk mencengkramkan pengaruh di Indonesia. Upaya itu dilakukan secara berangsur-angsur untuk mempertahankan kelangsungan industri-industri yang telah dibangun oleh orang-orang Eropa. Kecuali warga Jerman yang merupakan sekutu Jepang, orang Eropa menjadi tawanan. Sekitar 170.000 orang yang terdiri dari 65.000 tentara Belanda, 25.000 serdadu sekutu, serta 80.000 warga sipil dikerahkan ke kamp konsentrasi tawanan yang kondisinya sangat buruk. Sekitar 20% tawanan militer, 13% wanita, dan 10% anak-anak meninggal dunia. Di kamp pria 40% tawanan dikabarkan meninggal dunia dan menjadi hal terburuk dalam mengakhiri rezim Eropa di Indonesia.⁸⁶

⁸⁶ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern : 1200-2008*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2010), hlm. 423

Kronologis Peralihan Jepang Masuk ke Indonesia⁸⁷

Tanggal	Peristiwa	Hasil
4 Oktober 1940	Jepang membentuk “Rencana Tentatif bagi Suatu Kebijakan Mengenai Daerah- Daerah Selatan”. Indonesia dianggap sebagai sumber bahan strategis minyak dan karet.	Merencanakan waktu yang tepat dan pemetaan kondisi Indonesia melalui mata-matanya di Indonesia dengan berbagai latar profesi diantaranya <i>Jugun Ianfu</i>
September 1941	Penyusunan rencana serangan ke Amerika oleh Laksamana Isoroku Yamamoto	Dibentuknya pasukan dan susunan penyerangan dari kepulauan Kuril
26 Nopember 1941	Laksamana Noichi Nagumo diangkat sebagai panglima operasi	Pengerahan kapal perang (induk, selam dan tanker) menyeberangi lautan Pasifik dan sampai pada jarak 700 mil utara Pulau Oahu, Hawaii

⁸⁷ Soejono & Leirissa (ed). *Sejarah Nasional Indonesia VI : Edisi Pemutakhiran*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2009)

Tanggal	Peristiwa	Hasil
2 Desember 1941	Telegram intruksi serangan diterima oleh Nagumo dari Yamamoto	Penetapan tanggal perang dan persiapan perang
7 Desember 1941	Perang dimulai	Armada Nagumo
- 07.45	- Serangan pertama	menyerbu Pearl Harbour dari udara.
- Sekitar 09.00	- Serangan kedua	- 183 pesawat pengebom didatangkan dari kapal induk Jepang menyerah kapal perang Amerika.
- 10.00	- Serangan berakhir	- 170 pesawat pengebom dikerahkan lagi menarget instalasi bahan bakar dan gudang
		- 86 pesawat terbang Angkatan Darat dan 97 pesawat terbang Angkatan Laut di

Tanggal	Peristiwa	Hasil
<p>- Sekitar 15.00</p>	<p>- Presiden AS Franklin Delano Roosevelt menyatakan perang terhadap Jepang</p>	<p>lapangan terbang Hickam dan Wheeler hancur, 19 dari 86 kapal rusak. 2.117 tewas, 876 luka dan 960 hilang dari Angkatan Laut. 49 tewas dan 396 luka dari Angkatan Darat. Jepang hanya kehilangan 29 dari 353 pesawat, 55 pilot dan 6 kapal selam mini (<i>midget</i>)</p> <p>- Pernyataan Roosevelt sekaligus seruan perang bersama sekutu melawan Jepang, termasuk Pemerintah Belanda di Indonesia</p>
<p>8 Desember 1941 - 06.30</p>	<p>Gubernur Jenderal Hindia Belanda</p>	<p>Jepang mulai menyusun strategi penyerangan dari</p>

Tanggal	Peristiwa	Hasil
	Tjarda van Starkenborgh mengumumkan perang melalui NIROM	Davao (Filipina) dan kapal-kapal induknya di Laut Cina Selatan untuk menyerang Malaya dan Hindia Belanda. Terdapat 700 pesawat termasuk jenis “Zeke” dan 4000 penerbang gabungan dari angkatan Darat dan Laut. Belanda hanya memiliki 132 pesawat yang meliputi 48 pesawat pemburu, 10 pengintai taktis dan cadangan 14 Glen Martin serta 60 pemburu.
10 Januari 1942	Serangan pertama dari Davao	Jepang menarget pangkalan Minyak di Tarakan, Kalimantan Timur
11 Januari 1942	Jepang mendarat pertama kali ke Tarakan	Sehari pertempuran, pasukan Belanda di Tarakan menyerah

B. Struktur Pemerintahan Zaman Jepang

Berakhirnya pemerintah Hindia Belanda dan digantikan oleh Pemerintahan Dai Nippon, memberi pengetahuan baru bagi rakyat Indonesia untuk belajar revolusi kelak di akhir rezim seumur jagung ini. Selama pemerintah Hindia Belanda berlangsung, perlawanan rakyat tidak begitu berarti untuk memerangi kekuasaan Belanda. Jepang telah memberi sumbangan secara langsung dalam mendoktrinasi, melatih, dan mempersenjatai generasi muda serta memperdayakan generasi tua untuk terlibat langsung memimpin rakyat. Cara ini dipakai untuk mempolitisasi bangsa Indonesia hingga tingkat terkecil dalam suatu desa. Jepang memiliki tujuan agar rakyat Indonesia ikut memenangkan Perang Asia Timur Raya dengan dalih membentuk “Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”.⁸⁸ Jepang praktis menjadi penguasa baru Indonesia menggantikan Hindia Belanda melalui penyerahan tanpa syarat Ter Poorten atas nama Angkatan Serikat di Indonesia kepada Hitoshi Imamura pada tanggal 8 Maret 1942.

Transisi dari Hindia Belanda ke Jepang melalui pemerintahan sementara diatur sesuai peraturan dalam *Osamu Seirei* yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16 tanggal 7 Maret 1942. Undang-undang ini berisi perintah pengamanan wilayah yang diduduki dengan membentuk pemerintahan sementara (pasal 1), penunjukan para pembesar tentara sebagai pemegang kekuasaan militer tertinggi

⁸⁸ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern : 1200-2008*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2010), hlm. 421

sekaligus pengganti Gubernur Jenderal (pasal 2), pengesahan badan dan aturan pemerintah Hindia Belanda yang tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang (pasal 3), serta penghormatan bala tentara atas kedudukan dan kekuasaan pegawai yang setia terhadap Jepang (pasal 4).⁸⁹

Kekuasaan militer Jepang membagi Indonesia menjadi tiga wilayah kolonial. Singapura menjadi pusat komando bagi angkatan darat yang menguasai Sumatra dan Jawa yakni Angkatan Darat ke-7. Sumatra di bawah kuasa Angkatan Darat ke-25, Jawa dan Madura oleh Angkatan Darat ke-16, serta Kalimantan dan Indonesia Timur di bawah komando Angkatan Laut. Pusat Pemerintahan Jepang di Jawa dan Madura berada di Jakarta, Sumatra di Bukittinggi, dan Indonesia Timur meliputi Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku berada di Makassar.

Dalam hal karakter pemerintahan, Jepang memetakan tiga wilayah besar tersebut sesuai potensi yang ada. Jawa dianggap menyediakan sumber daya manusia yang besar, namun potensi sumber daya strategis yang tidak begitu penting. Sehingga kebijakan politik Jepang untuk mengerahkan masa lebih ditonjolkan melalui latihan-latihan militer yang masif. Maka kecanggihan politik di Jawa lebih maju dibanding dua tempat lain. Sumatra memiliki potensi sumber-sumber startegis yang kaya baik alam maupun manusianya. Tetapi, ide nasionalis baru boleh muncul di sini ketika Jepang mulai diambang kekalahan. Ini menyangkut penguasaan secara langsung instalasi

⁸⁹ Soejono & Leirissa (ed). *Sejarah Nasional Indonesia VI : Edisi Pemutakhiran*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2009), hlm. 14

minyak dan karet di daerah itu. Kalimantan dan Indonesia Timur hanya dipandang penting bagi sumber daya ekonomi. Masyarakat yang terbelakang tidak begitu berarti bagi tujuan Jepang. Maka pemerintahan di wilayah ini sangat kejam dan menindas.⁹⁰

Struktur pemerintahan sementara Jepang terdiri atas : *Gunshireikan* (panglima tentara) sekaligus sebagai *Saiko Shikikan* (panglima tertinggi), di bawahnya terdapat *Gunseikan* (kepala pemerintahan militer) yang bertugas menetapkan peraturan-peraturan (*Osamu Kanrei*). *Osamu Kanrei* diumumkan melalui *Kan Po* (berita pemerintah) yang diterbitkan oleh *Gunseikanbu* (staf pemerintah militer pusat).⁹¹

Di Jawa, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura menjadi *Gunshireikan*, kepala staf dijabat oleh Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki dan otomatis menjadi *Gunseikan*. Terdapat lima departemen dalam *Gunseikanbu* yakni :

1. *Somubu* (Departemen Urusan Umum)
2. *Zaimubu* (Departement Keuangan)
3. *Sangyobu* (Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan)
4. *Kotsubu* (Departemen Lalu Lintas)
5. *Shihobu* (Departemen Kehakiman)

⁹⁰ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern : 1200-2008*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2010), hlm. 422

⁹¹ Soejono & Leirissa (ed). *Sejarah Nasional Indonesia VI : Edisi Pemutakhiran*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2009), hlm. 15

Di setiap wilayah dibentuk *gunseibu* sebagai koordinator pemerintah setingkat *Provinciaal*. Bandung menjadi pusat *gunseibu* di Jawa Barat, Semarang di Jawa Tengah, serta Surabaya di Jawa Timur. Selain itu dua daerah Istimewa tetap dipertahankan, melanjutkan tradisi Pemerintahan Hindia Belanda dengan hanya mengubah namanya menjadi *koci* yakni Surakarta dan Yogyakarta.

Pegawai pemerintah diambilkan dari rakyat Indonesia yang setia terhadap Jepang. Hanya posisi strategis dan tertinggi di setiap hierarki pemerintah dipegang oleh orang Jepang sendiri. Mereka diambil dari orang-orang setempat yang telah berpengalaman seperti para *uleebalang* di Aceh, priyayi di Jawa, para raja di Sumatra Timur, dan para *penghulu* di Minangkabau serta di daerah lain yang serupa.⁹²

Kedatangan tenaga pemerintahan sipil dari Jepang menandai berakhirnya pemerintahan sementara oleh militer pada bulan Agustus 1942. Keputusan ini termaktub dalam Undang-Undang No.27 tentang peraturan pemerintah daerah dan disusul Undang-Undang No.28 tentang aturan pemerintahan *syu* dan *Tokubetsu Syi*.⁹³

Sesuai UU No. 27, kecuali *koci* Yogyakarta dan Surakarta, Pulau Jawa dan Madura dibagi atas daerah :

⁹² Lihat pengangkatan beberapa residen di Jawa yang hampir seluruhnya bergelar Raden yang menunjukkan kelompok priyayi Jawa pada 29 April 1942 dalam Soejono & Leirissa (ed). *Sejarah Nasional Indonesia VI : Edisi Pemutakhiran*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2009), hlm. 17

⁹³ *Pembangunan*, 16 Maret 1942; *Pandji Poesaka*, no.2, 18 April 1942 dalam Soejono & Leirissa (ed). *Sejarah Nasional Indonesia VI : Edisi Pemutakhiran*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2009), hlm. 19

1. *Syu* setingkat karesidenan, terdiri dari daerah *syi* dan *ken*, dipimpin oleh *syucokan*
2. *Syi* setingkat *stadsgemeente* (kotapraja), dipimpin oleh *syico*
3. *Ken* setingkat kabupaten, dipimpin oleh *kenco*
4. *Gun* setingkat *distric* atau kawedanan, dipimpin oleh *gunco*
5. *Son* setingkat *onderdistric* atau kecamatan, dipimpin oleh *sonco*
6. *Ku* setingkat kelurahan atau desa, dipimpin oleh *kuco*

Pada 8 Agustus 1942, *syu* ditetapkan menggantikan provinsi ketika Hindia Belanda dan memiliki hak otonomi sebagai hirarki tertinggi pemerintah daerah. Terdapat 17 *syu* di Jawa yakni Banten, Batavia, Bogor, Priangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati, Kedu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki, dan Madura.⁹⁴

Pada bulan September 1942, *Syucokan* resmi dilantik oleh *Gunseikan* sebagai upaya Jepang mengganti kepemimpinan strategis yang dijabat bangsa Indonesia ketika pemerintahan sementara. Seperti penggantian H. Dahlan Abdullah selaku kepala pemerintahan kota praja Batavia yang digantikan oleh seorang pejabat Jepang sebagai Batavia *Tokubetsu Syico* (wali kota istimewa Batavia). Tugas *Syucokan* dibantu oleh *cokan kanbo* (majelis permusyawaratan *cokan*) yang mempunyai terdiri dari tiga bagian yakni :

⁹⁴ Harry J. Benda, Icikara, Koichi Kishi, *Japanese Military Administration in Indonesia*, 1956, hlm. 66 dalam Soejono & Leirissa (ed). *Sejarah Nasional Indonesia VI : Edisi Pemutakhiran*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2009), hlm. 19

1. *Naiseibu* (urusan pemerintahan umum)
2. *Keizabu* (urusan ekonomi)
3. *Keisatsubu* (urusan kepolisian)

Pemerintah Jepang di Sumatra tetap memberlakukan Gubernur untuk mengkoordinir beberapa *syu* yakni Gubernur Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Tenggara. *Syu* terdiri atas *bunsyu* (sub-karesidenan), *gun* dan *son*. 10 *syu* tersebut meliputi Aceh, Sumatra Timur, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung, Bangka, dan Belitung. Pusat koordinasi Sumatra berada di Shonanto (Singapura) bersama jajahan Malaya, bukan lagi di Jawa. Pada pertengahan tahun 1943 *Gunseikanbu* baru dibentuk dan dijabat oleh Panglima Tentara ke-25. Pusat koordinasi berada di Bukittinggi, Sumatra Barat.

Gunseikanbu di Sumatra terdiri dari beberapa departemen yakni Departemen Dalam Negeri, Departemen Kepolisian, Departemen Kehakiman, Departemen Industri, Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Penerangan, Departemen Perindustrian dan Pengiriman, dan Departemen Meteorologi. *Syu* dibantu oleh *Naiseibu* (Departemen Dalam Negeri), *Keisatsubu* (Departemen Kepolisian), dan *Kesaibu* (Departemen Sosial).⁹⁵

Pemerintah Jepang di Indonesia Timur yang berpusat di Makasar dibawah komando Angkatan Laut membentuk semacam *gunsei* yakni

⁹⁵ Soejono & Leirissa (ed). *Sejarah Nasional Indonesia VI : Edisi Pemutakhiran*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2009), hlm. 21

Minseifu. Di dalamnya terdapat beberapa departemen yakni Departemen Pekerjaan Umum yang dijabat oleh Angkatan Laut, Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman, Departemen Perhubungan, Departemen Kesehatan Masyarakat, dan Departemen Industri dijabat dari kalangan sipil. *Meinsifu* membuka perwakilannya di Kalimantan, Sulawesi dan Seram (kemudian pindah ke Sunda Kecil).

Hubungan antara Angkatan Darat dengan Angkatan Laut kurang harmonis dikarenakan kurangnya koordinasi. Terlihat dalam rencana pembukaan kantor penghubung Angkatan Laut (*Bukanfu*) di Jakarta pada bulan April 1942. Pada awalnya tidak disetujui oleh Angkatan Darat dengan alasan sudah ada Detasemen Angkatan Laut di Tanjung Priok dan Surabaya. Angkatan Laut memiliki alasan agar terjaminnya suplai bahan strategis untuk keperluan keduanya, maka *Bukanfu* dapat dibuka di Jakarta. *Bukanfu* dikepalai oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda yang telah lama menjalin hubungan baik dengan para pemimpin nasionalis Indonesia sejak sebelum perang.⁹⁶

Ketika sekutu di Pasifik semakin ofensif, Perdana Menteri Tojo berpidato di depan Sidang Parlemen ke-82 Tokyo tanggal 16 Juni 1943 untuk memberikan kesempatan kepada orang Indonesia dalam menduduki jabatan pemerintahan yang strategis. Pidato tersebut disambut dengan diumumkannya *Saiko Shikikan* yang berisi

⁹⁶ *Ibid.*, 22

pembentukan badan pertimbangan dan pemberian jabatan tinggi orang Indonesia sebagai penasihat pemerintah.

Pelibatan orang Indonesia ke dalam struktur pemerintahan merupakan saluran mobilisasi massa yang menemukan momentum. Pengangkatan Prof. Dr, Hoesein Djajadiningrat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama pada 1 Oktober 1943 sebagai awal dilaksanakannya *Saiko Shikikan*. Kemudian pengangkatan *Syucokan*, kepala departemen dalam penasehat militer, dan pembentukan *Chuo Sangi In* (Badan Pertimbangan Pusat). Diantara *sanyo* yang mengepalai *bu* (departemen) adalah Ir. Soekarno untuk *Somubu* (Urusan Umum), Supomo untuk *Shihobu* (Kehakiman) dan Muh. Yamin untuk *Sendenbu* (Propaganda).

Chuo Sangi In memiliki kemiripan dengan *volksraad* bertugas memberi masukan kepada pemerintah tentang tindakan apa yang paling tepat untuk rakyat Indonesia. Organisasi ini memiliki 43 anggota yang terdiri dari perwakilan *syu*, Jakarta *Tokubetsu Syi* dan *Koci* Yogyakarta dan Surakarta. Soekarno dilantik sebagai ketua *Chuo Sangi In* pada 17 Oktober 1943 dengan 2 wakil ketua yakni R.M.A.A. Kusumo Utojo dan dr. Buntaran Martoatmodjo.

Dalam perjalanannya, *Chuo Sangi In* dimanfaatkan oleh para nasionalis sebagai saluran menyuarakan kemerdekaan, keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Sidang pertama sampai ke empat, banyak mendapat kritikan keras dari Jepang karena anggota-anggota *Chou Sangi In* lebih mementingkan rakyat dari pada mendukung

kemenangan Jepang. Soekarno dan kawan-kawannya membentuk panitia Istimewa untuk mencari jalan keluar guna memudahkan penyerahan dan memepertahankan stok di daerah dengan seadil-adilnya. Pernyataan itu dikritik oleh *somubuco* bahwa mereka bersifat kekanak-kanakan dan tidak dapat merasakan kegentingan Jawa.⁹⁷

Sikap Jepang mulai melunak kala Jepang mulai mengalami beberapa kekalahan dalam perang Pasifik. Mulai sidang ke delapan, *Chou Sangi In* mulai mengarahkan pembahasan pada persiapan kemerdekaan bagi negara baru. *Chou Sangi In* baru juga dibentuk di Sumatra pada 26 Juni 1945. Pembentukan ini sedikit terlambat mengingat *Chou Sangi In* di Jawa hampir menyelesaikan tugasnya sebagai BPUPKI (Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang berdiri setelah Perdana Menteri Koiso mengucapkan janji kemerdekaan untuk seluruh Indonesia pada 7 September 1944. Kemudian BPUPKI membentuk PPKI pada 28 Juli 1945 meskipun *Chou Sangi In* berakhir tanpa pembubaran resmi.⁹⁸

C. Sikap Tokoh Pergerakan Indonesia Terhadap Jepang

Hubungan Jepang dan tokoh nasionalis telah terjalin sebelum perang Pasifik berkecamuk. Ketika tahun 1933 Gatot Mangkupraja dan Moh. Hatta berkunjung ke Jepang, ia melihat gerakan Asianya yang mendukung pergerakan nasional Indonesia. Namun Hatta menilai fasisme

⁹⁷ Soejono & Leirissa (ed). *Sejarah Nasional Indonesia VI : Edisi Pemutakhiran*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2009), hlm. 25

⁹⁸ *Ibid.*, 26

Jepang meskipun dengan janji manis tidak akan menentukan nasib sendiri dan merupakan ancaman imperialis yang hebat bagi kemerdekaan Indonesia.⁹⁹ Namun demikian Jepang tidak mengecam Jepang karena tujuannya yang juga mengusir pihak Barat dari Asia.

Hatta dan Soekarno berkeyakinan pada janji yang telah dilontarkan Jepang untuk mendukung kemerdekaan Indonesia dan pemerintah yang mandiri. Faktor lain adalah bantuan Jepang sebagai negara yang kuat diperlukan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Geliat ini timbul diakibatkan karena sakit hati wakil Indonesia yang menagih janji Belanda mengadakan konferensi Indonesia-Belanda untuk menyusun rencana pemerintah sendiri bagi bangsa Indonesia sesudah 10 tahun di bawah Pemerintah Belanda melalui Petisi Soetardjo. Belanda juga menolak GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang berslogan “Indonesia Berparlemen”.

Sebagian tokoh nasionalis percaya betul dengan janji Jepang untuk membebaskan sekalian bangsa Asia dari dominasi negara Barat. Tokoh nasionalis itu diantaranya Soekarno, Yamin, Sartono, Buntaran Martoatmodjo, Sam Ratu Langie, dan Otto Iskandar Dinata disusul beberapa anggota *volksraad* diantaranya Sutardjo Kartohadikusumo, Samsudin, dan Muchtar. Namun diantara para tokoh nasionalis ada yang menolak untuk bekerjasama yakni Sutan Sjahrir dan dr. Tjipto Mangunkusumo. Malahan dr. Tjipto mendukung Belanda karena sebagai balas jasa Barat yang telah mendidik Indonesia menjadi bangsa yang melek pengetahuan.

⁹⁹ *Pemandangan*, 22 dan 23 Desember 1941

Beberapa kerjasama dilakukan oleh Jepang melalui para nasionalis yang percaya terhadapnya dengan semboyan 3 A (Jepang Cahaya Asia, Pelindung Asia dan Pemimpin Asia). *Sendenbu* (propaganda) diketuai oleh tokoh Parindra, Mr. Samsuddin dibantu Sutan K. Pamuntjak dan Mohammad Saleh. Gerakan 3 A hanya berumur beberapa bulan dan dibubarkan pada Desember 1942.

D. Pendidikan dan Budaya Zaman Jepang

Pemerintahan Jepang memiliki dua prioritas kebijakan bagi Indonesia. *Pertama*, menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia. *Kedua*, memobilisasi rakyat demi kemenangan Jepang di Perang Asia Timur Raya.

Gerakan memobilisasi rakyat massa mulai gencar dilakukan ada awal 1943 dengan dibentuknya latihan-latihan militer. Seinendan (korps pemuda berumur 14-25 tahun), Keibodan (korps kewaspadaan) dan Heiho (korps pembantu) digalakkan. Sekitar 25.000 pemuda bergabung dalam Heiho dan sekitar 60% pemuda Indonesia telah tergabung di dalam Keibodan.

Jepang juga memanfaatkan saluran agama untuk memobilisasi massa dengan membentuk MIAI. Selain itu merek juga mengundang tokoh-tokoh agama untuk menduduki jabatan penting Urusan Agama untuk penasehat Pemerintah. Penggunaan Bahasa Inggris dan Belanda dilarang oleh Jepang dan digalakkannya penggunaan bahasa Indonesia. Justru penggunaan bahasa Asia lain seperti Arab dan Jepang sendiri gencar dilakukan di pesantren-pesantren dan sekolah Islam.

Pada bulan Oktober, Jepang juga membentuk PETA (Pembela Tanah Air) yang berjumlah 37.000 orang di Jawa, 1.600 orang di Bali dan sekitar 2.000 orang di Sumatera. PETA ditugaskan sebagai pasukan gerilya.

E. Perumusan Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945 dalam BPUPKI

Dibentuknya BPUPKI merupakan langkah kongkrit pertama bagi pelaksanaan janji perdana menteri Koso tentang kemerdekaan Indonesia kelak di kemudian hari. Maksud didirikannya badan ini adalah untuk menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan Negara Indonesia merdeka. Badan ini diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 bertempat di Gedung Chuo Sang In, di Pejambon. Sebelumnya dibentuk suatu panitia kecil berjumlah delapan orang dibawah pimpinan Ir. Soekarno, R.Otto Iskandar Dinata menjadi anggota panitia kecil ini bersama-sama dengan Drs. Moh Hatta, Soetardjo Hadikoesoemo, Moeh. Jamin, dan A.A Maramis. Kemudian panitia kecil ini melakukan pertemuan dengan anggota-anggota BPUPKI yang kemudian melahirkan panitia sembilan. Panitia ini merumuskan maksud dan bentuk negara yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta dan Pancasila yang nantinya akan disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945.

Bab VIII

Peristiwa Di Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

A. Kekalahan Jepang dalam PD II

Perang Dunia II terjadi setelah Jepang membombardir Pearl Harbour pada 7 Desember 1941. Hancurnya Pearl Harbour, ternyata memudahkan Jepang untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu membentuk Persekemakmuran Asia Timur Raya. Daerah-daerah di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia berhasil diduduki oleh Jepang. Pembentukan Persekemakmuran Asia Timur Raya berhasil diwujudkan, meskipun hanya untuk sementara.

Serangan Jepang ke Indonesia (Hindia Belanda) pertama-tama terjadi 11 Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan (Kalimantan Timur). Balikpapan yang merupakan daerah yang kaya akan minyak bumi, jatuh ketangan Jepang 24 Januari 1942, disusul kemudian Pontianak 29 Januari 1942, Samarinda 3 Pebruari 1942, Banjarmasin 10 Pebruari 1942.

Dalam perkembangannya, Jepang mulai mengalami kesulitan, terutama setelah Amerika Serikat menarik sebagian pasukannya dari Eropa. Pada bulan Mei 1942, serangan Jepang terhadap Australia dapat dihentikan karena tentara Jepang menderita kekalahan dalam pertempuran Laut Koral (Karang). Serangan Jepang terhadap Hawaii juga dapat digagalkan oleh tentara Amerika Serikat dalam pertempuran di Midway pada bulan Juni 1942. Kekalahan Jepang

terhadap Sekutu, dengan ditanda tangannya perjanjian Post Dam, maka secara resmi Jepang menyerahkan kekuasaan pada Sekutu. Dengan demikian di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kesempatan ini oleh bangsa Indonesia dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tidak lama setelah serbuan bala tentara Jepang secara mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour pada tanggal 8 Desember 1941, Amerika Serikat seakan-akan lumpuh. Dalam kenyataannya Jepang tidak dapat melumpuhkan Amerika Serikat, bahkan Amerika bangkit dan menjadi musuh yang paling berat bagi Jepang.

Melihat fenomena ini muncul pertanyaan apakah serangan Jepang terhadap Pearl Harbour itu bukan langkah yang keliru (Lihat Onghokham, 1989: 163). Lebih-lebih setelah lima bulan Perang Asia Timur Raya berkorbar, Amerika Serikat telah dapat memukul balik Jepang. Dalam perang laut Karang (4 Mei 1942) dan disusul dengan perang di Guadacanal (6 Nopember 1942), Jepang secara berturut-turut menderita kekalahan. Kekalahan yang paling besar dialami Jepang dalam pertempuran laut di dekat Kepulauan Bismarck (1 Maret 1943). Untuk mengakhiri peperangan ini, maka pada tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom yang pertama di atas kota Hiroshima. Tiga hari kemudian, tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan lagi di atas Nagasaki. Akibatnya bukan saja membawa kerugian material, karena hancurnya kedua kota tersebut dan banyaknya penduduk yang menemui ajalnya. Tetapi secara politis telah mempersulit kedudukan Kaisar Hirohito, karena harus dapat

menghentikan peperangan secepatnya guna menghindari adanya korban yang lebih banyak lagi. Hal ini berarti bahwa Jepang harus secepatnya menyerah kepada Sekutu atau Serikat. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945.

B. Pemuda Dan Peristiwa Rengasdengklok

Perbedaan pendapat terjadi antara golongan tua dan golongan terjadi sebelum dan menjelang proklamasi. Golongan muda, menginginkan proklamasi dilaksanakan secara revolusioner. Oleh karenanya, mereka membawa Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok untuk menandatangani Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Memang kelompok Sukarni berhasil mengkoordinasikan kelompok Syahrir dan kelompok pelajar mahasiswa, tetapi Syahrir bersikap apatis terhadap proklamasi karena menganggap gerakan Sukarni menuju ke arah anarkis. Penculikan Sukarno-Hatta itu merupakan realitas dan kesalahan perhitungan politik yang hanya berdasar sentimen.

C. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang mengalami pemboman di Hiroshima dan Nagasaki, tak ada pilihan lain selain menyerah ke Sekutu. Karena Sekutu belum datang menerima penyerahan itu, terjadi kevakuman kekuasaan di Indonesia. Inilah kesempatan yang dimanfaatkan oleh pejuang kita, akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 Negara Indonesia merdeka diproklamasikan. Sebuah pemerintahan yang baru itu memerlukan seorang presiden sebagai pemimpin negara ini. Untuk itu PPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, dipimpin oleh Ir. Soekarno. Dalam sidang ini diputuskan hal

penting, yaitu pengesahan UUD 45, pemilihan presiden dan wakil presiden. Pengusulan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Sidang PPKI yang pertama dilangsungkan pada hari Sabtu, 19 Agustus 1945, di Gedung Chuo-Sangi-in, pukul 11.30 waktu Nippon (pukul 10.00 waktu Jawa). Anggota yang hadir 21 orang. Pembahasan rancangan pembukaan dan Undang-Undang Dasar yang telah disiapkan oleh BPUPKI diselesaikan dalam tempo kurang dari dua jam. Selanjutnya sidang hari pertama sesi kedua dimulai lagi pukul 13.45 waktu Jawa. Pada akhir sidang ditutup pukul 14.42 itu Presiden Soekarno mengangkat suatu panitia kecil.

Hasil rancangannya dilaporkan pada sidang kedua PPKI, hari minggu tanggal 19 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi. Hasilnya dilaporkan oleh Oto Iskandar di Nata. R. Oto Iskandar di Nata sebagai menteri Negara mengurus masalah keamanan yang merupakan masalah krusial dalam awal kemerdekaan itu. Puncak perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan kerjasama kelompok tua dan kelompok muda. Setelah Soekarno-Hatta sampai di Jakarta menuju rumah laksamana Maeda. Pertermuan dinihari itu mengahsilkan naskah proklamasi. Agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuainya, Sukarni mengusulkan agar naskah itu dibacakan di Lapangan Ikada. Akan tetapi, usulan itu ditolak karena tempat itu merupakan tempat umu yang dapat memancing bentrokan antara rakyat dengan militer Jepang. Akhirnya disetujui, bahwa pembacaan teks proklamasi itu akan dibacakan di rumah Ir.Sukarno di Jl. Pengangsaan Timur no.56 dan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10.00 WIB.

Daftar Pustaka

Berita dan Makalah

“Asal Usul Nama Indonesia” dalam: *Kompas*, 29 Oktober 2015.

Sartono Kartodirdjo, *Nasionalisme, Lampau dan Kini*, hlm., 4-5.

Sebuah makalah yang disampaikan pada seminar tentang “Nasionalisme Indonesia Menjelang dan Pada Abad XXI” yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Darma di kampus Universitas Kristen Satya Wacana tanggal 2-5 Juni 1993.

Buku

A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1980.

Anthony Smith, *Nasionalisme, Teori, Ideologi, Sejarah*, terj. Frans Kowo. Jakarta: Erlangga, 2003.

Ayo Budi Santosa dan Encep Supriatna, *Buku Ajar Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Budi Utomo 1908 Hingga Proklamasi Kemerdekaan 1945*. Bandung: UPI, 2008.

Clifford Geertz, *Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

David Chandler, et al. 2005. "*The Emergence of Modern Southeast Asia: A New History*", disunting oleh Norman G. Owen. U. Hawai'i Press, 2005.

Hans Kohn, *Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya*. Jakarta: Erlangga, 1998.

- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Yogyakarta: Ombak: 2014.
- Slamet Muljana, *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa*. Jakarta: tp, 1968.
- , *Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan Jilid II*. Yogyakarta: LkiS, 2008.
- Suhartono W. Pranoto, *Revolusi Agustus: Nasionalisme Terpasung dalam Diplomasi Internasional*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001.

Glosarium

Dokuritsu Junbi Cosakai :

Istilah dalam bahasa Jepang yang berarti BPUPKI (Badan Usaha Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia)

Elit :

Sekelompok kecil orang-orang berkuasa, misalnya oligarki, yang menguasai kekayaan atau kekuasaan politik dalam masyarakat. Kelompok ini memiliki posisi yang lebih tinggi daripada rakyat jelata dan hak yang lebih besar daripada kelas masyarakat di bawahnya.

Feodalisme :

Sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan.

Imperialisme :

Sistem politik bertujuan untuk menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar.

Kebudayaan :

Hasil cipta, rasa, karsa, yang dijadikan milik pribadi seseorang melalui proses belajar.

Kolonialisme :

Paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu.

Nasionalisme :

suatu paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu kepada negara dan bangsa (Hans Kohn), yang muncul karena adanya persamaan sikap dan tingkah laku dalam memperjuangkan nasib yang sama (Otto Bouer) dan muncul ketika ada keinginan untuk bersatu (Ernest Renant)

Pergerakan nasional :

Bentuk perlawanan terhadap kepada kaum penjajah yang dilaksanakan tidak dengan menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Propaganda :

adalah penjelasan yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan seseorang agar menganut aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu.

Radikal :

adalah kemajuan dalam berpikir dan bertindak untuk menuntut perubahan.

Revolusi :

Perubahan secara cepat atau perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang atau di suatu tempat.

Romusha :

Kerja paksa pada masa penjajahan Jepang.

Seikerei :

Gerakan membungkuk ke arah barat yang tujuannya adalah menghormati kaisar Jepang.

Volksraad

adalah Dewan Perwakilan Rakyat pada masa penjajahan Belanda.